



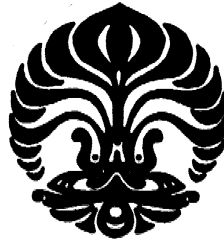
UNIVERSITAS INDONESIA

**DEMOKRASI INTERNAL PARTAI:
STUDI PROSES PEMILIHAN KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PADA
MUSYAWARAH NASIONAL GOLKAR TAHUN (1998, 2004 dan 2009)**

TESIS

**MUHAMMAD IMAM AKBAR HAIRI
1006743922**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEMOKRASI INTERNAL PARTAI:
STUDI PROSES PEMILIHAN KETUA UMUM PARTAI
GOLKAR PADA MUSYARAWAH NASIONAL GOLKAR
TAHUN (1998, 2004 dan 2009)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik**

MUHAMMAD IMAM AKBAR HAIRI

1006744922

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
FEBRUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mubammad Imam Akbar Hairi

NPM : 1006743922

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Muhammad Imam Akbar Hairi
 NPM : 1006743922
 Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Demokrasi Internal Partai : Studi Proses Pemilihan
 Ketua Umum Partai Golkar Pada Musyawarah
 Nasional Golkar Tahun (1998, 2004, dan 2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Ilmu Politik, pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chusnul Mar'iyah., Ph.D (Chusnul)

Penguji : Dra. Reni Chandriachsja., M.P.P (Reni)

Kctua Sidang : Dr. Valina Singka Subekti., M.Si (Valina)

Sekretaris Sidang : Syaiful Bahri., S.Sos., M.Si (Syaiful)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Studi proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar bagi saya menjadi subjek yang sangat menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengangkatnya sebagai topik dalam tesis ini. Selain karena minat khusus terhadap topik berkaitan Partai politik, hal yang amat membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini adalah keingintahuan mendalami proses dan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi Munas dalam menentukan seorang Ketua Umum Golkar. Mungkin karya ini jauh dari sempurna tetapi merupakan sesuatu yang dapat membantu pembaca dan masyarakat memahami sedikit mengenai demokrasi internal Partai Golkar pada Munas Golkar pasca Orde Baru.

Rasa syukur dan sujud saya panjatkan Ke Allah SWT atas rahmat dan karunianya serta setitik ilmu yang Ia curahkan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan tesis ini. Tanpa ada kehendak dari-Nya tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW saya haturkan shalawat, *allahumma sholli ala sayidina muhamadin wa'ala ali sayidina muhamadin illa yaumiddin*.

Kepada Ibu Chusnul Mar'iyah P.hD selaku pembimbing, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang diberikan selama proses penyelesaian tesis ini. Saya menyadari betul bahwa sebagian besar hasil tulisan tesis ini adalah berkat kerja keras, keikhlasan membagi waktu dalam kesibukan dan watak pengayom Ibu Chusnul yang selalu memberikan solusi setiap kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini. Arahan dan bimbingan serta keterbukaan Ibu Chusnul untuk memahami dan menyatukan pikiran hingga dapat merumuskan tesis ini hingga selesai. Terima kasih ibu Chusnul atas semua jerih payah dan budi baik selama proses bimbingan. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariyah yang mulia di sisi Allah SWT.

Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji ahli saya, Ibu Reni Chandriachsja atas kesediaannya menjadi penguji ahli ditengah kesibukan beliau serta masukan yang sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Nurhandjati sebagai dosen pembimbing akademik saya yang telah menerima

segala curhat untuk mempermudah dalam menjalani kuliah serta motivator yang baik untuk selalu mendorong cepat menyelesaikan thesis.

Kepada ketua dan sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, masing-masing Ibu Valina Singka Subekti dan Mas Syaiful Bahri, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama pengerjaan tesis saya ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh staf pengajar di program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI yang telah memberi banyak sekali pengetahuan selama saya belajar di sini.

Kepada seluruh teman-teman di pasca politik UI angkatan 2009, 2010, dan adik angkatan 2011, saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini. Disebabkan keterbatasan tempat untuk menyebutkan satu-persatu nama teman-teman maka saya tidak bisa menyebutkan nama teman-teman di pasca politik UI. Terima kasih teman-teman yang telah menjadikan pasca politik UI benar-benar bernuansa politis dan akademis sekaligus.

Terima kasih juga patut saya ucapkan kepada para narasumber yang telah saya wawancari para Tokoh Golkar atas kesempatan waktu untuk dapat menggali informasi guna memperkuat data dan memperkaya analisis thesis ini. Kepada Bang Akbar Tandjung, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas penerimaan yang begitu bersahabat dan keramahamahaman beliau sehingga diskusi wawancara begitu menyenangkan. Kepada Bang Firman Soebagyo yang mempersilakan untuk menyambangi beliau di kediamannya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas suasana santai dan akrab pada saat wawancara dan tak lupa diberikan buku tulisan beliau. Kepada Bang Rully Chairul Azwar yang telah menerima saya di ruang kerja DPR/RI, wawancara yang bersahabat dan santai membuat saya nyaman dan tak pula terima kasih atas buku yang diberikan guna memperkaya thesis ini. Kepada Bang Andi Matalatta saya ucapkan terima kasih yang mendalam karena posisi bang Andi yang begitu sibuk selalu di luar kota, alhamdulillah beliau berkenan menerima di Kantornya dan kesan yang saya tangkap begitu santai dan akrab. Terima kasih kepada narasumber saya ucapkan semoga hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

Kepada keluarga saya terutama papa dan mama tercinta, papa Kones Hairi dan mama Rosmaini, tak ada kata terimakasih yang cukup untuk menggambarkan betapa bersyukur saya atas dukungan mereka, terutama membesarkan saya dari kecil hingga sekarang. Saya merasa anak yang beruntung memiliki orang tua seperti mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada abang kandung saya Prianter Jaya Hairi yang telah menjadi sosok abang yang bersahabat, santai, tertawa hal-hal yang hanya kami mengerti kelucuannya, terutama kesediaan beliau membiayai kebutuhan sehari-hari saya di rumah dan di kampus. Adik saya Ahmad Kejora Sukma Hairi dan Rizki Idul Fitri Hairi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya untuk menyelesaikan thesis ini dan segera mendapatkan pekerjaan yang baik.

Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga kakak Ipar, yaitu kakak ipar sendiri Marfuatul latifah yang telah menjadi bagian keluarga yang baru dan memang menjadi sosok kakak yang santai, bersahabat, dan sabar. Kepada Ayah dan Ibu mbak ifa, njen, faiz, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya.

Untuk Ayah Chairul, Mama Palembang, Buyung dan dek Putra, saya menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam karena telah membuat saya menjadi bagian keluarga dan mensupport segeralah menyelesaikan thesis. Terima kasih juga saya tujukan kepada khusus Eti Muretha yang dengan caranya mampu mendukung dan mengerti setiap kesulitan yang saya hadapi baik disadari atau tanpa disadarinya untuk menyelesaikan thesis ini. Penyelesaian thesis ini menjadi langkah pelengkap rencana besar bersamanya, thesis ini juga hasil dukunganmu selalu duhai pujaan hatiku. Semoga tesis saya dapat menjadi sumbangan bagi memperkaya tulisan terkait studi pemilihan Ketua Umum Partai.

Jakarta, 12 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Akbar Hairi
 NPM : 1006743922
 Program Studi : Pascasarjana
 Departemen : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Demokrasi Internal Partai : Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Pada Musyawarah Nasional Golkar Tahun (1998, 2004, dan 2009)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
 Pada tanggal : 12 Juni 2012

Yang menyatakan


 (Muhammad Imam Akbar Hairi)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Imam Akbar Hairi

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Demokrasi Internal Partai : Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Pada Musyawarah Nasional Tahun (1998, 2004, dan 2009), xi+119 halaman, 4 lampiran, 42 buku, 14 jurnal, 5 tesis, 1 dokumen, 4 artikel koran dan majalah, 12 sumber online, wawancara 4 nara sumber

Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemilihan seorang calon Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru yang menggunakan mekanisme demokrasi yang dikenal dengan nama Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Mekanisme pemilihan Ketua Umum berdasarkan suara dari para DPD tingkat I & II pada saat Munas, merupakan hal yang baru bagi organisasi Golkar yang sebelumnya pada masa Orde Baru melalui proses penetapan/penunjukkan langsung dari Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana demokrasi internal yang terbangun di dalam Golkar Reformasi, dengan melihat proses pemilihan Ketua Umum Golkar pada saat Munas hingga faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang calon Ketua Umum yang baru.

Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi internal Partai politik, teori faksionalisasi elite, teori *catch-all Party*, dan teori Oligarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan sekunder.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurinya sebagai politisi sipil yang telah lama berkiprah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-Soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan pula sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kabinet SBY jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori demokrasi internal pemilihan pimpinan Partai, teori faksionalisasi elite, teori *catch-all party*, dan teori oligarki. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa Munaslub 1998 merupakan pertarungan berbasis ideologi yaitu Paradigma Baru, sedangkan Munas 2004 dan Munas 2009 merupakan kemenangan pragmatisme politik di tubuh Golkar

Kata kunci:

Munas Golkar, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie

ABSTRACT

Nama : Muhammad Imam Akbar Hairi

Study Programme: Political Science

Title : Internal Democracy of Political Party : The Study of Election Golkar Leader Party Process in the Musyawarah Nasional Golkar 1998, 2004 an 2009, xi+119 pages, 4 appendices, 42 books, 14 journals, 5 thesis, 1 documents, 2 newspaper and magezine articles, 12 online sources, 4 respondents interview.

The thesis is directed by the election of Golkar leader party after Orde Baru regime which using democracy mechanism as known as Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. The election mechanism of leader party based on vote from DPD I & II at Munas, were new for Golkar organization which using direct order by Soeharto as chief od Dewan Pembina Golkar before. This research also looking for answer how internal democracy was build ini Golkar Reformasi, by looking election Golkar leader party process in Munas and also the other factors which influencing the Golkar leader party elected

As the theoretical basis, this research used internal democracy political party theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. The method that is being used in this research is the qualitative method. It is an explanatory research with a primary and secondary data usage.

Data found in the field showed that Akbar Tandjung being elected on Munaslub 1998 because of his figure as civilian politician which had been long served in Golkar and also reformation push which anti-military and anti-Soeharto, being support from HMI organization, rich businessman and his power position as Ministry of State Secretary. Jusuf Kalla being elected on Munas 2004 because of the influence of power as his position as vice President SBY 2004-2009 and his social background as rich businessman. Aburizal Bakrie being elected on Munas 2009 because of the power influence factor also as Ministry of Economic and Social Welfare on SBY cabinet first edition regime and also his position as the richest people on South East Asian on 2008 by Asia Globe magazine version.

The theoretical implication shows that the research result showed has a similar explanation by internal democracy political leader election theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. This thesis also conclude that Munaslub 1998 was a competition based on ideology of reformation spirit fighting old Golkar paradigm, but Munas 2004 and Munas 2009 were the victory of political pragmatism in Golkar organization

Keywords:

Munas Golkar, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Signifikansi Penelitian	12
1.6 Kajian Literatur	13
1.7 Kerangka Teori	15
1.7.1. Teori Demokrasi Internal dan Transformasi Kepemimpinan Partai Politik	16
1.7.2. Teori Faksionalisasi Elite	19
1.7.3. Teori <i>Catch-All Party</i>	20
1.7.4. Teori Oligarki	24
1.8 Metodologi Penelitian	27
1.9 Sistematika Penulisan	29
2 SEJARAH POLITIK ORGANISASI GOLONGAN KARYA	30
2.1 Pra Kelahiran Sekber Golkar pada Demokrasi Terpimpin	30
2.1.1. Proses Terbentuknya Sekber Golkar Pada Era Demokrasi Terpimpin	33
2.2 Perubahan Sekber Golkar Menjadi Golkar di Era Orde Baru	39
2.2.1. Keberhasilan Golkar Menjadi Pemenang Pemilu 1971	42
2.2.2. Pembentukan Golkar Pasca Pemilu 1971	44
2.2.3. Golkar Pasca Penetapan UU No. 3 Tahun 1975	45
2.2.4. Munas Golkar Pada Era Orde Baru	47
2.3 Partai Golkar Reformasi	50
2.3.1. Paradigma Baru Partai Golkar Reformasi	50
2.3.2. Demokratisasi Pemilihan Ketua Umum Golkar Pada Munas Era Reformasi	54
2.3.3. Organisasi Sayap Pendukung Partai Golkar Reformasi	61
3 PEREBUTAN KEKUASAAN KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PASCA ORDE BARU	66
3.1. Penerapan Demokrasi Dalam Munas Golkar Reformasi	66
3.2. Munaslub Golkar 1998	68
3.2.1. Kontestasi Faksi “Militer+Cendana Dengan Faksi “Sipil” Pada Munaslub 1998	70
3.2.2. Kemenangan Akbar Tandjung (Faksi Sipil) Pada Munaslub 1998	73

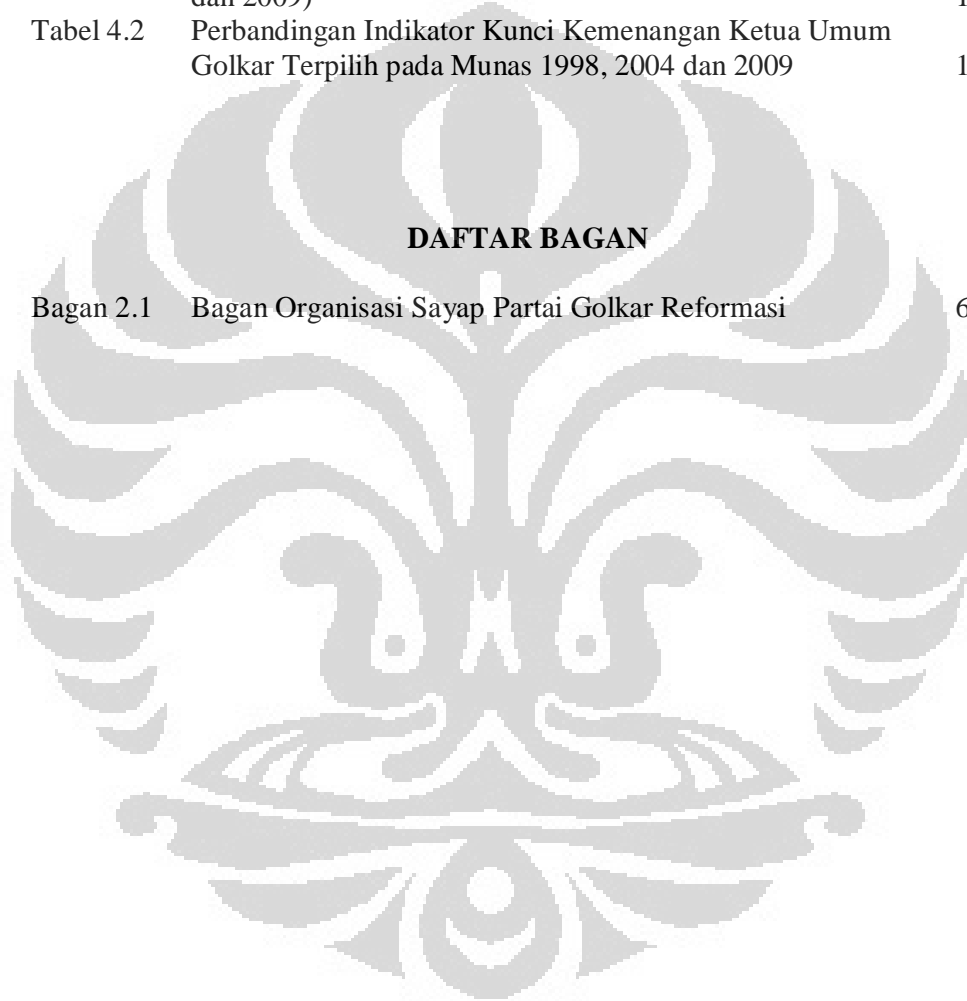
3.3. Munas Partai Golkar ke-Tujuh 2004	79
3.3.1. Pertarungan Faksi Akbar Tandjung (Faksi “Struktural”) Dengan Faksi Jusuf Kalla (Faksi “Saudagar Kaya”)	80
3.3.2. Kemenangan Jusuf Kalla Pada Munas 2004	82
3.4. Munas Golkar ke-Delapan 2009	96
3.4.1. Pertarungan Antar-Pengusaha Kaya di Munas 2009	98
3.4.2. Kemenangan Aburizal Bakrie Pada Munas 2009	101
4 DEMOKRASI INTERNAL GOLKAR PADA PEMILIHAN KETUA UMUM DI MUNAS (1998, 2004, dan 2009)	105
4.1. Pergeseran Ideologi Paradigma Baru Menjadi Pragmatisme Politik	105
4.1.1. Kemenangan Ideologi Paradigma Baru Pada Munaslub 1998	106
4.1.2. Kemenangan Pragmatisme Politik Pada Munas 2004	115
4.1.3. Kemenangan Kembali Politik Pragmatis Pada Munas 2009	120
4.2. Perubahan <i>Merit-System</i> Menjadi <i>Oligark-System</i> Dalam Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar	127
4.3. Tantangan Golkar Pada Era Pragmatisme Politik di Dalam Tubuh Golkar	128
2.3.1. Platform/Ideologi Partai Golkar yang Tidak Spesifik	129
2.3.2. Kebutuhan Dana yang Besar Untuk Kebutuhan Operasional Partai Golkar	131
2.3.3. Penurunan Suara dan Kekalahan Pada Pilpres 2009 dan Pileg 2009	133
5 PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Organisasi Massa Bentuk Kelompok Fungsional Militer (ABRI) Sebagai Tandingan Organisasi Massa PKI	36
Tabel 2.2	Hasil Pemilu di Indonesia Tahun 1971-1997 (Data Berupa Persentase Suara Pemilih)	41
Tabel 4.1	Perbandingan Munas Golkar Pasca Orde Baru (1998, 2004, dan 2009)	124
Tabel 4.2	Perbandingan Indikator Kunci Kemenangan Ketua Umum Golkar Terpilih pada Munas 1998, 2004 dan 2009	126

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Bagan Organisasi Sayap Partai Golkar Reformasi	63
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penulisan Tesis ini membahas permasalahan studi proses pemilihan Ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar), dengan mengambil studi kasus pada saat pemilihan Ketua Umum pasca Orde Baru. Studi proses adalah mempelajari dan meneliti mengenai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan antara tahapan awal (*input*) dan tahapan keluaran (*output*). Dengan demikian di dalam tulisan tesis ini membahas mengenai tahapan-tahapan di dalam pemilihan dan sekaligus strategi politik para Ketua Umum Partai Golkar terpilih. Pemilihan Ketua Umum partai Golkar melalui mekanisme yang disebut sebagai Musyawarah Nasional Golkar (MUNAS Golkar. Di dalam MUNAS Golkar dimulai dengan proses dukungan, pencalonan, strategi politik (*input*) hingga pemilihan yang menghasilkan Ketua Umum yang baru (*output*).

Studi proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar merupakan studi yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam terutama setelah Partai Golkar tidak lagi menjadi Partai Pemerintah sebagai mesin politik bagi Pemerintahan Orde baru dibawah rezim Soeharto.¹ Pasca runtuhnya rezim Orde baru, maka dilakukan beberapa penyesuaian di dalam susunan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Golkar terutama dengan tidak adanya peran Dewan Pembina Partai Golkar sebagai pemegang kekuasaan penuh atas tubuh organisasi. Dewan Pembina Partai Golkar pada saat Rezim Orde Baru yang dipegang oleh Soeharto berhak menentukan Ketua Umum Partai Golkar yang baru dan bisa membekukan partai Golkar apabila dianggap mengancam ideologi Negara yaitu Pancasila. Dengan dihapuskannya posisi Dewan Pembina Partai Golkar, maka mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dilakukan dengan mekanisme Musyawarah Nasional (MUNAS).

¹ R. William Liddle, "Indonesia in 1987, "The New Order at the Heights of Its Power", the University of California, 1988, <http://www.jstor.org/stable/2644819> diakses pada: 20/04/2011 06:02 hlm. 181

Pada masa Orde Lama, Ketua Umum Golkar pertama kali terpilih melalui Sekretariat bersama Golkar (Sekber Golkar) yaitu Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono, yang kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965. Pada masa Orde Baru telah terjadi proses pergantian posisi Ketua Umum Golkar sebanyak 4 kali yaitu Amir Moertono (1973-1983), Sudharmono (1983-1988), Wahono (1988-1993) dan Harmoko (1993-1998). Posisi Ketua Umum Golkar hanya diisi oleh kalangan sipil-birokrat satu kali yaitu terpilihnya Harmoko yang sebelumnya selalu diisi oleh kandidat yang berlatar belakang militer. Hal ini dapat dipahami disebabkan Golkar memang organisasi yang terbentuk dari kebutuhan ABRI untuk menekan PKI yang memiliki basis massa yang besar.

Perkembangan pesat Partai Golkar mulai terlihat dengan berhasil mempertahankan integritas dan soliditas di dalam tubuh partai dengan meyakinkan para kadernya bahwa bendera partai berlambang pohon beringin tersebut tetap ada dan meneruskan fungsinya sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang masuk di dalam daftar kandidat-kandidat partai yang mengikuti pemilu 1999. Tidak sedikit banyak pihak baik kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang tidak menduga bahwa partai Golkar tetap mendapatkan suara yang besar meskipun tidak lagi dominan sehingga berhasil menduduki partai ke-dua yang mendapat suara pemilih terbanyak pada pemilu 1999.

Salah satu alasan mengapa partai Golkar tetap bisa mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat Indonesia pada pemilu 1999 adalah disebabkan pada masa Pemerintahan Orde Baru yang melarang partai politik melakukan aktivitas politik hingga ke level pedesaan/*grass-root*, sehingga hanya Partai Golkar yang pada saat itu yang menamakan dirinya sebagai golongan karya bukan sebuah partai politik menikmati keistimewaan untuk bisa menanamkan pengaruhnya dan memperluas kaderisasi hingga ke tingkat pedesaan. Hal ini yang menjadikan dukungan partai Golkar tetap kuat di level *grass roots* meskipun

faktor kepemimpinan Akbar Tandjung di dalam menjaga soliditas dan integritas kader Golkar pada masa transisi tidak dapat dikesampingkan.²

Ada beberapa catatan penting dalam perubahan atau transisi partai Golkar pada masa Orde baru dengan partai Golkar pada masa pemerintahan Reformasi. Perubahan di dalam tubuh partai Golkar pada masa Reformasi yaitu: *pertama*, dengan berakhirnya rezim Orde baru maka Soeharto tidak lagi memiliki kekuasaan di dalam tubuh Pemerintahan dan menolak untuk menjadi Dewan Pembina partai Golkar lagi yang berarti pula bahwa pendanaan Partai Golkar tidak lagi disokong oleh Soeharto dan mengharuskan Partai Golkar menemukan sokongan dana dari sumber lain yaitu seperti kader-kader yang dicalonkan menjadi anggota legislatif dan melalui sumbangan pengusaha-pengusaha yang tetap terjalin hubungan baik pasca Orde baru.

Kedua, secara ideologi dan *platform* partai Golkar pasca Orde baru tidak mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan dengan Golkar di masa Orde baru. Masih sangat bersifat abstrak dan umum di dalam platform partai.³ Struktur keorganisasian Golkar pada saat sekarang tidak banyak berubah dan tetap mempertahankan struktur organisasi kepartaian Golkar pada masa Orde Baru. Partai Golkar nyaris tidak mengalami perubahan yang signifikan struktur keorganisasian kecuali dalam hal pembiayaan partai baik di dalam aktivitas partai sehari-hari ataupun terutama di dalam persiapan kampanye menghadapi pemilu dan pemilukada. Dengan tidak lagi dibawah kepemimpinan Soeharto, maka posisi Ketua Umum Partai Golkar menjadi terbuka bagi seluruh kader partai Golkar untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih melalui Musyawarah Nasional Golkar (MUNAS Golkar), tidak lagi berdasar mekanisme sesuai penunjukkan oleh Soeharto.

² Andreas Ufen "Political parties and democratization in Indonesia", di dalam buku *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, Marco Bünte dan Andreas Ufen, (Routledge, New York, 2009) hlm. 153.

³ Akbar Tandjung, *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007) hlm. 178-179, Lihat tesis Sri Andayani, "Profil Tayangan Iklan Politik Selama Kampanye Politik 1999: Studi Analisis Isi Media Televisi Terhadap Tayangan Iklan Politik Tiga Partai Perolehan Suara Terbesar (PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB)", Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 32-33.

Ketiga, dihapuskannya 2 jalur AB (ABRI, Birokrat,) di dalam organisasi Partai Golkar. Pasca Orde Baru aturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi/AD ART Partai Golkar hanya mengakui dan menerima jalur Golongan Karya untuk bisa menjadi kader Golkar dan dihapuskannya jalur ABRI dan Birokrat. Langkah ini diambil untuk menghapuskan citra Golkar pada masa Orde Baru yang dikenal dengan partai “mesin pemerintahan” Orde Baru. Memasuki masa reformasi, maka partai Golkar ingin mengubah citra tersebut dengan menjadi partai Golkar yang bebas dari bayangan Orde Baru dan sekaligus menghapus pengaruh militer dalam mendukung semangat reformasi yang mendorong militer kembali ke barak. Di dalam perkembangan pasca Orde Baru, upaya melepaskan diri dari citra “mesin pemerintahan” dan “organisasi massa orang militer” berhasil dilakukan dengan mengusung citra partai yang sejalan dengan cita-cita reformasi.

Beberapa perubahan di dalam aturan organisasi Partai Golkar melahirkan proses baru di dalam pemilihan Ketua Umum organisasi kepartaiannya. Studi proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar merupakan objek kajian penelitian yang menarik disebabkan tidak hanya kontestasi antar calon kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang baru terbuka bagi seluruh kader Golkar berlangsung secara demokratis, namun faktor-faktor seperti posisi kekuasaan di dalam pemerintahan, kekuatan finansial, faktor semangat kesukuan/keadaerahan, sangat menentukan di dalam terpilihnya seorang calon Ketua Umum yang baru. Posisi pimpinan partai merupakan posisi yang sangat krusial dan substansial di dalam penentuan kebijakan partai terhadap pemerintahan terutama menyangkut dalam hal pengawasan kader-kader partai di legislatif, pejabat publik, dan penentuan koalisi terhadap pemerintahan di dalam kebijakan tertentu.⁴

⁴ Alan Warre, *Political Parties and Party Systems*, New York: Oxford University Press, 1996. hlm 258-259

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Sejak dimulainya rezim Reformasi pada tahun 1998-1999, Partai Golkar telah melakukan proses pemilihan Ketua Umum sebanyak tiga kali. Yaitu pada tahun 1998 dengan terpilihnya Akbar Tandjung, pada tahun 2004 dengan Jusuf Kalla dan tahun 2009 terpilih Aburizal Bakrie. Dari ketiga periode pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru terlihat bahwa secara organisasi, Partai Golkar telah menerapkan mekanisme demokrasi internal partai yang baik. Hal ini dilihat dari sisi terjadinya proses pergantian pimpinan partai dengan mekanisme demokrasi dengan melalui proses MUNAS Golkar. Perpindahan kekuasaan tertinggi di dalam Partai Golkar melalui MUNAS Golkar tidak hanya menjadi pertama yang dilakukan oleh Partai yang ada di Indonesia, namun sekaligus menjadi contoh bagi proses demokratisasi internal di dalam partai-partai lain di Indonesia.

Sejatinya posisi penting Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi perebutan kekuasaan di antara kader-kader partai Golkar tidak terlepas dari situasi politik setelah berakhirnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan pengunduran diri oleh Soeharto pada 11 Maret 1998. Proses pemilihan Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi partai Golkar merupakan salah satu perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh Golkar untuk menyelamatkan organisasi. Para pimpinan/para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta kader-kader Golkar lainnya merasakan pentingnya melakukan perubahan yang fundamental untuk menyelamatkan Organisasi Golkar. Dalam rangka menyelamatkan Organisasi diperlukan menentukan sikap dan perubahan struktur Organisasi Golkar. Dengan tidak lagi dirasakan Soeharto menjadi sosok yang sentral di dalam Golkar, maka harus segera dilakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan dan kader Golkar terutama pengurus DPP, DPP tingkat I dan DPP tingkat II partai Golkar.

Stigma negatif yang dilayangkan kepada mantan penguasa Orde Baru yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 ikut pula berimbas pada organisasi Golkar. Imbas itu

terlihat dengan adanya tuntutan untuk membubarkan Golkar karena dianggap ikut “menanggung dosa” yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru. Bahkan tuntutan menjadi sangat anarkis yang diikuti pembakaran-pembakaran kantor DPP I Golkar di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menjadi urgensi bagi para pengurus DPP Pusat pada saat itu menginginkan agar segera dilakukan pertemuan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena situasi yang dihadapi Golkar pada saat itu sudah sangat genting dan membahayakan Organisasi. Munaslub berlangsung pada 9-11 Juli 1998 dengan agenda memimpin calon Ketua Umum yang baru dan mendorong agar Harmoko selaku Ketua Umum mengundurkan diri. Munaslub menjadi Proses pertama bagi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru pasca Orde Baru.

Pada Munaslub 1998 para kontestan calon Ketua Umum yang baru adalah Kelompok Habibie diwakili oleh Akbar Tandjung sedangkan Edi Soedrajat maju sebagai kontestan dari kubunya sendiri. Berdasarkan ketentuan AD/ART bahwa Ketua Umum Partai dipilih oleh perwakilan pengurus provinsi atau DPD I bukan oleh kader Golkar keseluruhan. Mayoritas perwakilan DPD I merupakan mantan anggota militer dan dapat dibaca Edi Soedrajat mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan Akbar Tandjung. Hal ini didasarkan pada persepsi bahwa kelompok militer ingin menghukum kelompok Habibie yang telah melakukan pengkhianatan terhadap Presiden Soeharto dengan mendorongnya untuk turun dari jabatan Presiden.

Pada masa Munaslub berlangsung, muncul rumor kabar bahwa IMF tidak akan menerima apabila Ketua Umum yang terpilih tidak dapat mendukung kepemimpinan nasional pada saat itu. Apabila Ketua Umum yang terpilih merupakan kelompok pendukung Soeharto maka IMF tidak akan membantu Indonesia keluar dari krisis. Rumor ini tentu saja menguntungkan kubu Akbar Tandjung dimana tidak hanya Habibie yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur Provinsi mendukung Akbar Tandjung dan juga banyak para pejabat militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri urusan sosial dan politik serta Wiranto yang menjabat Panglima Besar ABRI mendukung Ketua Umum yang dapat bekerjasama dengan pemerintahan Habibie. Dengan dukungan

dari kelompok Habibie, pejabat tinggi militer, rumor tekanan IMF, serta menggunakan organisasi massa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Akbar Tandjung berhasil menjadi Ketua Umum Golkar yang baru periode 1999-2004.

Pasca keberhasilan Partai Golkar memenangkan suara terbanyak di dalam Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar melakukan persiapan mengadakan pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru menggantikan kepemimpinan Akbar Tandjung selaku Ketua Umum Partai Golkar pada masa jabatan periode 1999-2004. Pada tanggal 15-20 Desember di Bali, diadakan MUNAS GOLKAR ke VII (tujuh), untuk mendengarkan pidato pertanggung jawaban Akbar Tandjung selaku Ketua Umum Partai Golkar pada masa bakti 1998-2004 dan kemudian dilanjutkan dengan agenda kegiatan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru untuk periode 2005-2009. Pada awal kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar yang baru yaitu Akbar Tandjung selaku *incumbent*, Wiranto, Agung Laksono, Marwah Daud Ibrahim dan Slamet Effendi Yusuf. Sosok Jusuf Kalla hadir di dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar justru pada saat-saat sebelum diadakan pemungutan suara oleh Abdul Gafur, selaku Pimpinan Sidang.

Sosok Akbar Tandjung selaku Ketua Umum Partai Golkar (1999-2004) sangat populer dan disegani di dalam internal Partai Golkar. Hal ini disebabkan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2004 tidak terlepas dari peranan sentral sosok Akbar Tandjung dalam mengkonsolidasikan kader-kadernya di hampir mayoritas provinsi di Indonesia.⁵ Keberhasilan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2004 menjadi modal penting bagi Akbar Tandjung untuk dapat menjadi kandidat utama dan berpeluang besar untuk terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada MUNAS GOLKAR VII. Meskipun mekanisme siapa bakal calon Presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (PILPRES) 2009 harus diputuskan melalui Konvensi Partai

⁵ Partai Golkar berhasil memperoleh suara mayoritas dari provinsi luar-jawa namun beberapa wilayah di Jawa pun mengalami peningkatan jumlah suara Partai Golkar, Golkar berhasil memperoleh 21,58% dari total suara dan mendapat jatah kursi di DPR-RI sebanyak 128 kursi. Lihat Leo Suryadinata, "The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto", *Contemporary Southeast Asia*; Aug 2007; 29, 2; ProQuest, hlm. 346.

Golkar akan tetapi posisi Ketua Umum Partai Golkar berpeluang paling besar untuk menjadi CAPRES pada PILPRES 2009.

Akbar Tandjung selaku Incumbent berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Namun sebelum munas telah ada pertemuan antar 8 Organisasi untuk menyingkirkan Akbar Tandjung dari posisi Ketua Umum. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Harmoko, Wiranto, Moerdiono, Siswono Yudohusodo, Cosmas Batubara dengan slogan ABA : Asal Bukan Akbar. Namun Akbar Tandjung melakukan *counter* dengan melakukan kunjungan ke provinsi dan distrik pimpinan daerah Golkar dan memberikan sekitar 10 Juta US\$ yang merupakan uang sumbangan dari Megawati untuk mengamankan posisi Megawati menghadapi Pemilu 2009.⁶ Pada Munas 2004 beberapa kandidat yang ikut dalam bursa Ketua Umum yaitu Surya Paloh, Marwah Daud, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Wiranto sedangkan pencalonan Kalla menimbulkan keterkejutan karena akan terjadi konflik antara posisi wakil Presiden dengan Posisi Ketua Umum apabila terpilih. Jusuf Kalla merupakan pengusaha bugis yang lebih kaya dari Akbar dan tidak akan kekurangan modal untuk membiayai Kampanye Pemilu Golkar.

Akbar Tandjung dengan sangat yakin dengan dukungan yang akan didapat pada masa pemilihan karena ia sebagai sosok yang telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan dan sebagai politisi yang berpengalaman ia mampu merubah peraturan di dalam tata tertib pemilihan. Terdapat beberapa perubahan di dalam kandidat pemilihan Ketua Umum yaitu Wiranto memutuskan akan mendukung Akbar Tandjung setelah akan diberikan posisi Dewan Penasehat Pusat. Namun Prabowo Subianto, Surya Paloh, Aburizal Bakri, dan Agung Laksono menyatakan akan mendukung Jusuf Kalla. Sehingga hanya tersisa 3 kandidat yaitu Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Marwah Daud. Pada pemilihan pertama, Akbar Tandjung mendapatkan suara 191 suara, Jusuf Kalla 269 Suara sedangkan Marwah Daud Ibrahim mendapatkan 13 suara. Pada pemilihan kedua Kalla mendapatkan 323 suara sedangkan Akbar hanya 156 suara. Pada Munas Golkar

⁶ Leo Suryadinata, *Op. Cit.*

ke VII (tujuh) di Bali terpilihlah Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar yang baru periode 2004-2009 menggantikan Akbar Tandjung.

Pasca kegagalan Capres yang diusung oleh Golkar duet Jusuf Kalla dan Wiranto pada Pemilihan Presiden 2009, Golkar bersiap melakukan pemilihan Ketua Umum yang baru. Pada Munas ke VIII (delapan), berlangsung di Pekanbaru pada 6-8 Oktober 2009. Pada Munas di Pekanbaru, Kontestan yang bertarung adalah para pengusaha kaya yang sudah sangat dikenal di Media massa sebagai saudagar kaya. Aburizal Bakrie yang memiliki perusahaan-perusahaan tambang yang tergabung dengan Bakrie Group sedangkan Surya Paloh sebagai pemilik media televisi yang terkenal dan besar yaitu Metro TV. Yang menarik masing-masing kubu baik Bakrie dan Paloh sama-sama mengklaim telah mendapatkan suara terbanyak dari para pemegang suara, bahkan timbul isu para pemegang suara bermuka dua. Namun keunggulan kekayaan yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie terlihat mempengaruhi pilihan para pemegang suara untuk memilihnya. Aburizal Bakrie keluar sebagai Ketua Umum yang baru menggantikan Jusuf Kalla untuk periode 2009-2014.

Jika melihat dari ketiga proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru maka terdapat pergeseran faktor-faktor maupun strategi politik yang mempengaruhi kemenangan para Ketua Umum Partai Golkar terpilih Pasca Orde Baru. Pergeseran ini dapat dilihat dari pada masa Akbar Tandjung, faktor organisasi dan ideologi menjadi kunci kemenangannya dalam perebutan Ketua Umum Partai pada Munaslub. Pada masa Jusuf Kalla terpilih, faktor organisasi dan kekuatan kekuasaan sekaligus finansial yang besar bila dibandingkan Akbar Tandjung menyebabkan Akbar tidak lagi terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Sedangkan pada masa Aburizal Bakrie terpilih kekuatan finansial sebagai seorang milyuner menjadi kunci utama kemenangan dalam pemilihan Ketua Umum Golkar 2009. Pergeseran ini terlihat cenderung kearah pragmatisme politik di dalam internal kader-kader Golkar.

Pragmatisme politik Partai Golongan Karya dapat dilihat dari dua hal yaitu pertama dari sisi proses rekrutmen kader partai yakni terlihat perekrutan calon-

calon legislatif yang diusung partai dan terutama di dalam proses Musyawarah Nasional Partai Golkar pada saat pemilihan pimpinan partai. Kedua dari sisi dengan melihat tidak adanya ideologi yang spesifik yang menjadi landasan *platform* partai Golkar sebagai preferensi kebijakan yang ditawarkan kepada pemilih pada saat kampanye pemilu. Namun kedua sisi tersebut baik proses rekrutmen kader partai dan ketidakhadiran ideologi yang spesifik di dalam partai Golkar memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai sebuah proses yang saling terkait dengan pertimbangan yang merupakan keputusan partai Golkar berdasarkan pendefinisian partai terhadap kondisi masyarakat Indonesia melalui pengalaman pemilu dan masalah-masalah yang dihadapi internal partai pasca rezim Orde Baru.

Pragmatisme politik partai Golkar dari segi proses rekrutmen kader partai sesungguhnya berakar pada saat perubahan yang terjadi di dalam internal Golkar dari sebuah organisasi yang menjadi 'mesin' politik pemerintahan Orde Baru berubah menjadi partai politik yang mandiri tanpa keterlibatan pemerintahan terutama di dalam menyangkut pendanaan partai sehari-hari maupun pada saat kampanye atau menjelang pemilu. Kondisi yang dihadapi partai Golkar pada saat itu setelah berakhirnya rezim Presiden Soeharto yang sekaligus menduduki posisi sebagai Dewan Pembina Golkar, dihadapkan dengan masalah pendanaan yakni pada masa Orde Baru, Golkar dibiayai oleh yayasan Dakab yang diketuai oleh Soeharto. Namun berakhirnya rezim Orde baru, Soeharto menolak untuk memberi bantuan/membiayai Partai Golkar sehingga pendanaan partai bersumber dari kolega-kolega bisnis, simpatisan, dan para kader partai yang menjadi calon legislatif (caleg).⁷

Pertautan antara pragmatisme politik di dalam tubuh Golkar sangat terkait erat dengan pembiayaan Partai Golkar oleh para caleg. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan bukanlah kepatutan dari para caleg untuk membantu membiayai dana partai, namun hal ini dalam pandangan saya berdampak luas

⁷ Akbar Tandjung, *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007) hlm. 178-179

pada pola dan proses perekrutan kader partai Golkar yang menitikberatkan kepada *resource*/sumber daya yang dimiliki para calon kader dan caleg bukan pada proses lamanya mengabdikan diri dalam kepartaian. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam kader, caleg dan bahkan pimpinan partai bisa dari 'orang baru' asal memiliki kemampuan finansial yang kuat. Tidak mengherankan banyaknya selebritis yang masuk menjadi kader Golkar 'instan' dan para pengusaha atau 'saudagar kaya' yang keluar menjadi pimpinan partai pasca kepemimpinan Akbar Tandjung yakni Jusuf Kalla (2004-2009) yang terpilih menjadi Ketua Umum partai Golkar melalui Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (MUNAS GOLKAR ke VII).

Hadirnya para pengusaha kaya dan selebritis di dalam proses pengkaderan 'instan' di dalam tubuh partai Golkar, dalam pandangan saya berpijak pada pengalaman pemilu di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung yang hanya mampu menduduki posisi ke-tiga pada pemilu 1998-1999 disebabkan minimnya dana akibat tidak lagi disokong Soeharto selaku Dewan Pembina Golkar pada masa Orde Baru. Hal ini menyebabkan adanya semacam keyakinan bahwa kemenangan di dalam pemilu juga harus ditunjang oleh kekuatan finansial. Disinilah salah satu letaknya pragmatisme politik partai Golkar dengan melihat bahwa keberhasilan di dalam menarik simpati para pemilih sangat bergantung pada kemampuan finansial dari para caleg dan pimpinan partai bukan pada ideologi dan program yang spesifik yang ditawarkan pada saat kampanye. Kekuatan finansial dari pimpinan partai merupakan kekuatan utama untuk pemilihan pemilu hal ini berdasarkan pengalaman dengan melihat banyak kasus dukungan pemilih bisa didapatkan dengan memberikan 'uang' kepada rakyat pada saat kampanye dan hari 'H' pelaksanaan pemilu.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

Pasca Orde Baru dengan dihapuskannya posisi Ketua Dewan Pembina yang memiliki wewenang penuh atas pemilihan posisi-posisi pimpinan Organisasi

dan keberlangsungan Organisasi, terjadi perubahan signifikan terutama menyangkut posisi tertinggi di dalam Partai Golkar. Perubahan ini juga didorong oleh dengan berakhirnya rezim Orde Baru maka berakhir pula periode organisasi Golkar sebagai “mesin pemerintah” Orde Baru. Posisi Ketua Umum Partai Golkar menjadi terbuka bagi seluruh kader untuk mencalonkan diri melalui mekanisme demokrasi di dalam partai yang dikenal dengan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa. Pasca Orde Baru telah terpilih 3 orang Ketua Umum yang baru dengan mekanisme Munaslub dan Munas yaitu Akbar Tandjung (1998-2004), Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014). Dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

Bagaimana demokrasi internal Partai Golkar di dalam pemilihan Ketua Umum pada Munas Golkar tahun 1998, 2004 dan 2009? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dilihat dari kemampuan organisasional, sumber *resources* yang terdiri dari kekuatan finansial, penguasaan struktur organisasi, dan faktor integrasi ideologi, serta akses terhadap jabatan strategis di dalam pemerintahan yang dimiliki Ketua Umum Golkar yang terpilih.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui demokrasi internal partai Golkar di dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Pasca Orde Baru khususnya dengan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi sosok Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie untuk terpilih sebagai posisi Ketua Umum Golkar.

1.5. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi penelitian untuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik di bidang kepartaian di Indonesia terutama menyangkut studi proses

pemilihan Ketua Umum Partai di Indonesia khususnya mengenai Munas Golkar Pasca Orde Baru pada tahun 1998, 2004 dan 2009.

1.6. KAJIAN LITERATUR

Ada beberapa karya penelitian yang ditemukan di perpustakaan Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia yang menyangkut Partai Golongan Karya diantaranya:

Pertama, penulisan Tesis oleh Budi Santoso Martono dengan judul Faktor-faktor komunikasi politik kader Golkar yang berpengaruh terhadap peningkatan suara pemilih Golkar pada pemilu 1992. Permasalahan yang ditulis oleh Budi Santoso Martono adalah mengenai bagaimana pengaruh kemampuan komunikasi politik dari kader Golkar yang mempengaruhi peningkatan bagi dukungan suara pada Pemilu 1992. Kesimpulan pada tesis ini bahwa kemampuan komunikasi politik dari kader Golkar memberikan dampak positif bagi peningkatan suara pemilih pada pemilu 1992.

Kedua, penulisan Tesis oleh Sri Andayani dengan judul profil tayangan iklan politik selama kampanye politik 1999: studi analisis isi media televisi terhadap tayangang iklan politik tiga partai perolehan suara terbesar (PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB). permasalahan yang ditulis oleh Sri Andayani adalah mengenai isi dari pesan yang disampaikan oleh ketiga partai tersebut di dalam mempengaruhi pemilih pada pemilu 1999. Kesimpulan pada tesis ini bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh ketiga partai tersebut berbeda-beda namun masih menekankan jargon-jargon daripada penawaran kebijakan yang spesifik namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penambahan jumlah suara pada pemilu 1999.

Ketiga, penulisan Tesis oleh Sufardi Nurzain dengan judul Representasi Elit politik di Surat Kabar, Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kompetisi Akbar Tandjung dan H.M. Jusuf Kalla Dalam Perebutan Ketua Umum Pada

Munas Golkar VII di *Harian Kompas*, *Harian Media Indonesia*, dan *Suara Karya*. Permasalahan yang ditulis oleh Sufardi Nurzain yaitu mengenai pembangunan karakter yang ditulis ke-tiga media tersebut menyangkut pertarungan para elit Golkar di dalam Munas ke-VII di Bali. Kesimpulan pada tesis ini bahwa para ketiga media tersebut mewakili representasi di dalam pembentukan karakter elit Golkar yang bertarung di dalam Munas Golkar ke VII di Bali.

Keempat, penulisan Tesis yang ditulis oleh Ade Indra dengan judul Demokratisasi Internal Partai: Seleksi Calon Presiden RI 2004 melalui Konvensi Golkar. Permasalahan yang ditulis oleh Ade Indra mengenai proses demokratisasi internal partai Golkar dengan melihat proses pemilihan Calon Presiden yang akan diusung Partai Golkar untuk menghadapi Pilpres 2004 melalui mekanisme Konvensi Golkar. Kesimpulan konvensi yang dilakukan secara proses dapat dilihat berlangsung secara demokratis disebabkan proses pencalonan terbuka untuk seluruh kader Golkar, namun apabila dilihat dari segi tata tertib dapat disimpulkan tidak demokratis karena terjadinya pelanggaran dan tidak berdasarkan pada pandangan obyektif dari para kader yang memiliki hak pilih.

Kelima, penulisan Tesis oleh Hanya Yudha AR yang berjudul faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara Partai Golkar di pemilu legislatif 2009. Permasalahan yang ditulis oleh Hanya Yudha AR mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penurunan suara pada pemilu legislative 2009 seperti terjadinya faksionalisasi dan kelemahan pimpinan partai Golkar pada saat itu yang dianggap tidak cakap dan matang dalam memimpin partai. Kesimpulan, penurunan suara Golkar pada pemilu legislatif 2009 disebabkan lemahnya kaderisasi dan ideologisasi di dalam partai yang semakin buruk dengan adanya faksionalisasi di dalam Partai yang terus dibiarkan oleh Ketua Umum terpilih yaitu Jusuf Kalla.

Perbedaan kelima penulisan Tesis di atas dengan penulisan Tesis ini adalah menyangkut spesifikasi objek penelitian yaitu membahas mengenai proses

pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang dilangsungkan di dalam Munas Golkar.

1.7. KERANGKA TEORI

Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana demokrasi internal partai Golkar di dalam pemilihan Ketua Umum pada Munas Golkar tahun 1998, 2004, dan 2009, maka akan digunakan beberapa teori yaitu demokrasi internal dan transformasi kepemimpinan partai politik, faksionalisasi elite dan oligarki partai. Teori demokrasi internal partai politik digunakan untuk mengetahui syarat-syarat proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik di dalam internal partai. Partai politik harus memenuhi syarat-syarat demokrasi internal yang baik disebabkan proses demokrasi di dalam partai menjadi cerminan bagi proses demokrasi di dalam sistem politik suatu negara. Semakin sesuai dengan nilai-nilai yang tepat dalam menciptakan demokratisasi internal partai maka akan semakin baik bagi peranan partai politik dalam sistem politik negara.

Teori transformasi kepemimpinan partai politik digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh setiap kandidat pimpinan partai politik agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pimpinan partai yang ideal. Syarat-syarat ideal seorang pimpinan partai untuk terpilih diperlukan untuk menganalisa dan diperbandingkan dengan nilai-nilai kekuatan yang dimiliki oleh Ketua Umum Golkar terpilih sehingga dapat memenangkan pertarungan posisi tertinggi dalam partai Golkar. Teori Oligarki digunakan untuk dapat menjelaskan faktor-faktor sumber daya finansial dan akses terhadap jabatan strategis di dalam pemerintahan yang menjadi kekuatan untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan Ketua Umum Golkar pasca Orde Baru.

Teori faksionalisasi elite digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai faksi-faksi yang terbentuk pada saat Munas Golkar berlangsung di 1998, 2004 dan 2009. Teori faksionalisasi elite ini juga untuk dapat menjelaskan

ciri-ciri dan kategori dari faksi yang terbentuk pada saat Munas berlangsung. Teori *Catch-all Party* digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa ciri-ciri dari partai yang bersifat *catch-all* dan Golkar termasuk Partai politik di Indonesia yang memiliki ciri-ciri tersebut. Partai Golkar yang tidak memiliki basis ideologi yang spesifik di dalam menentukan kebijakan Partainya di Parlemen dan Pemerintahan menjelaskan bahwa Golkar masuk dalam kategorisasi sebagai Partai yang bersifat *Catch-all*.

1.7.1. TEORI DEMOKRASI INTERNAL PARTAI DAN TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK

Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan Partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar rumput/*grassroots* sehingga Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-kadernya.⁸ Dengan demikian proses demokrasi internal partai adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai sehingga pimpinan partai yang terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai seorang pimpinan tertinggi di dalam partainya. Akan tetapi yang menjadi persoalan di dalam penerapan demokrasi internal bagi Partai politik yang memiliki jumlah kader yang besar. Alan Warre memiliki 2 cara untuk dapat menerapkan mekanisme demokrasi di dalam pemilihan seorang Ketua Umum Partai yaitu mengatakan bahwa:

*“to have democratic control of candidate selection to overcome the problem posed by the size of the membership, the first is to have local meeting and so on until the final meeting into which the views expressed at the original local meeting are fed in or to have all all members vote directly in choosing candidates”.*⁹

⁸ Alan Warre, *Op.Cit.* hlm. 258.

⁹ *Ibid.*

“untuk memperoleh kontrol/mekanisme demokratis di dalam pemilihan kandidat (pada partai) yang memiliki jumlah anggota yang besar yaitu pertama dengan melakukan pertemuan tingkat lokal hingga ke pertemuan tingkat akhir (pusat) dimana setiap pandangan dari para anggota dari tingkat lokal masuk di dalam pertimbangan atau melalui mekanisme semua anggota hadir dan memilih secara langsung terhadap kandidat yang dicalonkan ”

Namun sebuah proses demokrasi internal tidak benar-benar menjamin bahwa proses yang berlangsung benar-benar demokratis. Kemenangan seorang Ketua Umum sangat ditentukan oleh kekuatan yang dimilikinya seperti latar belakang profesinya seperti militer, pengusaha, atau birokrat, memiliki dukungan massa, kemampuan finansial, kemampuan persuasif dan lain sebagainya. Masing-masing kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para calon Ketua umum untuk dapat memenangkan suara para kadernya. Namun seringkali para kader mengutamakan pragmatisme politik seperti tawaran uang, jabatan, dan insentif lainnya dengan menghilangkan pertimbangan penting seperti masa pengabdian seorang calon Ketua Umum di dalam partai, loyalitas, pertimbangan moral dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu pula menjadi sebuah isu yang krusial mengenai bagaimana cara terbaik untuk merekrut seseorang untuk menjadi sebuah Ketua Umum Partai atau dengan kata lain nilai-nilai apa saja yang harus menjadi landasan dan modal yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi Pimpinan sebuah partai politik. Allan Ware berpendapat bahwa :

The most straightforward pattern of recruitment, as well as the most common one today, is for a party leader to have served relatively long apprenticeship as a legislator, working his or her way up an informal career ladder within the parliamentary party.¹⁰

Hal yang paling utama yang harus dimiliki di dalam rekrutmen politik menyangkut pimpinan partai pada saat sekarang yaitu harus telah memiliki pengalaman yang lama sebagai seorang legislator, bekerja sebagai

¹⁰ *Ibid.* hlm. 274.

legislator partainya yang berada di parlemen menjadi jalan untuk tangga karir bagi seseorang untuk bisa naik menjadi seorang pimpinan partai.

Sehingga yang menjadi prasyarat penting untuk menjadi seorang Ketua Umum atau pimpinan sebuah partai adalah haruslah memiliki pengalaman dan pengabdian yang lama sebagai wakil partai di dalam parlemen. Dengan menjadi legislator di dalam parlemen merupakan tangga bagi seseorang untuk bisa menjadi pimpinan partai politik tersebut. Dapat dipahami bahwa yang ditekankan untuk seseorang dapat menjadi pimpinan partai haruslah dilihat dari lamanya seseorang menjalankan fungsi sebagai legislator partainya di dalam parlemen.

Teori demokrasi internal mengenai syarat ideal bagi seorang pimpinan partai politik dapat menjadi landasan analisis dengan melihat pada saat Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum Golkar (1999-2004), telah memiliki pengalaman sebagai seorang legislator Golkar di Parlemen dan juga menjadi Ketua DPR periode 1999-2004. Akan tetapi pada saat Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, tidak memiliki pengalaman sebagai seorang legislator.

Posisi Ketua Umum partai politik merupakan posisi yang strategis yang dapat mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan posisi Ketua Umum Partai dapat menentukan arah preferensi politik Partai politik sekaligus menentukan arah kebijakan politik Partai terhadap Pemerintah. Kecakapan seorang pimpinan partai sangat diperlukan karena memiliki wewenang untuk mengontrol kader-kader partai yang duduk di Pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun di birokrasi Pemerintahan. Terpilihnya seorang Ketua Umum Partai yang memiliki kemampuan untuk menjalankan visi dan misi partai sangat ditentukan oleh proses demokrasi internal partai.

Menurut Arbi Sanit, seleksi kepemimpinan dalam sebuah partai politik memiliki dua strategis: ¹¹ *Pertama*, proses ini merupakan revisi sistem pengkaderan partai politik. Dengan menitikberatkan pada partai kader, pelatihan kader yang sistematis dan terarah guna membentuk pemimpin yang demokratis

¹¹ Arbi Sanit, *Pembaharuan Mendasar Partai Politik*, dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli (Ed). hlm. 13.14.

dan sekaligus efektif. Selain itu, ukuran dan indikator kemajuan kader juga seringkali dikaitkan dengan posisi kader di dalam struktur partai dan kenegaraan. *Kedua*, proses ini juga memiliki arti penting pada perubahan sistem rekrutmen pemimpin partai, dengan cara kompetisi yang lebih terbuka, kualifikasi pemimpin yang lebih berkualitas, dan partisipasi seluas mungkin warga partai dan rakyat luas. Manifestasinya dalam hal ini bisa menggunakan sistem konvensi lokal dan nasional, sistem pemilu distrik atau langsung, kualifikasi pribadi dan kepemimpinan calon pemimpin dan partisipasi masyarakat.

Menurut Gerald M. Pomper, Guru Besar Rutger University Amerika Serikat berpendapat bahwa selain berfungsi sebagai alat untuk menyaring kandidat calon ketua umum, Munas partai politik memiliki tiga fungsi yaitu¹²: *Pertama*, melahirkan aturan-aturan seleksi bagi rekrutmen dan keanggotaan partai. *Kedua*, wadah untuk memenuhi elektoral suara dan memenangkan pemilu, dan *Ketiga*, Munas partai dilakukan untuk menetapkan platform partai yang biasanya didasarkan pada aksi-aksi pemerintah yang sedang berkuasa.

1.7.2. TEORI FAKSIONALISASI ELITE

Fenomena terjadinya faksionalisasi elite di dalam organisasi internal partai Golkar pada pemilihan ketua umum partai Golkar dapat dijelaskan dengan teori faksionalisme. Menurut Paul G Lewis terjadinya faksionalisasi di dalam partai politik dapat dipahami sebagai suatu pola yang bersifat sementara dan taktis. Faksi/kelompok yang bersifat sementara dan taktis bersifat tidak tahan lama dan hanya pada isu-isu tertentu merupakan ciri-ciri partai modern.¹³ Faksionalisasi di dalam partai pada awalnya disebabkan kontrol pimpinan yang lemah yang

¹² Saya kutip di dalam tulisan Thesis oleh SufardiNurzain, "Representasi Elit olitik di Surat Kabar, Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kompetisi Akbar Tandjung dan H.M. Jusuf Kalla Dalam Perebutan Ketua Umum Pada Munas Golkar VII di *Harian Kompas, Harian Media Indonesia, dan Suara Karya*", Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 20.

¹³ Paul G Lewis, *Political Parties in Post-Communist Eastern Europe*, New York: Routledge, 2000, hlm. 116.

berkembang pesat dan terkonsolidasi yang kemudian melemahkan kesatuan dan kekompakan di dalam partai.

Menurut Belloni, penyebab terjadinya faksionalisasi tidak hanya disebabkan oleh kontrol pimpinan yang lemah namun juga disebabkan dalam tiga kategori.¹⁴ *Pertama*, faksi yang terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik. Faksi model ini tidak didasarkan pada ikatan yang bersifat formal. *Kedua*, faksi yang terbentuk melalui pola patron-klien. Faksi model ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan individu, yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu partai yang mempunyai konstituen jelas. *Ketiga*, faksi yang formal dan teroganisir. Faksi jenis ini memiliki kejelasan berupa nama resmi dan memiliki kesekretariatan yang jelas beserta program-program yang rutin dan tersendiri.

Sedangkan menurut Andrew J. Nathan bahwa apabila konflik antar elite di dalam internal partai bersangkutan dengan mengerahkan kekuatan para kader pada lapisan bawah elit politik yang bersangkutan, maka hal itu juga dapat dilihat sebagai sebuah faksi. Teori faksionalisasi elite digunakan untuk menjelaskan terjadinya faksi-faksi di dalam organisasi Golkar yang berpengaruh pada terpilihnya seorang Ketua Umum yang baru. Faksi-faksi memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing sehingga sangat bergantung pada daya tarik seorang calon Ketua Umum untuk meyakinkan faksi-faksi di dalam partai Golkar memberikan dukungannya kepada calon Ketua Umum tersebut. Sehingga faksi-faksi di dalam tubuh organisasi Golkar bersifat sementara dan hanya berdasarkan pragmatisme politik yaitu didasarkan pada pengaruh tawaran jabatan di dalam pemerintahan ataupun uang.

1.7.3. TEORI CATCH-ALL PARTY

Catch-all people party merupakan fenomena partai politik dengan mengendorkan/memperhalus ideologi partai dalam upaya memperoleh suara yang

¹⁴ *Ibid.*

lebih besar dengan menjangkau seluruh elemen masyarakat karena didasarkan oleh keyakinan bahwa ideologi partai yang bersifat spesifik menakut-nakuti sebagian besar masyarakat yang sebenarnya berpotensi menjadi pengikut, oleh sebab itu untuk memperluas perolehan suara maka diperlukan suatu kesatuan yang bertumpu pada tujuan nasional yang cukup samar dan fleksibel untuk diinterpretasikan secara bermacam-macam sehingga setiap elemen masyarakat tercakup yang sebelumnya tidak terangkul akibat eksklusifitas ideologi partai.¹⁵ Karakteristik *Catch-all party* terletak pada penekanan daya tarik personal dari kandidatnya sehingga nominasi calon-calon pejabat publik didasarkan pada kekuatan sumber daya/*resources* yang dimiliki oleh si kandidat bukan pada pengalaman atau lamanya pengabdian kandidat kepada partai.¹⁶

Larry Diamond dan Richard Gunther menyimpulkan ada 7 karakteristik dan ciri-ciri dari *catch-all party* yaitu:¹⁷

“ 1) Nomination is based largely on the personal electoral appeal of the candidate (either as perceived by a party nominating committee or on the actual support received by a candidate in a primary election), rather than on such considerations as length of service to the party or formal institutional position within the party. 2) Electoral mobilization is based not upon face-to-face efforts by party militants or allied secondary organizations, but on direct, unmediated appeals by the candidate to voters through the mass media, especially television. 3) Campaign appeals tend to focus on relatively transient issues (or on the personal abilities of the candidate and the weaknesses of his or her opponent, and are not clearly linked to established programmatic or ideological commitments. 4) In an effort to maximize the breadth of electoral appeal, the catch-all party and its candidates avoid defending the interests of specific social

¹⁵ Otto Kirchheimer, *Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat*, tulisan ini berada di dalam buku Ichlasul Amal (Editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1988 hlm. 71-79

¹⁶ Steven Wolinetz, “Party System Change: The Catch-all Thesis Revisited”, *West European Politics* 14 January 1991 hlm 113-28.

¹⁷ Larry Diamond & Richard Gunther (editor), *Political Parties and Democracy*, London and Baltimore: John Hopkins University Press, 2001. hlm.27

groups during election campaigns and eschew institutionalized links with specific social groups. 5) Given the lack of standing commitments to specific interests, the party and its candidates have considerable discretion in aggregating interests. Given the candidate-centered personalism of the party's electoral campaigns, however, it may be less overtly involved with the formulation of programmatic commitments. 6) The party has wide latitude to form or join governments, given the lack of ideological or programmatic commitments, and the low salience of such concerns makes it easier for such parties to remain within governing coalitions. 7) Low levels of citizen involvement and identification with such parties limits their potential for social integration.

- 1) nominasi kandidat sangat ditentukan oleh peluang di dalam pemilu yakni baik dari dukungan komite partai atau dukungan dari publik bukan berdasarkan lamanya pengabdian dan posisi fungsionaris di dalam partai.
- 2) mobilisasi di dalam pemilu bukan berdasarkan berhadapan secara langsung dengan pendukung militan partai atau bergabung dengan berlaiansi organisasi tertentu, namun kandidat berhadapan langsung dengan para pemilih melalui media massa terutama televisi.
- 3) kampanye yang dilakukan oleh kandidat menyangkut isu-isu yang bersifat sementara bahkan bersifat mencari-cari kelemahan dari saingannya, dan tidak memiliki komitmen program dan ideologi yang jelas.
- 4) di dalam upaya mendapatkan dukungan suara yang maksimal, maka kandidat menghindari dari mempertahankan kepentingan dari kelompok tertentu secara spesifik di dalam kampanye pemilu dan menghindari keterikatan terhadap kelompok tertentu secara spesifik.
- 5) karena tidak adanya komitmen yang jelas dari kandidat terhadap program yang ditawarkan, maka sangat bergantung pada kebijaksanaan sang kandidat di dalam menjalankan tugasnya ketika terpilih menjadi pejabat publik.
- 6) partai memiliki jangkauan yang luas untuk membentuk atau bergabung di dalam pemerintahan, dengan lemahnya komitmen ideologi dan program partai maka akan memudahkan partai tetap di dalam koalisi pemerintah.
- 7)

rendahnya keterlibatan dan identifikasi warga terhadap partai menjadikan lemahnya potensi integrasi sosial.

Menurut Philip C. Schmitter bahwa ada beberapa kesulitan dan kondisi yang mengharuskan partai politik melakukan perubahan-perubahan terutama dalam hal agregasi kepentingan yang mengarah kepada *catch-all party* yaitu:¹⁸ *pertama*, kelemahan partai di dalam mengimplementasikan ideologi mereka di dalam kebijakan pemerintahan apabila menghadapi hambatan/tekanan internasional misalnya bertentangan dengan kepentingan kelas pekerja, pensiunan dan pengambil kebijakan dan bahkan seringkali para aktor organisasi non-pemerintah yang berperan di dalam *civil society* menyarankan publik untuk tidak berhubungan dengan partai politik. *Kedua*, keterbatasan media yang dimiliki oleh partai politik mengharuskan mereka memakai media swasta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada calon pemilih potensial dan seringkali menjadi bias karena media swasta bersifat umum sehingga pesan-pesan partai yang disampaikan harus pula menjangkau semua elemen masyarakat/umum. *Ketiga*, kecenderungan perkembangan neodemokrasi yang ditandai dengan survei/polling untuk mengetahui ekspektasi massa terhadap partai, kandidat, dan opini publik. Hal ini mendorong partai politik untuk merangkum semua ekpektasi dan ketertarikan publik terhadap suatu hal dan partai menjadi semakin umum dan bias guna merangkul semua elemen masyarakat.

Bahkan di dalam pengalaman di Eropa, lahirnya partai-partai yang bersifat *catch-all party* mendorong lahirnya partai oposisi yang memiliki ideologi ekstrim ke kiri sebagai bentuk protes yang menganggap ideologi partai yang sudah bersifat *catch all* tidak mampu mengakomodir kepentingan kelompok yang memiliki preferensi kebijakan kiri/*left*.¹⁹ Hal ini didasarkan kepada sifat partai yang mendefinisikan partai layaknya seorang perusahaan bisnis dimana

¹⁸ Philip C. Schmitter, *Parties Are Not What They Once Were*, tulisan ini berada di dalam buku Larry Diamond & Richard Gunther (editor), *Political Parties and Democracy*, (London and Baltimore: John Hopkins University Press, 2001) hlm 82-83

¹⁹ Nick Sitter, "Opposing Europe: Euro-Sceptcims, Opposition and Party Competition," School of Management BI SEI Working Paper No 56, Opposing Europe Research Network Working Paper No. 9, oktober 2002, Sussex European Institute, University of Sussex, hlm. 23-24

keuntungan pendapatan, prestise, kekuasaan dapat diperoleh dengan cara memasukkan sebanyak mungkin kader-kadernya ke dalam posisi tertinggi birokrasi yang hanya bisa diperoleh dengan cara memaksimalkan suara pemilih.²⁰ Sehingga permasalahan ideologi yang spesifik untuk menjadi landasan bagi pilihan publik pada saat pemilu merupakan hal yang tidak esensial demi mendapatkan suara pemilih yang mayoritas. Hal ini memiliki kesesuaian dengan Partai Golkar yang tidak memiliki ideologi/preferensi kebijakan politik sebagai program yang ditawarkan pada saat Pemilu. Partai Golkar juga sangat menekankan daya tarik personal dan kemampuan *resources* yang dimiliki oleh kandidatnya daripada program dan preferensi kebijakan yang dikampanyekan pada saat Pemilu. Partai Golkar juga hanya aktif di dalam fungsinya sebagai Partai politik hanya pada saat menjelang Pemilu dalam upaya kemenangan Pemilu bagi Golkar.

1.7.4 TEORI OLIGARKI

Teori Oligarki secara komprehensif dijelaskan di dalam tulisan Jeffrey Winters²¹, ia menjelaskan makna kata Oligarki berasal dari kata *Oligarch* yang berarti pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentersasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Lebih jauh menurut Winters :

Kenyataannya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi ... Penekanan terhadap dampak politik kesenjangan material --- terhadap “ketidaksetaraan kondisi” --- membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lain ... Seorang kandidat politik yang punya uang segunung untuk berkampanye sangat sukar dikalahkan. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh daripada yang dananya seret.²²

²⁰ Ivo Bischoff, “Party Competition in Heterogeneous Electorate: The Role of Dominant-Issue Voters”, *Public Choice*, Vol. 122, no.1/2, Januari 2005, www.jstor.org/stable/30026680, saya akses pada 20/04/2011. pukul 18.27 WIB.

²¹ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 7-8.

Perilaku oligark (sebutan orang-orang kaya) yang menggunakan kekayaannya untuk memenangkan setiap kepentingan politis sangat berkaitan dengan kepentingan oligark demi mempertahankan kekayaannya. Sehingga di dalam pemerintahan negara sesungguhnya yang terjadi adalah mengenai pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh segelintir kecil orang-orang kaya. Aristoteles pernah menulis bahwa :

Oligarki adalah ketika orang-orang yang memiliki harta memegang pemerintahan; demokrasi adalah kebalikannya, ketika orang miskin bukan orang kaya menjadi penguasa ... karena perbedaan sejati antara demokrasi dan oligarki adalah kemiskinan dan kekayaan ... bila mana manusia berkuasa berdasarkan kekayaan, (baik mereka sedikit atau banyak) maka itu oligarki, dan bilamana kaum miskin berkuasa, itulah demokrasi ... yang miskin dan yang kaya saling berkelahi, dan pihak mana pun yang unggul, bukannya mendirikan pemerintahan yang adil dan mengutamakan rakyat, malah menganggap supremasi politik sebagai hadiah kemenangan, dan satu pihak mendirikan demokrasi sementara pihak lain mendirikan oligarki.²³

J.J. Rousseau pun membahas mengenai orang-orang kaya yang dapat membahayakan demokrasi apabila orang-orang kaya tidak memiliki itikad yang baik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. menurut Rousseau yaitu:

Orang-orang kaya tidak memiliki alasan yang kuat untuk membenarkan diri mereka. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan kepentingan dari satu orang (banyak orang). Orang-orang kaya harus menghadapi semua musuhnya sendirian sementara di antara mereka sendiri terjadi rasa saling iri dan bersaing sehingga sesama orang kaya sulit untuk disatukan melawan musuh-musuh mereka yang ingin mendapatkan kekayaan mereka. Menghadapi tekanan seperti ini, orang-orang kaya kemudian membentuk sebuah proyek yang direncanakan dengan paling teliti dan seksama sepanjang umat manusia, yaitu memanfaatkan kekuatan dari orang-orang yang menyerang mereka, mengubah mereka menjadi pembela kepentingan mereka, menanamkan ajaran-ajaran dalam diri musuh-musuh mereka dan memberikan kepada musuh-musuh mereka ini institusi-institusi yang dapat menguntungkan diri mereka, karena secara alami mereka tidak memiliki hak sama sekali.²⁴

²³ *Ibid*, hlm.40-41.

²⁴ James A. Carporaso & David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 435-436.

Teori oligarki dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kekuatan finansial yang menjadi salah satu kekuatan untuk dapat memenangkan pertarungan di dalam sebuah kompetisi politik dalam hal ini terkait pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, kekuatan uang menjadi pengaruh terkuat bagi terpilihnya seorang calon kandidat Ketua Umum terutama pasca Akbar Tandjung menjadi Ketum Golkar (1999-2004). Tidak mengherankan pertarungan perebutan posisi tertinggi di dalam partai Golkar tidak pada tataran visi dan misi yang diukur dari lamanya pengabdian dan pengalaman di dalam pengurusan DPP ataupun menjadi wakil partai di dalam Parlemen namun ditentukan oleh besaran finansial yang digunakan untuk mendapatkan dukungan para kader Golkar.

1.7.5. Analisis Teori

Berdasarkan ke-tiga teori tersebut maka di dalam studi proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru dapat dipahami bahwa Partai Golkar memiliki ciri-ciri karakteristik *catch-all party* yaitu pengabdian dan proses jenjang karir serta prestasi yang ditorehkan di dalam tubuh partai tidak menjadi landasan utama di dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Meskipun pada saat Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Partai Golkar pertama pasca Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kematangan Organisasi Akbar Tandjung, akan tetapi pasca Akbar, pemilihan Ketua Umum Golkar sangat ditentukan oleh *resources* yang dimiliki oleh calon pimpinan partai. Kekayaan yang dimiliki oleh kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar sangat berpengaruh terhadap keberpihakan kader untuk mendukungnya. Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori oligarki dimana kekayaan digunakan untuk memuluskan kepentingan politis dari oligark. Hal ini yang dipahami sebagai pragmatisme politik yaitu posisi pimpinan partai bisa dan dibeli asalkan memenuhi 'harga' yang ditentukan oleh para kader Partai politik.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai instrument akademik untuk mengungkap masalah penelitian. Beberapa criteria penelitian ini tergolong jenis penelitian kaulitatif. Pertama, studi ini mengkonstruksi sebuah realitas di dalam konteks kehidupan demokrasi internal partai Golkar pada pemilihan Ketua Umum pasca Orde Baru. Selain itu sebagaimana menjadi ciri penelitian kualitatif, konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini tidak disusun dalam bentuk variabel-variabel yang jelas sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau narasi dari dokumen, observasi ataupun transkrip, bukan berbentuk angka-angka hasil pengukuran. Peran teori dalam penelitian ini sebagai sudut pandang untuk memandu alur penelitian, karena penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan logika induktif. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir temuan-temuan sehingga menghasilkan gambaran sebab-sebab terpilihnya kandidat seorang calok Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan nilai-nilai dan kekuatan politik yang dimilikinya.

Jika dilihat dari tujuan penelitian, penelitian ini bersifat eksplanatori (*Explanatory Research*), dengan sejumlah alasan. Pertama, dilihat dari sisi latar belakang masalah penelitian, penelitian yang bersifat ekplanatori didasari hasrat untuk mengetahui “bagaimana” atau menjelaskan mengenai gambaran demokrasi internal di dalam partai Golkar dengan melihat sebab-sebab seorang kandidat Ketua Umum terpilih. Studi ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui lebih jauh “bagaimana demokrasi internal partai Golkar di dalam pemilihan Ketua Umum pada Munas Golkar tahun 1999, 2004 dan 2009?”. Dilihat dari jenis studi kasusnya, studi ini merupakan bersifat analisis studi kasus karena studi ini menjadikan proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 1999, 2004 dan 2009 sebagai sarana untuk memahami demokratisasi yang terjadi di dalam internal partai Golkar. Unit analisis studi ini adalah kekuatan dan modal

(resources) yang dimiliki oleh Ketua Umum terpilih yang mendorong para kader Golkar untuk memilihnya menjadi Ketua Umum Golkar yang baru.

1.8.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama, kajian literatur. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (literature review) atau analisis dokumen, yakni mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui sejumlah literature kepustakaan seperti artikel majalah, Koran, jurnal atau jenis-jenis tulisan lainnya yang dinilai memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai penunjang untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (depth interview).

Kedua, wawancara mendalam. Parameter pemilihan narasumber yaitu : memahami permasalahan; menguasai permasalahan; pernah terlibat atau menjadi salah satu tim sukses dari Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih. Narasumber yang diwawancarai terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu; (1) Kelompok yang menjadi tim sukses/faksi Akbar Tandjung (Ketum Golkar 1999-2004), (2) Kelompok yang menjadi tim sukses/faksi Jusuf Kalla (Ketum Golkar 2004-2009), (3) Kelompok yang menjadi tim sukses/faksi Aburizal Bakrie (Ketum Golkar 2009-2014). Total narasumber menjadi sebanyak 4 orang, yaitu :

1. Dr. Akbar Tandjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar 1999-2004
2. Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si. (Faksi Akbar Tandjung)
3. Firman Soebagyo, (Faksi Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie)
4. Andi Matalatta, (Faksi Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie)

Wawancara dilakukan dalam upaya untuk mendalami dan menggali informasi yang mendalam menyangkut proses Munas pasca Orde Baru dan guna mendapatkan informasi dan hal-hal yang menyangkut proses Munas yang tidak pernah ditulis di media sebelumnya.

1.8.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa cara, antara lain : (1) mengelompokkan data primer dari kajian-kajian ilmiah tentang Golkar dan dokumen-dokumen resmi Partai Golkar atas dasar empat dimensi institusionalisasi dalam bentuk matriks; (2) membuat kategorisasi data primer dari kajian-kajian ilmiah dan dokumen-dokumen resmi partai atas dasar faktor eksternal dan internal. Selanjutnya masing-masing kategorisasi dikelompokkan lagi berdasarkan beberapa aspek (faktor) yang mempengaruhi seorang calon Ketua Umum tersebut terpilih. (3) Hasil wawancara mendalam berupa informasi dan data mengenai pandangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang kandidat terpilih dan pragmatism politik di dalam internal Golkar pada saat pemilihan Ketua Umum Golkar pasca Orde baru yang digunakan untuk memperkuat analisis. Tujuan analisis seperti ini untuk membuat deskripsi lebih komprehensif dan terperinci, sekaligus memberikan interpretasi teoritik sebagaimana lazimnya dalam setiap penelitian ilmu sosial.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu melalui penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan informasi dan data dari sumber literatur. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh partai Golkar yang terlibat di dalam MUNAS GOLKAR untuk mendapatkan gambaran mengenai proses demokrasi internal pada saat MUNAS berlangsung.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dengan judul : Demokrasi Internal Partai : Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar Tahun (1999, 2004, dan 2009) , terdiri dari lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Bab Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan penelitian, kaitan penelitian dengan bidang studi, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Sejarah Politik Organisasi Golongan Karya (Golkar), bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab yaitu berisikan sejarah awal pra kelahiran Sekber Golkar, Perubahan Sekber Golkar menjadi Golkar pada Orde Baru. Munas Golkar pada Masa Orde Baru, dan perubahan Golkar menjadi Partai Golkar di era reformasi dengan ideologi paradigma baru.

Bab III. Perebutan Kekuasaan Ketua Umum Partai Golkar Pasca Orde Baru. Bab ini membahas mengenai proses persaingan antar kader Golkar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru pasca Orde Baru. Didalam bab ke-tiga ini membahas proses Munaslub 1998, Munas ke-tujuh tahun 2004 dan Munas kedelapan tahun 2009 . Di dalam bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab yaitu kemenangan Akbar Tandjung pada Munaslub Golkar 1998, kemenangan Jusuf Kalla pada Munas Golkar 2004 dan kemenangan Aburizal Bakrie pada Munas Golkar 2009.

Bab IV. Demokrasi Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Ketua Umum di Munas 1998, 2004 dan 2009. Bab ini menganalisis data dan temuan sebab-sebab kandidat Ketua umum dapat terpilih. Terdiri atas 3 Bab yaitu Pergeseran Ideologi Paradigma Baru menjadi Pragmatisme Politik, Perubahan menjadi Pragmatisme Politik, Perubahan *Merit-System* menjadi *Oligark-System* Dalam Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Tantangan Golkar pada Era Pragmatisme Politik di Tubuh Golkar.

Bab V. Penutup berisi dari ringkasan Bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil penulisan tesis ini menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta dengan teori politik yang telah ada. Kecenderungan sebuah partai politik semakin besar maka semakin pragmatis dan ideologi tidak lagi menjadi suatu yang dipandang signifikan di dalam menentukan kebijakan partai.

BAB II

SEJARAH POLITIK ORGANISASI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Pada bagian bab dua ini membahas mengenai tahap-tahap perjalanan dan sejarah politik Golkar, dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar, menjadi organisasi Golkar, hingga bertransformasi menjadi Partai Golkar. Pada bagian ini menjelaskan proses perkembangan Golkar pada masa sebelum pemilu 1971 dan pasca Pemilu 1971 yang menjadikan Golkar sebagai mesin politik Pemerintahan Orde Baru. Pembahasan di dalam bab ini menjadi data penting untuk melihat perkembangan Golkar dari awal pembentukan hingga era Reformasi yang mengharuskan Partai Golkar melakukan perubahan di dalam struktur organisasi menjawab tantangan arus tekanan Reformasi.

2.1. PRA KELAHIRAN SEKBER GOLKAR PADA DEMOKRASI TERPIMPIN

Golkar telah ikut terlibat di dalam kehidupan politik bangsa Indonesia pada saat Indonesia baru mendapatkan kemerdekaan. Hal ini menjadikan Golkar memiliki kematangan di dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Tidak hanya pengaruhnya yang besar dalam perkembangan kehidupan sistem politik, namun juga sesungguhnya tidak terlepas dari posisi Golkar yang selalu diuntungkan oleh situasi politik yang turut berperan baik pada awal kelahiran, hingga berkembang menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.

Perkembangan Golkar yang pada awalnya hanya menjadi sebagai basis massa bagi kelompok ABRI untuk menyatukan organisasi massa pada masa Orde Lama yang menjadi bagian dari salah satu pendukung Partai seperti PNI dan PKI.²⁵ Kedekatan dengan kelompok ABRI kemudian memberikan keuntungan bagi perkembangan awal tumbuh berkembangnya Golkar menjadi organisasi yang

²⁵ Sofjan Lubis dkk, *30 Tahun GOLKAR*, DPP GOLKAR, 1994, hlm. 95.

kuat. Hal ini mengingat bahwa belum ada pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan sipil dalam kehidupan politik pada masa Orde Lama.²⁶

Sebagai organisasi kekeayaan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi massa yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam seperti profesi, pendidikan, Islam, dan lain sebagainya namun berada di bawah komando organisasi massa ABRI. Situasi politik pasca pemberontakan G-30 S/PKI 1965 memberikan keuntungan bagi Golkar terutama menjadi basis organisasi massa yang membantu membersihkan simpatisan PKI yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa pada saat itu akibat terbunuhnya Jenderal-jenderal yang didalangi oleh PKI. Pada saat itu banyak pimpinan organisasi massa seperti HMI, KAMMI, KAPPI, PMKRI yang kemudian bergabung dalam Sekber Golkar turut membantu menekan kelompok PKI.²⁷ Golkar juga dianggap oleh penguasa Orde Baru sebagai organisasi non-ideologis sehingga akan menjadi kekuatan sosial bagi legitimasi Pemerintahan Orde Baru namun tanpa menjadi kekuatan sosial yang berseberangan dengan kekuasaan Orde Baru.²⁸

Selama kurang lebih 30 tahun Golkar merasakan keuntungan yang luar biasa di dalam memperkuat basis dukungan organisasi hingga ke pelosok desa berkat andil dari Pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan menjadikan Golkar sebagai mesin politik Pemerintahan. Hal ini pula menjadikan Golkar mampu menciptakan kader-kadernya yang terlatih dan matang dalam kehidupan Pemerintahan.²⁹ Akan tetapi pasca-lengsernya Soeharto, Golkar juga mendapat pukulan keras terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan Golkar dibubarkan.

Kematangan dan kepiawaian kader-kader Golkar dalam berpolitik teruji dan terbukti dengan tetap berhasil mempertahankan Partai Golkar melalui langkah segera mencitrakan diri Partai yang mendukung reformasi dan bersih dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 103.

²⁷ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer, Studi Tentang Budaya Politik*, LP3ES, Jakarta, 1992. hlm. 25

²⁸ Sofjan Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm.104.

²⁹ M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, hlm .34.

intervensi Soeharto dan militer. Golkar berhasil kembali menjadi kekuatan politik yang berpengaruh dengan keberhasilannya menjadi pemenang pemilu legislatif 2004. Partai Golkar sesuai simbolnya pohon beringin, yang memiliki akar yang kuat dan badan yang kokoh, dengan melalui 3 zaman masih tetap menjadi kekuatan politik yang berpengaruh besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Lahirnya Golkar tidak terlepas dari kondisi perpolitikan nasional pada masa sistem parlementer Orde Lama yang penuh gejolak akibat situasi politik yang belum stabil. Pasca Pemilu 1950 yang melahirkan tidak satupun partai mayoritas di Parlemen, menyebabkan Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dapat dengan mudah dijatuhkan oleh mosi tidak percaya oleh partai-partai oposisi di Parlemen. Hal ini kemudian mendorong Soekarno untuk “menguburkan partai-partai” melalui pidatonya pada bulan Februari 1957. Partai Politik dinilai gagal memainkan peranannya dan Soekarno menawarkan pembentukan golongan fungsional sebagai alternatif partai politik. Kelompok ABRI (Angkatan Darat) pun merasakan kekecewaan terhadap sistem politik liberal yang berlaku pada waktu itu dan mendorong untuk mencari sistem politik yang dapat menampung ruang gerak ABRI agar dapat memainkan peranan dimana demokrasi liberal tidak memberikan ruang gerak bagi militer untuk terlibat dalam politik.³⁰

Dalam pandangan Soekarno, kondisi Parlemen yang penuh dengan perseteruan politik antara partai yang memegang Pemerintahan dan partai oposisi tidak dapat diteruskan dan dibiarkan berlarut-larut. Hal ini dianggap melanggar cita-cita kemerdekaan dan para pahlawan yang gugur membela tanah air pada saat penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu dalam pandangan Soekarno, yang terpenting adalah mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat

³⁰ Ibrahim Ambong, “Hubungan ABRI-GOLKAR” di dalam *Jurnal Ilmo Politik*, vol.6, Jakarta, PT. Gramedia, 1990 hlm.36.

bukan politik yang hanya menimbulkan kekacauan politik dan mengkhianati cita-cita revolusi bangsa Indonesia.³¹

Dengan diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden R1 tahun 1959, kondisi negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Peran dan fungsi partai politik di dalam pemerintahan digantikan oleh Golongan Fungsional. Golongan fungsional terdiri dari unsur-unsur pekerja, petani, ABRI, generasi 1945, guru agama, kelompok kepentingan dan jasa. Perkembangan selanjutnya Golongan Fungsional diubah menjadi nama Front Nasional dengan tetap memasukkan partai-partai yang dianggap tidak melawan cita-cita revolusi Soekarno.³² Melihat tetap masuknya PKI di dalam barisan Front Nasional, menjadi pertimbangan bagi militer untuk memperoleh dukungan organisasi massa yang tidak berafiliasi dengan partai yang telah lolos verifikasi masuk dalam barisan Front Nasional.³³

2.1.1. Proses Terbentuknya Sekber Golkar pada Era Demokrasi Terpimpin

Pemrakarsa pembentukan organisasi Golkar diinisiasi oleh Brigjen T.N.I. Djuhartono, Drs. Imam Pratigny, dan J.K. Tumakaka dengan melakukan pertemuan dan membahas pentingnya militer untuk mengikat organisasi non-afiliasi yang tidak terdaftar di dalam Front Nasional sebagai basis kekuatan massa membendung massa PKI. Pada tanggal 15 Oktober 1964, Ke-tiga orang tersebut kemudian mengundang Dominggus Nanlehy, Pandu Kartawiguna, Kol. Dr. Amino Gondohutomo, Sutomo Honggowongso SH, Z. Efendi SH., dan Anwar Rasjid yang dikenal dengan Panitia 9 (Sembilan). Pada tanggal 19 Oktober 1964, Kelompok Panitia 9 (Sembilan) tersebut menandatangani “Piagam Pernyataan

³¹ H. Feith, L. Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1966*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1970, hlm.81.

³² Awad Bahasoan, “Golongan Karya Mencari Format Politik Baru” dalam Pilihan Artikel Prisma, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, CSIS, 1985.

³³ Leo Suryadinata, *Op. Cit.*, hlm.15

Dasar Karyawan” yang dihadiri kurang lebih 35 Organisasi golongan karya non afiliasi.³⁴

Sekretariat Bersama Golkar (SEKBER GOLKAR) baru pertama kali terbentuk pada 20 Oktober 1964 yang dihadiri oleh 97 organisasi yang berasal dari organisasi Buruh/Pegawai Negeri (53 Organisasi), ABRI (AD, AL, AU, Kepolisian), Pemuda/Mahasiswa (10 organisasi), Sarjana/Tjendekiawan (10 Organisasi), Wanita (5 Organisasi), Veteran, Wartawan (4 Organisasi), Tani dan Nelayan (2 Organisasi), dan Organisasi lainnya 9 buah.³⁵ Pembentukan Sekber Golkar sekaligus memilih Ketua Sekber Golkar yang merupakan gabungan dari 97 organisasi sipil dan organisasi ABRI.

Pada saat pertemuan pembentukan Sekber Golkar juga ditentukan Ketua Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar dengan menunjukkan Brigjen Djuhartono sebagai Ketua Sekber Golkar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Brigjen Djuhartono adalah pemrakarsa agar dibentuk sekretariat bersama dari organisasi yang belum memiliki afiliasi dan tergabung dalam Front Nasional. Pemilihan Brigjen Djuhartono sebagai Ketua Sekber Golkar pada saat itu dapat dipahami disebabkan jabatannya sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Front Nasional dan Ketua “Karev” (Karyawan Revolusioner) yang sekaligus bertindak sebagai pemrakarsa utama terbentuknya Sekber Golkar.³⁶

Terbentuknya Sekber Golkar memberikan kekuatan baru bagi kelompok ABRI yang melihat formula ideologi Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) yang diterapkan oleh Soekarno memberikan vitamin bagi kelompok PKI untuk memperbesar kekuatan dan jaringannya di dalam masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. PKI dengan leluasa menanamkan ideologi komunismenya di dalam masyarakat pedesaan dan menggalang massa yang semakin besar. Dengan adanya Sekber Golkar yang secara tidak langsung merupakan organisasi massa bentukan ABRI, maka kekuatan partai terutama PKI

³⁴ Imam Pratignyo, *Ungkapan Sejarah: Lahirnya Golongan Karya, Perjanjian Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*, Yayasan Bakti T.P., Jakarta, 1983. hlm. 96-101.

³⁵ *Ibid*, hlm. 96

³⁶ *Ibid*, hlm. 98.

tidak lagi dominan di dalam Front Nasional.³⁷ Sekber Golkar juga menjadi sangat penting disebabkan apabila ABRI pada saat itu membentuk organisasi massa baru dapat dihancurkan dengan mudah oleh terutama PKI karena dianggap membentuk Front Nasional tandingan.

Sesungguhnya organisasi massa yang murni bentukan militer pada saat itu hanyalah Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Gotong-royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai tandingan Serikat Organisasi Buruh Sosialis Indonesia (SOBSI) dibawah PKI.³⁸ Ke-tiga organisasi massa dibawah kelompok fungsional militer ini dikenal sebagai kelompok fungsional Trikarya yang menjadi fondasi organisasi Golkar. Masing-masing organisasi Trikarya memiliki perbedaan peranan di dalam memperkuat kelompok fungsional militer namun memiliki tujuan yang sama yaitu menekan dan mencegah bagi penguatan kekuatan massa di pihak PKI.³⁹

Peran ABRI di dalam terbentuknya dan penguatan struktur organisasi Sekber Golkar sangatlah sentral hal ini terlihat dari kemacetan-kemacetan dalam pembentukan Sekber Golkar di beberapa daerah dapat diatasi melalui instruksi Jenderal A. Yani selaku pucuk pimpinan Angkatan Darat dan kepala Staf KOTI kepada pimpinan Angkatan Darat di daerah-daerah.⁴⁰ Namun Sekber Golkar adalah gabungan dari beberapa organisasi non afiliasi yang belum terdaftar didalam Front Nasional yang berada dibawah komando oleh organisasi massa bentukan militer yaitu Soksi, Kosgoro dan MKGR.⁴¹ ABRI juga melahirkan badan-badan kerjasama yang melibatkan kelompok masyarakat dengan militer, seperti Badan Kerjasama Buruh Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Wanita Militer, dan Badan Kerjasama Ulama Militer.⁴² Badan-badan kerjasama yang melibatkan kelompok

³⁷ Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi-CSIS, 1981. hlm. 198.

³⁸ Awad Bahasoan, *Op. Cit.*, hlm. 276.

³⁹ *Ibid*, hlm. 277.

⁴⁰ Nugroho Notosusanto, ed., *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984. hlm. 112.

⁴¹ Leo Suryadinata, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴² David Reeve, *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party Systems*, Singapore Oxford, 1985. Hlm. 119—120.

sipil bentukan militer merupakan sebagai langkah lanjutan untuk memperluas basis massa dan membendung ideologi komunisme di dalam masyarakat.⁴³

Tabel 2.1
Organisasi Massa Bentukan Kelompok Fungsional Militer (ABRI)
Sebagai Tandingan Organisasi Massa PKI

No.	Nama Organisasi	Tanggal Terbentuk	Pimpinan Organisasi	Peranan Organisasi
1.	SOKSI	20 Mei 1960	Kolonel Suhardiman	Melindungi karyawan perusahaan negara hasil nasionalisasi perusahaan asing dengan menyediakan kebutuhan konsumsi karyawan
2.	Kosgoro	10 November 1957	Jenderal Mas Isman	Memperkuat solidaritas dan kesejahteraan anggota organisasi melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan
3.	MKGR	3 Januari 1960	Kolonel Sugandhi	Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan di dalam masyarakat.

Data diperoleh dari berbagai sumber.

Ada beberapa catatan penting melihat sejarah lahirnya organisasi Golkar dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu kondisi sosial dan politik serta kepentingan yang lebih luas dari ABRI akan sebuah organisasi yang dapat memobilisasi massa.⁴⁴ *Pertama*, lahirnya organisasi Golkar tidak terlepas dari kondisi perpolitikan nasional dimana pada saat pasca Pemilu 1955 yang menghasilkan

⁴³ Leo Suryadinata, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁴⁴ Ali Murtopo, *Ibid*, 198.

tidak ada satupun partai mayoritas di Parlemen menyebabkan kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat partai oposisi selalu mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet yang memerintah, sebagai akibatnya Kabinet tidak bisa fokus pada menjalankan roda pemerintahan dan terkuras energinya untuk menjawab setiap mosi tidak percaya yang diajukan oleh partai Oposisi disamping iklim politik di daerah yang terjadi pemberontakan seperti yang dilakukan DI/TII dan PRRI/PERMESTA.⁴⁵

Kedua, kekacauan politik pada masa demokrasi liberal menyebabkan lahirnya dorongan dan keinginan dari ABRI untuk bisa terlibat di dalam politik untuk “mendamaikan” keributan yang dilakukan oleh partai politik dan politisi.⁴⁶ Disamping itu pula adanya keinginan dari Soekarno untuk “mengubur” partai politik yang dianggap hanya mementingkan kepentingan partai/golongan tidak efektif untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, sehingga sesungguhnya akan lebih efektif dan mewakili kepentingan rakyat apabila diwakili oleh setiap golongan fungsional yang ada di dalam masyarakat di dalam pandangan Soekarno. Lahirnya golongan fungsional yang melibatkan kelompok militer memberikan ruang bagi militer untuk terlibat di dalam kehidupan politik nasional sehingga memperkuat peranan-peranan militer dalam roda pemerintahan. Hal ini sependapat pengamat sejarah kelahiran Golkar, Leo Suryadinata yang berpendapat bahwa:

“Tentara mengembangkan sebuah organisasi tak dikenal (Sekber Golkar) menjadi sebuah kuasi partai politik yang dikenal sebagai Golongan Karya atau Golkar. Walaupun demikian militer tidak menganggap Golkar sebagai partai politik kecuali sebagai suatu kelompok kekaryaan. Ini sebagian merupakan rekasi kepada partai-partai politik di masa lalu yang dimata para pemegang kekuasaan baru itu dilihat sebagai sumber kekacauan politik dan kebangkrutan ekonomi negara. Penguasa baru menganggap ini terjadi karena perhatian yang berlebih-lebihan pada ideologi politik oleh pihak partai-partai politik”.⁴⁷

⁴⁵ Imam Pratigny, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁴⁶ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University press, 1978. hlm. 119.

⁴⁷ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer, Studi Tentang Budaya Politik*, LP3ES, Jakarta, 1992. hlm. 8.

Ketiga, ketidaksenangan kelompok militer terhadap PKI disebabkan ideologi komunisme yang mengancam ideologi Pancasila menyebabkan kelompok militer berusaha menekan setiap pergerakan dan upaya PKI memperbesar dukungan massa terhadap organisasinya.⁴⁸ Friksi antara kelompok militer dan PKI yang tak dapat dihindari, serta kekuatan militer yang semakin bertambah dalam mengorganisasikan anggotanya mendorong Soekarno melakukan reformulasi ideologi negara menjadi NASAKOM. Diterapkannya NASAKOM menjadi angin segar bagi kelompok PKI untuk memperbesar jaringan massa hingga ke pedesaan melalui penanaman ideologi komunis sebagai salah satu ideologi negara. Hal ini pula yang menyebabkan kelompok militer memerlukan organisasi yang dapat merangkul massa yang besar untuk keperluan mobilisasi guna menekan setiap perluasan kekuatan PKI. Organisasi massa yang dibentuk oleh kelompok militer yaitu SOKSI, Kosgoro, dan MKGR menjadi cikal bakal terbentuknya Sekertariat Bersama Golongan karya (Sekber Golkar) yang menjadi fondasi organisasi Golkar pada masa Orde Baru sebagai mesin politik pemerintahan Rezim Soeharto.⁴⁹

Keempat, kegagalan kudeta Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan PKI meskipun tidak mendasari lahirnya Golkar, namun tragedi G/30-S/PKI memberikan dampak yang luar biasa bagi peranan militer yang semakin dominan di dalam perpolitikan nasional. Semakin besarnya peranan militer berdampak lurus bagi semakin besarnya organisasi Golkar sebagai organisasi massa yang berada dibawah struktur pimpinan ABRI.⁵⁰

Proses pemilihan Ketua Umum organisasi Golkar pada masa Orde Lama tidak didasarkan pada mekanisme organisasi yang memberikan kesempatan bagi para anggota organisasi Sekber Golkar untuk bisa menjadi Ketua/pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan pembentukan Ketua Sekber Golkar pertama kali didasarkan kepada urgensi untuk mengikat organisasi-organisasi non-afiliasi yang memiliki massa dan jaringan yang besar namun tidak terkoordinir untuk bisa

⁴⁸ Ibrahim Ambong, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴⁹ Leo Suryadinata, *Op. Cit.* hlm. 15.

⁵⁰ Awad Bahasoan, *Op. Cit.*, hlm. 276.

menjadi kekuatan politik mengimbangi kekuatan politik yang telah besar seperti PKI dan PNI.⁵¹ ABRI sebagai salah satu anggota Front Nasional tidak akan memiliki pengaruh dan posisi tawar yang kuat di dalam keanggotaan Front Nasional apabila tidak memiliki basis massa yang besar seperti partai politik lainnya. Di sisi lain banyak organisasi non-afiliasi yang berasal dari organisasi profesi atau pemuda tidak memiliki simpati ataupun ikatan dengan Partai politik yang telah lolos verifikasi di dalam Front Nasional. Sehingga pembentukan Sekber Golkar yang dilakukan oleh para tokoh ABRI merupakan langkah untuk mengikat organisasi-organisasi sosial di yang berada di luar lingkup Front Nasional namun memiliki visi kekaryaan dan tidak memiliki kesesuaian dengan ideologi partai politik yang tergabung didalam Front Nasional.⁵²

2.2. PERUBAHAN SEKBER GOLKAR MENJADI GOLKAR DI ERA ORDE BARU

Akibat terbunuhnya Jenderal-jenderal Angkatan Darat pada peristiwa G/30-S/PKI menyebabkan popularitas Soekarno merosot tajam dan kepercayaan rakyat terhadap figur Soekarno sebagai bapak bangsa menurun.⁵³ Hal ini disebabkan tidak dapat dipungkiri kedekatan Soekarno terhadap PKI menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. PKI merupakan basis massa bagi Soekarno untuk menjaga ABRI tidak menjadi kekuatan dominan dalam perpolitikan nasional. Mutlak setelah turunnya popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Soekarno, dan PKI sebagai satu-satunya Partai di Indonesia pada masa Orde Lama yang memiliki basis massa terbesar menjadi “musuh bangsa” menjadikan ABRI sebagai satu-satunya kekuatan politik yang dominan.⁵⁴ Pada 11 Maret 1966, melalui mandat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadikan Soeharto secara sah sebagai Presiden ke-dua Republik Indonesia.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 277.

⁵² Imam Pratigny, *Op. Cit.*, hlm. 99.

⁵³ Harold Crouch, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 127.

Setelah mendapatkan mandat dan menjadi Presiden RI ke-dua, Soeharto tidak secara gegabah dan sengaja tidak mempercepat diadakannya Pemilu. Hal ini disebabkan kekhawatiran Soeharto apabila secara gegabah diadakan pemilu, meskipun Soekarno telah ‘diamputasi’ kekuasaannya namun dikhawatirkan akan timbul usaha-usaha dari rakyat yang masih bersimpati terhadap Soekarno untuk mengembalikan posisi Soekarno menjadi Presiden RI kembali.⁵⁵ Kekuatan pro-Soekarno masih besar terutama jenderal-jenderal yang menjadi pimpinan di dalam Sekber Golkar. Leo Suryadinata membenarkan bahwa Soeharto harus membersihkan jenderal-jenderal di dalam Sekber Golkar sebelum menjadi kekuatan legitimasi Pemerintahan Orde Baru, Leo berpendapat bahwa :

“Pada periode setelah kudeta, Sekber Golkar tidak dikendalikan oleh pejabat-pejabat tentara pro-Soeharto. Pejabat-pejabat militer yang dekat dengan Sukarno (seperti Brigjen Djuhartono, Politisi NU, Drs Imam Pratigny, dan tokoh eks-PNI J.K. Tumakaka) masih menduduki Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Golkar. Ini juga yang menunjukkan Anggaran Dasar yang dihasilkan selama Muker pertama di Cibogo masih menggunakan istilah-istilah Sukarno sebagai contoh misalnja Sekber Golkar berdasarkan “Pantjasila” dan “Manifesto Politik (Manipol)” dan tujuan Sekber Golkar adalah untuk mencapai “Masyarakat Sosialis Indonesia”. Baru setelah 11 Maret 1966 elemen-elemen pro-Sukarno secara berangsur-angsur disingkirkan. Baik Tumakaka maupun Djuhartono akhirnya ditahan setelah tanggal itu”.⁵⁶

Oleh sebab itu Rezim Orde Baru mengambil langkah menunda diadakannya Pemilu pada Januari 1968 dengan alasan disebabkan permasalahan teknis menjadi tidak mungkin untuk mengadakan pemilu pada tanggal yang telah ditetapkan oleh MPRS yaitu pada tanggal sebelum atau sesudah 5 Juli 1968.⁵⁷ Penundaan ini dimanfaatkan Rezim Orba untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui program REPELITA I (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengambil dukungan dari masyarakat.⁵⁸

Soeharto sendiri tidak menginginkan memimpin Indonesia dengan menggunakan corak rezim militeristik secara langsung, melainkan menginginkan

⁵⁵ Julian M. Boileau, *Golkar Functional Group in Indonesia*, Jakarta, CSIS, 1983. hlm. 48.

⁵⁶ Leo Suryadinta, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

⁵⁷ M. Nishihara, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, Ithaca, Cornell University Press, Monograph Series, No. 52, 1972. hlm. 5

⁵⁸ William Liddle, *Partisipasi Partai Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1980. Hlm. 2.

mendapatkan legitimasi melalui pemilihan umum namun di dalam beberapa penyesuaian agar pemerintah dapat mengontrol dalam batas-batas tertentu mengamankan posisi rezim Orde Baru.⁵⁹ Oleh sebab itu pula, ABRI membesarkan Golkar karena hadirnya organisasi politik yang kuat dibutuhkan bagi tercapainya pembangunan yang dicita-citakan Orde Baru.⁶⁰ Pengalaman traumatis pada masa berkuasanya partai politik menyebabkan Golkar selalu ingin dibedakan dengan partai politik, walaupun fungsi-fungsi yang dimainkannya tidak berbeda dengan partai politik, inilah yang ikut memperkuat hubungan ABRI-GOLKAR.⁶¹

Pasca pembentukan Sekber Golkar, sesungguhnya telah dibentuk inisiasi lanjutan yang dilakukan oleh Jenderal Ahmad Yani untuk melakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai bentuk konsolidasi organisasi Sekber Golkar dengan membentuk cabang ke daerah-daerah. Mukernas Golkar direncanakan dilangsungkan pada tanggal 7-10 Oktober 1965. Namun disebabkan peristiwa G/30/S PKI yang membunuh para Jenderal ABRI salah satunya Jenderal Ahmad Yani, menyebabkan acara Mukernas Sekber Golkar diundur hingga 9-11 Desember 1965 yang bertempat di Cipayung, Bogor. Hasil Mukernas I Sekber Golkar, tetap menjadikan Brigjen Djuhartono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar.

Pergantian Pimpinan Dewan Harian Sekber Golkar pertama kali dilakukan dengan mengadakan Rapat Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar pada 14 Maret 1966. Hal ini disebabkan kekosongan kepemimpinan Sekber Golkar yang tidak dapat lagi dipimpin oleh Brigjen Djuhartono. Penyebabnya yaitu ditarik kembalinya Brigjen Djuhartono sebagai Staff Umum Angkatan Darat (S.U.A.D).⁶² Melalui Rapat Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar dengan suara bulat memilih Mayor Jenderal Soeprapto Sukowati sebagai Ketua umum Sekber Golkar (1966-1973). Pergantian kepemimpinan Brigjen Djuhartono yang

⁵⁹ Leo Suryadinata, "The Decline of the Hegemonic Party System In Indonesia: Golkar After The Fall of Soeharto", *Contemporary Southeast Asia*, Agustus 2007, 29, 2; Proquest. hlm. 334.

⁶⁰ A.S.S. Tambunan, "Fungsi Sosial-Politik ABRI", pidato pada Dies Natalis Akademi Hukum Militer/ Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta: Bina Cipta, 1980, hlm. 51-52.

⁶¹ Ibrahim Ambong, *Op. Cit.*, hlm 38.

⁶² Imam Pratigny, *Op. Cit.*, hlm. 116.

digantikan oleh Mayjen Sukowati merupakan langkah persiapan untuk menghadapi Pemilu 1971.⁶³

2.2.1. Keberhasilan Sekber Golkar Menjadi Pemenang Pemilu 1971.

Pada pemilu 1971 Sekber Golkar berhasil memperoleh 236 kursi di Parlemen (DPR)⁶⁴ dari jumlah suara sebesar 34.348.673 juta suara atau sekitar 62,80 persen dari keseluruhan total suara.⁶⁵ Keberhasilan Sekber Golkar pada pemilu 1971 mengalahkan pesaingnya yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapatkan suara 10.213.650. atau 18,67 persen dari total jumlah suara.⁶⁶ Sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) hanya mendapatkan 3.793.266. suara atau 6,94 persen dari total suara.⁶⁷ Padahal PNI telah berani mengklaim jauh sebelum dimulainya pemilu 1971 akan keluar sebagai pemenang.⁶⁸

Keberhasilan Sekber Golkar dalam Pemilu 1971 tidak terlepas dari dukungan penuh dari ABRI, Golkar juga meminta dukungan dari segenap Pegawai Negeri Sipil untuk memuluskan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971. Hal ini sesuai dengan kesaksian Ali Moertopo selaku Badan Pengendali Pemilihan Umum (Bapilu) 1971 menuturkan bahwa :

“Beberapa kalangan berpandangan bahwa kemenangan Golongan Karya terjadi karena beberapa faktor berikut: tersedianya dana, dukungan pejabat, terutama ABRI, pembentukan Korpri di dalam berbagai Kementerian, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan, dan juga karena berbagai macam intimidasi. Semua ini tentu saja memberikan sumbangan pada kemenangan Golongan Karya”.⁶⁹

Upaya memenangkan Pemilu 1971 tidak hanya dengan mendapatkan dukungan dari luar, namun juga Golkar merasa perlunya soliditas di dalam internal

⁶³ *Ibid.* hlm. 120.

⁶⁴ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1986. hlm. 52.

⁶⁵ R. William Liddle, *Pemilu 1977: Suatu Tinjauan*, Yogyakarta: Kelompok Studi Batas Kota, 1982, hlm. 18.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ridwan Saidi, *Golkar Pasca Pemilu 1992*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993. hlm. 8.

⁶⁹ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1974. hlm. 82.

organisasi.⁷⁰ Oleh sebab itu pula diadakan restrukturisasi di dalam tubuh organisasi Golkar pada Mukernas II di Cibogo, Jawa Barat pada 7 Juli 1969 dengan agenda memasukkan Kelompok Induk Organisasi (Kinos) sebagai langkah memperkuat fungsi melalui pembagian divisi yaitu:⁷¹

1. Kino profesi : Organisasi Massa non-ABRI
2. Kino Ormas Hankam : Organisasi Semi- ABRI – Semi organisasi massa dimana berafiliasi dengan kelompok politik lainnya.
3. Kino Gakari : Organisasi massa non afiliasi.
4. Kino SOKSI
5. Kino Kosgoro
6. Kino MKGR
7. Kino Gerakan Pembangunan : terdiri dari perwakilan pemimpin sipil dan teknokrat.

Dengan terbentuknya ke-tujuh Kino di dalam divisi organisasi Golkar, maka kekuatan organisasi dan massa Golkar bertambah secara signifikan yang berdampak pula pada kemenangan Golkar pada Pemilu 1971. Pembentukan Kino juga didasarkan kepada kenyataan banyaknya organisasi yang tergabung di dalam Sekber Golkar melepaskan diri karena takut menghadapi PKI serta terbentuknya Partai Muslimin Indonesia tahun 1968.⁷² Organisasi yang memisahkan diri pada tahun 1968 yaitu Muhammadiyah, Al Jamiatul Wasliyah, Gasbindo, Nahdlatul Ulama, Nadlatul Wathan, SNII, KBIM, Persatuan Umat Muslim, PORBISI, HSBI, PITI, Al Irsyad, Wanita Islam.⁷³ Kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971 telah tampak akan menjadi organisasi yang akan mendukung pemerintahan Soeharto dengan diubahnya Sekber Golkar menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971.⁷⁴

⁷⁰ Suhardiman, *Proses Pertumbuhan Golkar Dalam Rangka Pembaharuan Struktur Politik*, Unpublished paper, 1979, hlm. 10.

⁷¹ Julian M. Boileau, *Op. Cit.*, hlm. 61

⁷² DPP GOLKAR, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

2.2.2. Pembentukan Golkar Pasca Pemilu 1971

Kemenangan Sekber Golkar dalam Pemilu 1971, melalui proses musyawarah menghasilkan keputusan Ketua Umum Sekber Golkar Nomor : KEP/101/VII/GOLKAR/1971, tanggal 1971 menetapkan perubahan Sekber Golkar menjadi Golkar.⁷⁵ Hasil kemenangan Golkar di dalam pemilu 1971 memberi dampak bagi organisasi Golkar melakukan upaya reorganisasi dan restrukturisasi dengan mengadakan Munas Golkar I tahun 1973 di Surabaya. Pada saat Munas I 1973, disepakati Amir Moertono menjabat sebagai Ketua Umum Golkar (1973-1983). Agenda politik pada saat Munas Golkar I yaitu untuk melakukan pembentukan pengelompokan baru gabungan organisasi KINO yang terdiri dari SOKSI, MKGR, KOSGORO, Ormas Hankam, Karya Pembangunan, Profesi dan Gabungan Karyawan Republik Indonesia (GAKARI) beserta ABRI dan KORPRI dibawah payung Golkar dengan sebutan Keluarga Besar Golongan Karya. Penyatuan ke-tujuh KINO bersama ABRI dan KORPRI diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir di dalam kegiatan politiknya.⁷⁶ Sejak saat itu pula nama Sekertariat Bersama Golongan Karya secara resmi dihapuskan, dan digantikan dengan nama Golongan Karya (Golkar).

Pada masa periode pasca Pemilu 1971 dan menjelang tahun 1973, organisasi Golkar mengadakan Kongres Musyawarah Nasional I di Surabaya pada bulan September 1973. Munas I ini dilakukan dalam rangka penguatan kepemimpinan Golkar di dalam menyukseskan kepemimpinan rezim Orde Baru.⁷⁷ Berselang 6 (enam) bulan kemudian, organisasi Golkar juga berusaha merangkul organisasi masyarakat seperti Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Upaya Golkar merangkul organisasi-organisasi tersebut merupakan langkah Golkar untuk menekan jumlah organisasi independen dan

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 91.

⁷⁶ Affan Gaffar dkk. *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1993. hlm. 24.

⁷⁷ Laporan dan Pertanggung Jawab DPP Golkar pada Munas I, di Surabaya, 4-10 September 1973.

menjadikannya organisasi yang berada dibawah payung organisasi Golkar.⁷⁸ Perluasan dukungan organisasi kemasyarakatan yang digalang untuk masuk menjadi bagian dari Golkar merupakan langkah untuk memperbesar kekuatan Golkar dalam menghadapi pemilu 1977.

2.2.3. Golkar Pasca Penetapan UU No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasca pemilu 1971 yang memberikan legitimasi bagi pemerintahan Orde Baru untuk melakukan perubahan dan pembaruan struktur politik melalui mekanisme penyederhanaan kepartaian dan kekuatan sosial.⁷⁹ Berdasarkan hasil pemilu 1971, Soeharto melakukan pengelompokan Partai dengan melihat perolehan suara mayoritas Partai pada pemilu 1971 dimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili suara umat Islam Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mewakili suara nasionalis dan sekuler.⁸⁰ Penyederhanaan paksa yang dilakukan oleh Soeharto kemudian ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 tentang Partai politik dan Golongan Karya.⁸¹

Rezim Orde Baru menyadari benar semakin diberikannya keistimewaan dan dukungan yang besar tidak hanya finansial namun juga keleluasaan Golkar untuk melakukan kegiatan politik akan memberi dampak positif bagi stabilitas pemerintahan.⁸² Hal ini terlihat dengan kebijakan Pemerintahan yang tidak menguntungkan bagi Partai Politik lainnya namun memberikan keuntungan bagi Golkar.⁸³ Kebijakan melarang setiap kegiatan politik di tingkat desa kecuali hanya untuk waktu yang singkat pada saat kampanye Pemilu memberikan dampak yang signifikan bagi para pemilih di desa.⁸⁴ Hal ini disebabkan para pemilih di

⁷⁸ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta, 1974. hlm.88-96.

⁷⁹ Ali Moertopo, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁸⁰ R. William Liddle, *Op. Cit.*, HLM. 14-15. Lebih lanjut PPP merupakan gabungan dari partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Sedangkan PDI merupakan gabungan dari partai Murba, PNI, Parkindo, Partai Katolik, dan IPKI.

⁸¹ Ridwan Saidi, *Op. Cit.* hlm. 11.

⁸² *New York Times*, dikutip dalam tulisan Mahasiswa Indonesia, 23 Mei 1971, hlm. 3.

⁸³ Syamsuddin Haris, "General Elections Under the New Order", di dalam buku Hans Antlov & Sven Cedderoth (eds.), *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond*, Routledge Press, Curzon, 2004. hlm. 35.

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 201.

desa tidak mendapatkan pendidikan politik dan proses ideologisasi yang sewajarnya dilakukan oleh Partai Politik.⁸⁵ Hal ini juga tidak terlepas dari peraturan kampanye politik yang boleh dilakukan partai politik menjelang pemilu hanya 14 hari pada pemilu 1971 dan pada 1977 hanya 30 hari.⁸⁶

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di desa dengan akses akan transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas akan sangat sedikit menerima informasi yang berkaitan erat dengan perkembangan politik nasional. Tentu saja jumlah suara yang di dapat oleh Partai politik kontestan Pemilu akan kalah dengan Golkar yang mendapatkan kemudahan dan akses untuk melakukan kegiatan politiknya di desa atas dasar bahwa Golkar bukanlah Partai Politik melainkan hanya organisasi yang berisikan orang-orang yang berorientasi pada kekaryaannya. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena “massa mengambang” yaitu dimana partai politik hanya mendapatkan pemilih di daerah perkotaan namun tidak pada level *grass roots* yaitu di pedesaan.⁸⁷

Golkar juga mendapatkan keuntungan dengan merangkul pegawai Pemerintahan di tingkat desa untuk masuk ke dalam tubuh organisasi Golkar disebabkan adanya aturan bahwa pegawai Pemerintahan tingkat II (Kabupaten) dilarang untuk terlibat di dalam aktivitas partai politik.⁸⁸ Pegawai pemerintahan tingkat II tergabung di dalam Korpri yang memberikan keuntungan bagi Golkar di dalam memobilisasi birokrasi untuk membantu Golkar baik di dalam kegiatan politik sehari-hari maupun di dalam upaya kemenangan pemilu.⁸⁹ Hal ini yang menjadi faktor penting lainnya dan tidak mengherankan bahwa sejak tahun 1971 hingga 1997, Golkar selalu menjadi Pemenang. Seperti tabel yang ditunjukkan di Tabel 2.2

⁸⁵ Julian M Boileau, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁸⁶ David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesian Military in Politics 1975-1983*, Cornell University Press, Ithaca, 1984. Hlm. 148-149.

⁸⁷ Ali Moertopo, *Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development*, Jakarta, CSIS, 1978, hlm 85-86.

⁸⁸ Julian M. Boileau, *Op. Cit.*, hlm. 77

⁸⁹ Kenneth E. Ward, *The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study*, Monash Papers on Southeast Asia No.2, Clayton Monash University Centre of Southeast Asia Studies, 1974, hlm. 11.

Tabel 2.2.

Partai	1971	1977	1982	1987	1992	1997
Golkar	62,80	62,11	64,34	73,16	68,1	74,51
PPP	27,11	29,29	27,78	15,97	17,0	22,43
PDI	10,09	8,60	7,88	10,87	14,0	3,06

Sumber : Leo Suryadinata, *Interpreting Indonesian Politics*, Singapore, Times Academic Press, 1998. hlm 109.

2.2.4. Munas Golkar di Era Orde Baru.

Setelah perubahan Sekber Golkar menjadi Golkar, Munas Golkar I diadakan pada 4-10 September 1973 di Surabaya. Pada saat itu Amir Moertono menjadi Ketua Umum Golkar pertama dan sekaligus memberikan posisi bagi Soeharto sebagai Pembina Utama Golkar melalui keputusan yang dihasilkan di dalam Munas yaitu Keputusan DPP Golkar No: Kep-401/IX/GOLONGAN KARYA/1971.⁹⁰ Munas I merupakan langkah organisasi Golkar untuk memperkuat konsolidasi dan organisasi Golkar agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi Golkar di dalam Pemerintahan dan Parlemen.⁹¹

Golkar kembali mengadakan Munas ke-II (dua) 1978 di Denpasar, Bali. Agenda Munas ke II 1978 tidak terjadi pergantian kepemimpinan Ketua Umum Golkar, tetap dipimpin oleh Amir Moertono. Agenda Munas Golkar ke-II sesungguhnya membahas mengenai kinerja kegiatan politik yang dilakukan oleh Kino-kino pasca terbentuk di dalam Keluarga Besar Golongan Karya bersama ABRI dan KORPRI. Ketergantungan Golkar terhadap peran penting Birokrat dan ABRI di dalam mekanisme kerja organisasi Golkar mendapatkan kritik dan keluhan dari para kader terutama para kader Golkar yang berasal dari jalur G (Golkar). Hal ini menyebabkan di dalam proses perumusan kebijaksanaan dan

⁹⁰ DPP GOLKAR, *Op. Cit.* hlm.96.

⁹¹ *Ibid.*

pengambilan keputusan Organisasi sangat bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh kader Golkar dari jalur A (ABRI) dan jalur B (Birokrat).⁹² Tentu saja upaya untuk membawa Golkar lebih mengakar di dalam masyarakat, tidak bergantung pada konsep massa mengambang (*floating mass*) tidak mendapat perhatian serius dari organisasi Golkar pada saat itu.

Munas Golkar ke-III (tiga) digelar pada tahun 1983 di Jakarta. Pada Munas ke-III, dilakukan penunjukkan Ketua Umum Golkar yang baru dan terpilih Sudharmono menjadi Ketua Umum Golkar periode (1983-1988). Agenda Munas ke-III melakukan upaya konsolidasi tubuh organisasi Golkar dengan menganust asas keanggotaan aktif tidak lagi bersifat pasif.⁹³ Maksudnya keanggotaan aktif dengan secara jelas melakukan permohonan tertulis sebagai kader Golkar sehingga dapat memperkuat konsolidasi kader. Hal ini dapat menjadikan Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang solid. Pembicaraan agar antara hubungan jalur A, jalur B dan jalur G lebih bersifat setara dan konsultatif di dalam pembuatan keputusan organisasi Golkar terus diupayakan namun langkah ini belum dapat terealisasikan.

Pada Munas Golkar ke IV (empat) tahun 1988, di Jakarta, terpilih Wahono sebagai Ketua Umum Golkar yang baru untuk periode (1988-1993). Upaya konsolidasi di dalam tubuh Golkar pada Munas ke III mendapatkan kritikan dan justru membawa pragmatisme di dalam tubuh organisasi semakin kencang. Masing-masing jalur A dan jalur B memanfaatkan agenda “konsolidasi organisasi” untuk mengukuhkan posisi kader-kader yang berasal dari jalurnya masing-masing. Jalur A dan Jalur B membentuk faksi-faksinya sendiri guna memperebutkan jatah posisi dan alokasi bagi kadernya di legislatif, eksekutif, bahkan di kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah menjadi ajang pertarungan dengan tidak lagi melalui proses yang musyawarah bahkan seringkali terjadi adu jotos.⁹⁴

⁹² Affan Daffar dkk. *Op.Cit.*, hlm. 25

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid* hlm. 26

Pada Munas ke-V (lima) tahun 1993 di Jakarta terpilih untuk pertama kali Ketua Umum Golkar yang baru berasal dari non-militer atau kalangan sipil-birokrat yaitu Harmoko untuk periode (1993-1998). Terpilihnya Harmoko merupakan sesuatu hal yang baru bagi organisasi Golkar yang sebelumnya selalu dipilih dari kalangan militer. Menurut Sudharmono, mantan Ketua Umum Golkar (1983-1988) mengatakan bahwa sesungguhnya Soeharto telah lama menginginkan agar sipil lebih berperan di dalam Golkar namun disebabkan kaderisasi sipil yang tidak berjalan baik di dalam Golkar serta tidak mengerti bagaimana menjadi Ketua Umum menyebabkan hal itu yang menghambat sipil menjadi Ketua Umum.⁹⁵

Catatan penting menyangkut Munas Golkar pada masa Orde Baru yaitu pada saat Munas berlangsung memang tetap terjadi proses pergantian Ketua Umum namun proses pemilihan Ketua Umum tidak berdasarkan mekanisme demokrasi di dalam organisasi Golkar, akan tetapi terletak pada wewenang penunjukkan oleh Ketua Dewan Pembina yaitu Soeharto. Sehingga mekanisme pemilihan Ketua Umum tidak berdasarkan proses yang terbuka namun penuh nepotisme.⁹⁶ Hal ini menyebabkan tidak terjadi proses pergantian kepemimpinan di dalam Organisasi Golkar secara sehat dan berjenjang karir berdasarkan pengabdian dan prestasi di dalam tubuh Organisasi. Organisasi Golkar tidak dapat mandiri dan hanya bersifat sebagai mesin politik pemerintahan Soeharto, karena Ketua Umum Golkar yang terpilih tentu saja harus memiliki kesesuaian dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Sehingga syarat penting untuk menjadi Ketua Umum Golkar pada masa Orde Baru adalah harus memiliki kedekatan dan disenangi secara personal oleh Ketua Dewan Pembina Golkar. Pada masa Golkar Orde Baru, pemilik suara tunggal untuk menjadi Ketua Umum Organisasi Golkar adalah sang Ketua Dewan Pembina Golkar yaitu Soeharto yang sekaligus sebagai seorang Presiden Orde Baru. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Golkar Orde Baru yang

⁹⁵ Kutipan Wawancara Sudhomo di dalam Media Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 Agustus 1993, berjudul "Pak Harto Sudah Lama Pikirkan Ketua Umum Golkar dari Sipil". hlm. 01.

⁹⁶ Akbar Tandjung, *Op. Cit.*, hlm. 166.

menyatakan posisi Ketua Dewan Pembina yang bisa sewaktu-waktu menghapuskan Organisasi apabila dianggap membahayakan Pemerintahan Orde Baru.

2.3. PARTAI GOLKAR ERA REFORMASI

Sejatinya Partai Golkar era Reformasi dimulai pada saat setelah terjadinya proses pergantian Ketua Umum yang baru pada Munaslub 1998 di Jakarta. Pergantian posisi Ketua Umum dari Harmoko kepada Akbar Tandjung (1998-2004) merupakan awal bagi Partai Golkar di era Reformasi yang diikuti pula dengan beberapa perubahan penting di dalam tubuh organisasi Golkar. Perubahan-perubahan penting di dalam Partai Golkar Reformasi yaitu menyangkut : *Pertama*, perubahan ideologi di dalam organisasi Golkar yang tidak lagi menjadi mesin politik Soeharto dan kebijakan Partai ditentukan oleh Kebijakan Partai melalui Rapat Pimpinan Golkar. *Kedua*, perubahan di dalam syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum tidak lagi ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina, melainkan melalui proses pemilihan dari para kader di dalam Munas. *Ketiga*, perubahan di dalam Ormas-ormas pendukung Partai Golkar dan dilakukan penambahan Ormas-ormas baru sebagai Ormas sayap pendukung Partai Golkar.

2.3.1. Paradigma Baru Partai Golkar Reformasi.

Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru mengharuskan Golkar melakukan rekonsolidasi dan restrukturisasi di dalam internal Organisasi Golkar. Perubahan yang mendasar adalah dengan mengubah Golkar menjadi Partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu 1999. Hal ini didasarkan keinginan dan situasi yang mengharuskan Partai Golkar untuk mengikuti arus dan tuntutan Reformasi.⁹⁷ Sebagai Partai politik, Ideologi menjadi suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap Oleh Partai Golkar Reformasi. Fungsi dari ideologi di dalam Partai politik adalah untuk membedakan antara partai lain yang berkompetisi di

⁹⁷ Akbar Tandjung, *Op. Cit.*, hlm. 58

dalam Pemilu, disamping itu pula ideologi berfungsi untuk menentukan preferensi Kebijakan partai di dalam Parlemen dan Pemerintah yang bersifat Kiri (left/sosialis) atau Kanan (right/liberal).⁹⁸

Ideologi Partai Golkar Reformasi tidak berdasarkan prinsip kebijakan partai yang beraliran ke-kiri atau ke-kanan, melainkan berprinsip pada Partai Golkar yang bersifat moderat, terbuka dan demokratis. Seperti yang diutarakan Akbar Tandjung pasca terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar I Pasca Orde Baru, yaitu :

Sebagai partai yang terbuka, Golkar bersifat inklusif bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku bahasa, dan status sosial ekonomi. Sebagai partai yang mandiri, Golkar adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun cultural. Golkar akan selalu mengambil posisi tengah atau moderasi. Maka, kecenderungan pada sikap ekstrem tidak akan pernah menjadi sikap Golkar. Sikap moderasi ini pula yang menyebabkan Golkar bersikap nonsektarian dan antisektarian. Golkar harus mengakar. Karena itu, Golkar mengembangkan merit system agar para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi, bukan berdasarkan KKN yang primitif.⁹⁹

Visi-visi partai Golkar pasca reformasi pun tidak menunjukkan *platform* partai yang jelas di dalam hal spesifikasi tentang suatu kebijakan. Hal ini terlihat di dalam tujuh prinsip di dalam visi partai Golkar yaitu:¹⁰⁰

1. Golkar adalah partai terbuka (*inclusive*). Sebagai partai terbuka Golkar senantiasa mengembangkan kemajemukan yang berwawasan inklusif, dalam pengertian pengembangan keter-bukaan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat yang berorientasi pada kemajemukan dan kepentingan bangsa.
2. Golkar adalah partai mandiri (independen). Sebagai partai yang mandiri, Golkar senantiasa harus mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan siapapun dan pihak manapun. Secara struktural Golkar baru tidak mengenal “mekanisme tiga jalur” dan

⁹⁸ Alan Warre, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁹⁹ Saya kutip di dalam tulisan Koran, *Bisnis Indonesia*, 11 juli 1998, hlm. 5

¹⁰⁰ Akbar Tandjung, *Op.Cit.*, hlm. 226-227

Dewan Pembina/Dewan pertimbangan/Dewan Penasehat seperti di masa lalu.

3. Golkar adalah partai demokratis. Golkar senantiasa mengembangkan kepeloporan untuk tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka (transparan).
4. Golkar adalah partai moderat. Sebagai sebuah partai yang moderat, Golkar senantiasa mengutamakan 'posisi tengah' (moderat) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem.
5. Golkar adalah partai yang solid.
6. Golkar adalah partai yang mengakar yang mengupayakan agar anggotanya berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (*meritocratic system*).
7. Golkar adalah partai yang responsif, yang selalu peka terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat secara konsisten untuk memperjuangkannya menjadi keputusan politik yang bersifat publik tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agama, bahasa, aliran, dan kebudayaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip partai Golkar baru yang tertuang di dalam visi-visi Partai maka tidak dapat kita menemukan program kepartaian secara spesifik. Jargon-jargon partai yang bersifat abstrak dan 'pragmatis' dapat dilihat di dalam prinsip ke-empat yang menyatakan partai Golkar sebagai partai moderat yang tidak ekstrem ke kiri dan ke kanan atas dasar mengutamakan kenyataan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk secara sosiologis. Tidak mengherankan di dalam iklan-iklan politik televisi partai Golkar pada saat kampanye pemilu 1999 bersifat abstrak dan hanya bersifat jargon-jargon politik yang bersifat menarik simpati namun tidak secara kongkrit dan detail untuk ditawarkan di dalam preferensi kebijakan partai.¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat tesis Sri Andayani, "Profil Tayangan Iklan Politik Selama Kampanye Politik 1999: Studi Analisis Isi Media Televisi Terhadap Tayangan Iklan Politik Tiga Partai Perolehan Suara Terbesar (PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB)", Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 32-33.

Posisi ideologi Partai Golkar yang tidak berada pada posisi ke-kiri atau ke-kanan secara tegas disebabkan sesungguhnya preferensi kebijakan Partai Golkar sangat ditentukan oleh seorang Ketua Umum yang terpilih, tidak berdasarkan aturan tertulis di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi Golkar secara spesifik mengenai preferensi kebijakan Partai. Namun sikap partai Golkar yang anti-PKI dan ideologi komunisme tetap menjadi basis nilai utama di dalam ideologi Golkar Reformasi.¹⁰² Ideologi Paradigma baru merupakan ideologi yang hanya menegaskan bahwa partai Golkar tidak menjadi mesin politik Pemerintahan seperti pada masa Orde Baru. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapim IV Partai Golkar 200 yang menyatakan :

“Dengan paradigma baru Partai Golkar diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertian yang sebenarnya. Yakni tidak lagi sebagai “partainya penguasa” (*the ruler’s party*) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana paradigma lama”.¹⁰³

Perubahan Partai Golkar yang memakai nilai paradigma baru memberikan peluang dan kesempatan baru bagi para aktivis yang sebelumnya mengkritisi dan menentang Golkar Orde Baru disebabkan paradigma lama. Beberapa Aktivis seperti Nusron Wahid mantan Ketua PMII dan M. Lutfi mantan aktivis Forkot yang bergabung di dalam Golkar disebabkan paradigma baru yang diusung Partai Golkar. Nusron Wahid dan M. Lutfi berpendapat mengenai pilihan merka menjadi kader Golkar Reformasi yaitu :

“Saya kira Golkar sudah berubah jauh. Keberanian memutus hubungan dengan masa lalu dan mengembalikan diri sebagai partai yang menjunjung tinggi pluralism dan fungsionalisme adalah point terpenting dalam paradigma baru. Dan saya rasa Golkar tidak retorik menyatakan itu. Saya melihat, tidak ada partai lain di Indonesia yang mampu merajut pluralism sebaik di Golkar. Karena perubahannya yang drastic dan mendasar itulah maka saya tertarik bergabung dengan Golkar. Kalau tidak berubah seperti ini, mungkin saya akan berpikir dua kali”.¹⁰⁴

¹⁰² Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa depan*, Yappindo, Depok, 1998. hlm. 136

¹⁰³ Keputusan Rapim IV Partai Golkar 2000 Nomor 1/RAPIM-IV/GOLKAR/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang paradigma baru partai Golkar.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nusron Wahid, Jakarta, November 2004.

“Yang menjadi rujukan kawan-kawan khususnya elemen mahasiswa pada saat itu adalah berharap adanya suatu perubahan yang mendasar terhadap partai-partai, termasuk Golkar. Dalam konteks Golkar, saat itu kami masih menganggap masih menjadi perpanjangan tangan rezim Orde Baru, Namun ketika mengalami suatu ujian sejarah dimana Partai Golkar mulai meretas paradigma baru, dalam aspek inilah para aktivis mulai tertarik untuk masuk menjadi kader partai tersebut. Karena saya menganggap perubahan paradigma tersebut telah menggeser pola partai Golkar secara serius dengan meletakkan pilar demokrasi menuju bentuk partai yang benar”.¹⁰⁵

Paradigma baru yang diusung oleh Partai Golkar reformasi mendapat dukungan dan simpati dari para aktivis reformasi. Hal ini tentu saja dirasakan oleh para aktivis reformasi paradigma baru yang diusung oleh Partai Golkar memiliki semangat yang sama dengan arus reformasi di dalam masyarakat. Masuknya para pimpinan dan aktivis organisasi massa ke dalam Partai Golkar Reformasi menjadi awal baru bagi citra partai Golkar yang mandiri dan bersih dari militer.

2.3.2 Demokratisasi Pemilihan Ketua Umum Golkar Pada Munas Era Reformasi.

Golkar merupakan Partai politik di Indonesia yang pertama kali melakukan pemilihan Ketua Umum melalui proses demokrasi di dalam internal Partai. Proses demokrasi di dalam pemilihan Ketua Umum Golkar tidak terlepas dari upaya reformasi di tubuh Partai. Partai Golkar telah melakukan tiga kali pemilihan Ketua Umum sejak awal reformasi melalui mekanisme demokrasi internal Partai yang dikenal dengan Munas Golkar. Keberhasilan Partai Golkar melakukan pemilihan Ketua Umum melalui mekanisme Munas menjadi langkah penting bagi pembangunan demokrasi yang baik di dalam menentukan figur pimpinan Partai yang berdasarkan aspirasi para kadernya.

Penentuan kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme Munas Golkar setiap 5 tahun sekali memberikan pengaruh yang besar baik secara internal Partai Golkar maupun eksternal. Secara internal Partai Golkar, dengan adanya Munas Golkar maka akan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap

¹⁰⁵ Wawancara dengan M. Lutfi, mantan Aktivis Forkot, Jakarta, November 2004.

kader untuk bisa mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini juga penting untuk pendidikan kematangan berdemokrasi di dalam internal Partai. Para kader Golkar akan dapat memberikan sumbangsih pikiran dan pendapatnya untuk diakomodasi pada saat Munas dengan memilih sosok calon Ketua yang dianggap memiliki kesesuaian dengan ide dan kepentingannya.

Secara eksternal Munas Golkar berdampak pada penilaian masyarakat umum terhadap pembangunan demokrasi di Partai Golkar. Pertrtarungan Ketua Umum Golkar yang diberitakan secara terbuka di media cetak dan televisi menjadi pembelajaran politik yang penting bagi masyarakat. Mekanisme demokrasi di dalam Munas Golkar menjadi pertanda bahwa sosok Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih tidak lagi berdasarkan nepotisme seperti pada masa Orde Baru. Hal ini sekaligus berdampak pada pemahaman masyarakat bahwa dinasti 'Cendana' tidak lagi menentukan dalam keputusan seorang memilih Ketua Umum. Tidak ada lagi sosok Soeharto yang menentukan posisi seorang Ketua Umum di Golkar. Partai Golkar menjadi partai yang modern yang tidak berada pada dinasti keturunan atau figur sentral seperti Partai politik lain di Indonesia.

Pemilihan Ketua Umum Golkar sejak pasca Orde Baru telah menghasilkan tiga figur Ketua Umum yang berbeda. Melalui figur Ketua Umum Golkar yang terpilih pada ketiga periode Munas pasca Orde Baru, dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian demokrasi internal Partai Golkar yang terbangun. Disamping itu pula faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang Ketua Umum menjadi faktor penting dalam menilai derajat demokrasi dalam mentalitas kader Partai Golkar. Berpijak pada hasil penelitian mengenai kemenangan ke-tiga sosok Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung (1998-2004), Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014), menjadi tolak ukur pada perkembangan demokrasi internal Partai Golkar.

Ada beberapa tahap yang dilakukan Partai Golkar sebelum dilaksanakannya Munas yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Munas Golkar diadakan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Partai sekaligus dilakukan pemilihan kembali Ketua Umum yang baru. Ada beberapa proses sebelum

dilaksanakan Munas Golkar. Hal pertama yang dilakukan sebelum mengadakan Munas yaitu diadakan Rapat Pimpinan. Rapat pimpinan merupakan hal yang dilakukan sebelum ataupun sesudah Munas pemilihan Ketua Umum yang baru ataupun Konvensi pada saat pemilihan Calon Presiden menjelang Pemilu. Rapim yang dilakukan sebelum Munas yaitu untuk menentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas, serta tata-tertib di dalam Munas terutama menyangkut mekanisme pemilihan ketua Umum dan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum yang baru pada Munas. Sedangkan Rapim sesudah Munas adalah sebagai langkah untuk sosialisasi dan pembentukan kepengurusan baru di dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pada saat Rapat Pimpinan Golkar dihadiri atau diikuti oleh pimpinan DPP dan DPD Tingkat I.

Ada perbedaan fungsi dan peranan dari Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas Munas. Fungsi dari Panitia Pelaksana Munas yaitu mengatur segala keperluan operasional dan teknis yang diperlukan selama Munas berlangsung baik keperluan akomodasi tempat berlangsungnya Munas, konsumsi, serta memimpin jalannya sidang. Panitia Pengawas berfungsi untuk mengawasi jalannya sidang Munas agar sesuai dengan aturan tata-tertib yang telah disepakati di dalam Rapim termasuk menilai kesesuaian seorang kader untuk dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum yang baru di dalam Munas. Panitia pengawas memiliki wewenang untuk menyatakan lolos tidaknya seorang kader untuk ikut di dalam pemilihan calon Ketua Umum yang baru pada Munas. Seorang kader yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Umum yang baru harus mengisi formulir dan diserahkan kepada Panitia Pengawas untuk ditentukan layak tidaknya menjadi kandidat calon Ketua Umum yang baru. Sehingga Panitia Pengawas layaknya sebuah tim verifikasi yang mengecek kelengkapan administrasi seorang bakal Calon Ketua Umum Golkar yang baru.

Setelah diterima formulir para calon Ketua Umum yang diserahkan oleh Panitia Pengawas kepada Panitia Pelaksana terutama Pimpinan Sidang Munas, untuk dimasukkan ke dalam daftar Calon Ketua Umum Golkar yang baru yang masuk di dalam bursa pemilihan di dalam Munas. Akan tetapi sebelum diadakan

mekanisme pemilihan Ketua Umum yang baru, sidang Munas dibuka dengan pidato pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama sebagai bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban Ketua Umum yang lama selama memimpin Partai Golkar. Proses pemilihan Ketua Umum yang baru dimulai pada saat berakhirnya pidato pertanggung jawaban Ketua Umum yang lama maka hal itu berarti pula telah berakhir masa jabatannya/demissioner.

Setelah Ketua Umum yang lama telah dinyatakan demissioner maka barulah diadakan mekanisme Pemilihan Ketua Umum yang baru dimana para calon-calon yang telah memenuhi syarat dan seleksi dari Panitia Pengawas diajukan untuk dipilih oleh para kader yang memiliki hak suara sesuai dengan tata-tertib di dalam pemilihan Ketua Umum yang telah diatur di dalam AD/ART Partai Golkar. Syarat untuk dapat menjadi Ketua Umum yang telah diatur di dalam AD/ART Partai Golkar yaitu tercantum pada pasal 12 ayat (3) tentang syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat:

1. Pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi dan/atau serta pernah menjadi Pengurus Organisasi Pendiri dan yang didirikan selama 1 (satu) periode penuh dan didukung oleh minimal 30% hak suara.
2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
3. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader.
4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
6. Tidak pernah terlibat G-30-S/PKI.
7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam partai Golkar.

Setelah syarat-syarat diatas dipenuhi maka, pimpinan sidang Munas akan mengadakan pemilihan ketua umum dengan menyerahkan para pemilik suara memilih calon-calon ketua umum yang telah lolos verifikasi Panitia Pengawas.

Apabila ternyata pada saat pemilihan para kandidat calon Ketua Umum tidak mendapatkan suara Mayoritas yaitu lebih dari 50% jumlah pemilik suara, maka akan diadakan pemilihan dua kali dengan mennyisakan dua calon kandidat Ketua Umum yang baru yang memiliki suara terbanyak. Mekanisme pemilihan dilakukan secara voting apabila kandidat calon Ketua Umum terdiri dari lebih satu orang atau tidak tunggal sehingga tidak bisa dilakukan secara aklamasi.

Yang menarik di dalam Munas seringkali susunan AD/ART yang dapat diubah-ubah berdasarkan kebijakan dari Ketua Umum terutama menyangkut susunan peserta Munas yang boleh memilih/memberikan suara dalam Pemilihan Ketua Umum. Nuansa kepentingan politis oleh setiap calon Ketua Umum begitu kuat hingga aturan-aturan main dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Rapimnas menjadi sangat cair dan dapat diubah-ubah sesuai kepentingan para kandidat calon Ketua Umum. Pada Munaslub 1998, yang memiliki Hak suara hanyalah DPP, DPD tingkat I, Ormas Pendiri Golkar (Soksi, Kosgoro, dan MKGR) serta Organisasi Sayap. Namun pada Munas ke-tujuh di Bali 2004, Hak suara juga diberikan kepada DPD Tingkat II. Begitu pula pada Munas Golkar di Pekanbaru 2009, Pemberian suara juga diberikan kepada pengurus DPD Tingkat II.

Meskipun sesungguhnya pemberian suara kepada pengurus DPD Golkar Tingkat II di dalam Munas lebih berdasarkan kepada hitung-hitungan politik jumlah suara yang didapat untuk memenangkan sang incumbent Ketua Umum Golkar yang lama. Apabila sang incumbent merasa bahwa dengan semakin sedikit pemberian hak suara akan memperbesar kemenangan sang incumbent Ketua Umum yang lama, maka Ia cenderung tidak akan memperluas hak suara peserta Munas. Namun apabila jumlah pemegang suara yang telah ditetapkan di dalam AD/ART yaitu DPP, DPD I, Ormas Pendiri dan Sayap cenderung memilih calon Ketua Umum yang baru, maka keran suara pemilih peserta Munas baru dilibatkan pengurus DPD Tingkat II.

Sehingga apabila mengacu pada penentuan yang memiliki hak suara di dalam pemilihan Ketua Umum yang baru pada Munas berjumlah 484 suara yang terdiri dari yaitu :

1. DPP total 1 suara.
2. DPD I total 33 suara.
3. DPD II total 440 suara
4. Ormas Pendiri Golkar/Hasta Karya (Soksi, Kosgoro 1957, MKGR, Alhidayah, Satkar Ulama Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah, Himpunan Wanita Karya) total 8 Suara.
5. Ormas Sayap Pendukung Partai (Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)) total 2 suara.

Besarnya jumlah pemegang hak suara yang harus didapatkan oleh Calon Ketua Umum yang baru mengharuskan para calon Ketum untuk bisa melakukan pendekatan dan Kampanye ke daerah-daerah sebelum menjelang Munas berlangsung. Kemenangan seseorang bakal calon Ketum yang baru sangat bergantung pada saat kampanye ke pengurusan daerah serta pembangunan jaringan komunikasi yang baik dengan para pengurus Golkar tingkat II/Daerah. Untuk dapat melakukan kampanye dan pendekatan kepada kepengurusan Golkar di daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kemampuan finansial/dana yang dimiliki oleh calon Ketum sangat berpengaruh pada keberhasilan kampanye sang calon Ketum. Meskipun jaringan dan hubungan komunikasi yang baik sangat diperlukan sebelum menjelang Munas. Namun tidak jarang kader-kader Golkar yang memiliki potensi secara prestasi dan jenjang karir di dalam Organisasi tidak mampu bersaing di dalam kampanye ke pengurus daerah.

Sesungguhnya mengenai pemberian hak suara kepada pengurus Golkar di daerah terdapat pengaruh yang berdampak luas pada proses terpilihnya bakal calon Ketua Umum Golkar yang baru yaitu *Pertama*, memang dengan pemberian hak suara kepada pengurus tingkat II Golkar dapat memberikan peluang bagi para kader di tingkat daerah untuk terlibat di dalam proses pemilihan Ketua Umum

Golkar di Pusat sehingga benar-benar diharapkan bisa mencerminkan suara kader di level *grass roots*. *Kedua*, Pemberian hak suara kepada DPD tingkat II juga berdampak pada besarnya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon Ketua yang baru sehingga kader-kader Golkar yang berpotensi secara prestasi dan pengabdian di dalam tubuh Partai dapat tersingkir oleh kader-kader “baru” yang belum berpengalaman namun memiliki dukungan finansial yang kuat. Tentu saja apabila begitu besar peserta yang dilibatkan di dalam proses pemilihan Ketua Umum yang baru, maka akan memakan biaya yang sangat besar tidak hanya bagi Anggaran yang harus dikeluarkan Partai Golkar, namun juga para Calon Ketua Umum yang ‘mengakomodasi’ pendukungnya yang berasal dari daerah/luar Jakarta. Tidak mengherankan kelompok Pengusaha dan Bisnis memiliki peluang yang besar untuk terpilih dengan pemberian suara kepada DPD Tingkat II.

Fase kampanye merupakan salah satu fase yang krusial di dalam membangun kepercayaan dan dukungan dari para pengurus Golkar Tingkat II. Tidak jarang pada saat kampanye menjelang Munas, para kontestan yang ingin mendapatkan loyalitas dan dukungan secara pasti dari para pengurus Golkar di DPD II menggunakan insentif dan janji-janji kepada para pemegang suara di daerah. Disinilah lobi-lobi baik janji jabatan politis, insentif uang, serta insentif lainnya ditawarkan kepada para pemegang suara di Daerah.

Disatu sisi pemberian insentif dan janji-janji politis terhadap para kader merupakan hal yang lumrah di dalam politik internal Partai, namun disisi lain kader Golkar yang memiliki keunggulan di dalam memberikan insentif materi tentu akan berpeluang di dalam meraih dukungan suara dari para Kader di daerah. Setelah melalui fase kampanye, dan melalui proses pemilihan Ketua Umum pada saat Munas, Apabila telah terpilih salah satu kandidat calon Ketua Umum yang baru, maka Ia resmi telah menjadi Ketua Umum Golkar yang baru untuk periode 5 tahun ke depan.

2.3.3 Organisasi Sayap Pendukung Partai Golkar Reformasi.

Pasca dihapuskannya Jalur A (ABRI) dan jalur B (Birokrasi) sebagai salah satu jalur pendukung di dalam Organisasi Golkar pada masa Orde Baru, menyebabkan terjadinya pemisahan diri yang dilakukan oleh Ormas-ormas pendukung Partai Golkar. Pemisahan diri terutama dilakukan oleh Ormas-ormas yang tergabung di dalam Trikarya sebagai Organisasi pendiri Golkar. Hal ini menjadi sangat mudah dipahami disebabkan para Ormas pendiri organisasi Golkar adalah Ormas bentukan militer pada masa Orde Lama. Sehingga Ormas-ormas yang tergabung di dalam Trikarya adalah berasal dari para Purnawirawan militer/ABRI yang memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto.¹⁰⁶

Ormas yang dikenal dengan sebutan Trikarya/KINO yang melakukan pemisahan diri yaitu Kosgoro, Soksi dan MKGR. Beberapa fungsionaris Golkar yang membentuk partai sendiri dan memisahkan diri yaitu seperti Edi Sudrajat yang membentuk Partai Keadilan dan Persatuan dan berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. R. Hartono membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Yapto S. Soerjosoemarno membentuk Partai Patriot Pancasila dan Mien Sugandhi membentuk Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan berubah menjadi Partai Gotong Royong.

Oleh sebab itu pula, perlu dibentuk Organisasi sayap pendukung Partai Golkar Reformasi yang baru guna menjadi basis jalur pendukung Partai sekaligus sebagai jalur pembentukan kaderisasi Partai Golkar. Organisasi sayap yang dibentuk pertama sebagai respon terhadap pemisahan diri/perpecahan yang dilakukan Ormas Trikarya yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). AMPG dibentuk untuk menghimpun kader-kader muda menjadi kader yang militan dan berdedikasi tinggi terhadap Partai Golkar, sedangkan KPPG dibentuk untuk menghimpun kader Perempuan di

¹⁰⁶ Akbar Tandjung, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

dalam Golkar guna mengurus masalah-masalah keperempuanan dan kemasyarakatan.¹⁰⁷

Melalui pertimbangan dan melihat bahwa secara fakta anggota Ormas-ormas yang tergabung di dalam KINO Hasta Karya tidak semuanya berkeinginan untuk memisahkan diri sebagai Organisasi pendukung Partai Golkar. Sehingga Ormas Soksi, Kosgoro 1957¹⁰⁸, Ormas MKGR tetap menjadi bagian dari Ormas yang tergabung dalam Hasta Karya bersama Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Al Hidayah dan Satkar Ulama Indonesia. Masuknya organisasi-organisasi massa yang berbasis Islam sebagai organisasi sayap dan pendukung partai Golkar tidak terlepas dari untuk mengikat organisasi Islam yang melakukan dakwah seperti MDI, Satkar Ulama, Al Hidayah agar tidak melakukan dakwah yang bersifat mencaci-maki atau menghina Pemerintahan pada masa Orde Baru.¹⁰⁹

Terlibatnya kelompok organisasi massa Islam sekaligus sebagai wadah untuk mengantisipasi lahirnya kelompok Islam yang bergaris keras seperti DI/TII pada zaman Pemerintahan Soekarno. Umat Islam Indonesia sendiri merupakan kekuatan sosial yang potensial bagi legitimasi Orde Baru, sehingga Golkar mengakomodasi kepentingan Ormas Islam yang tergabung di dalam organisasi sayap agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.¹¹⁰ Kelompok Islam yang tergabung di dalam organisasi Gabungan Usaha Perbaikan pendidikan Islam (GUPPI) merasakan keuntungan apabila bergabung di dalam Golkar Orde Baru. Hasbullah Bakri salah satu juru kampanye Golkar dari GUPPI berpendapat bahwa :

“Apa sebabnya umat islam harus mendukung GUPPI dan Golkar, pertama Golkar melakukan pembangunan yang nyata dan bermanfaat dan di dalam terminology islam disebut ‘amal saleh’. Kedua, Golkar ingin

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 116

¹⁰⁸ Kosgoro 1957 merupakan hasil pemisahan diri terhadap Kosgoro yang dipimpin oleh Hayono Isman sedangkan Kosgoro 1957 dipimpin oleh Agung Laksono hasil Musyawarah Besar Kosgoro ke delapan tahun 2000.

¹⁰⁹ Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980 dari Pemilu samapi Malari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992. hlm. 194.

¹¹⁰ Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2009. hlm. 317.

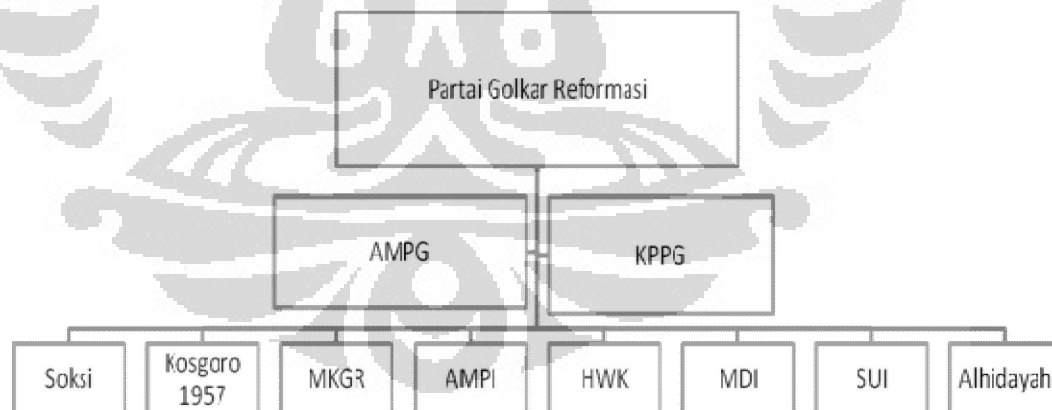
menghilangkan bekas-bekas dan hasil-hasil yang negative dari aktivitas parpol dalam membina Pemerintah negara selama ini dalam hal ini adalah perjuangan ideologi politik. Ketigam Golkar mempunyai rencana pembangunan yang menuju masyarakat adil dan makmur yang telah dibuktikan pelaksanaannya tidak sekedar omong kosong. Keempat, Golkar jelas mempunyai rencana yang baik untuk pembangunan Islam di Indonesia. Kelima, tidak ada satupun alasan yang menghalangi umat Islam menyokong Golkar.¹¹¹

Masuknya Ormas-ormas Islam ke dalam tubuh Golkar dan masih bertahan hingga pada masa Partai Golkar Reformasi dapat dipahami telah berakar dari sejak Orde Baru. Ormas-ormas Islam tersebut tetap menjadi bagian di dalam sayap pendukung Partai Golkar Reformasi meskipun peranan ormas Islam tidak signifikan dirasakan terutama di dalam mempengaruhi kebijakan Partai Golkar. Ormas Islam hanya menjadi saluran agar Golkar tetap menampung aspirasi masyarakat Islam Indonesia yang heterogen namun tidak radikal.¹¹²

Bagan 2.1.

Bagan Organisasi Sayap

Pendukung Partai Golkar Reformasi



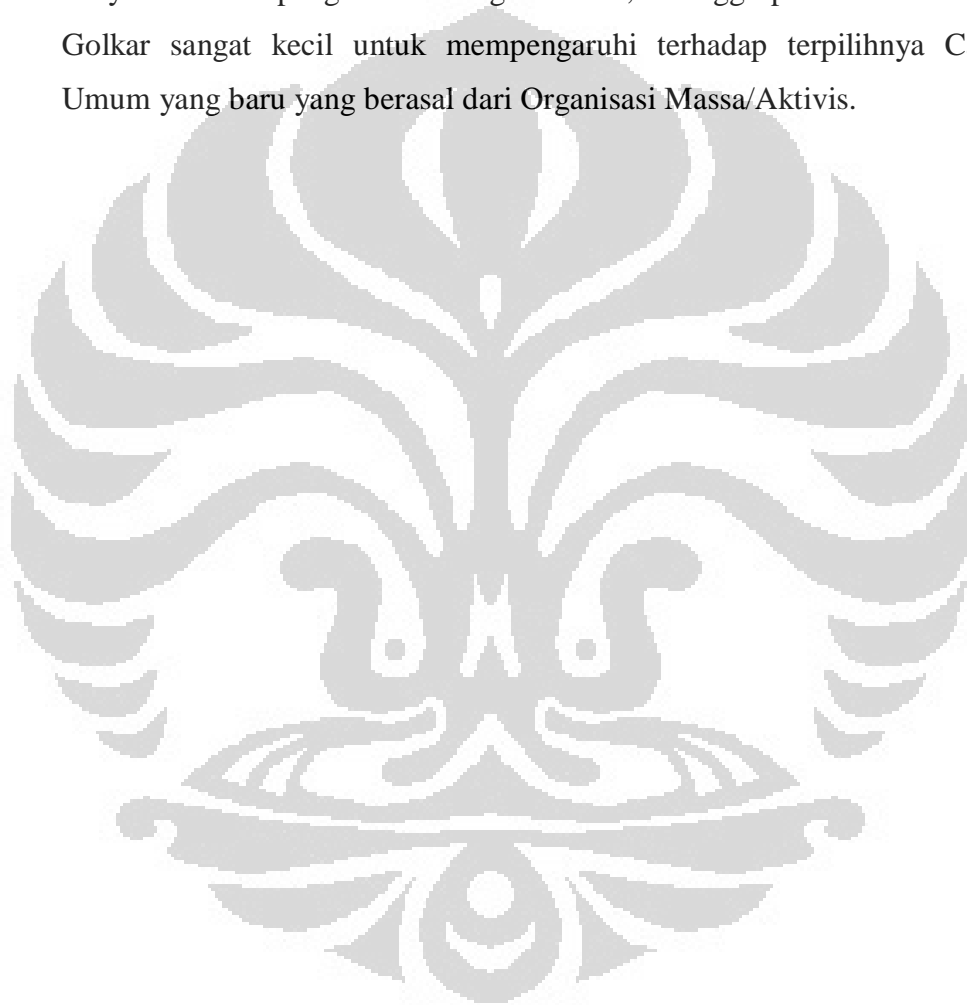
Data diolah dari berbagai Sumber.

Pembentukan Ormas-ormas sayap pendukung Partai Golkar Reformasi secara struktural memperkuat basis dukungan bagi Partai Golkar menghadapi

¹¹¹ Heru Cahyono, *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹¹² *Ibid*, hlm. 194.

Pemilu baik legislatif maupun Presiden. Akan tetapi meskipun di dalam pembentukan Ormas-ormas sayap bertujuan untuk membangun jaringan dan kerjasama yang lebih efektif di dalam membangun citra Partai Golkar, namun di dalam penentuan terpilihnya seorang bakal calon Ketua Umum yang baru sangat kecil, disebabkan hak suara yang dimiliki oleh pengurus Golkar di DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II. Ormas-ormas sayap pendukung Partai Golkar Reformasi hanya memiliki pengaruh di Tingkat Pusat, sehingga posisi tawar Ormas Sayap Golkar sangat kecil untuk mempengaruhi terhadap terpilihnya Calon Ketua Umum yang baru yang berasal dari Organisasi Massa/Aktivis.



BAB III

PEREBUTAN KEKUASAAN KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PASCA ORDE BARU

Pada bagian bab ke-tiga ini membahas pertarungan kursi Ketua Umum Golkar pada masa reformasi. Perebutan posisi tertinggi di dalam Partai Golkar dilakukan melalui proses demokrasi internal Golkar yang dikenal dengan Musyawarah Nasional (Munas). Di dalam bab ini terdiri dalam sub-bab yaitu Munaslub 1998, Munas Golkar ke-VII 2004 dan Munas Golkar ke-VIII 2009. Dalam sub-bab akan dijelaskan kondisi politik yang dihadapi Golkar dalam mengadakan Munas, kontestasi antar faksi dalam Munas serta strategi politik dari pemenang Ketua Umum pada Munas. Ke-tiga sub-bab menjadi penjelasan penting yang menggambarkan Munas Golkar yang berlangsung dan melahirkan Ketua Umum Golkar yang baru.

3.1. PENERAPAN DEMOKRASI DALAM MUNAS GOLKAR REFORMASI

Posisi Ketua Umum di dalam Partai Golkar pasca Orde Baru menjadi perebutan kader-kader Golkar di dalam internal Partai. Hal ini disebabkan Partai Golkar merupakan kendaraan politik yang besar dan menjanjikan bagi para kader untuk dapat berpeluang menaiki tahta kekuasaan di dalam Pemerintahan.¹¹³ Dengan tidak adanya lagi sistem *patron-client*, dimana sang patron yaitu Soeharto telah dihapuskan di dalam struktur tertinggi dalam menentukan posisi Ketua Umum dan pengurus Golkar tingkat Pusat, mendorong terjadinya persaingan terbuka serta melalui mekanisme demokrasi internal Partai Golkar yaitu Munas dalam menentukan posisi Ketua Umum Golkar.¹¹⁴

¹¹³ Hajriyanto Y. Thohari, *Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik tentang Golkar*, The Hajriyanto Center, Surakarta, 2004. hlm. 162

¹¹⁴ Akbar Tandjung, *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007. hlm 93.

Posisi kesetaraan dan hak yang sama bagi setiap kader untuk dapat memiliki kesempatan menjadi seorang Ketua Umum Partai Golkar yang baru menjadikan tidak adanya perbedaan antara kader yang baru dan dengan kader Golkar yang telah lama pengabdianya. Prestasi dan loyalitas pengabdian yang lama di dalam kepengurusan Pusat Partai Golkar akan dapat dengan mudah dikalahkan dengan kader-kader baru yang memiliki sumber daya politik lainnya seperti kekuatan finansial yang besar serta pengaruh posisi jabatan strategis di dalam Pemerintahan apabila nilai-nilai ideal yang harus dimiliki seorang Ketua Umum Partai tidak menjadi pertimbangan kuat bagi para kader-kader di dalam memilih Ketua Umum yang baru.¹¹⁵

Posisi tertinggi di dalam organisasi Golkar yang sejatinya pada masa Orde Baru berada dibawah kekuasaan Ketua Dewan Pembina Golkar yaitu Soeharto. Posisi Ketua Umum pada masa Orde Baru hanyalah posisi yang menjalankan setiap instruksi dari Ketua Dewan Pembina. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kepentingan Soeharto untuk menjadikan Golkar sebagai kekuatan sosial politik pemerintahan Orde Baru. Pada masa Reformasi dimana kekuasaan Soeharto tidak lagi mendapat legitimasi di dalam rakyat, sekaligus di dalam mengurus Golkar. Oleh sebab itu pemilihan Ketua Umum yang baru melalui Munas/Munaslub merupakan suatu hal yang baru bagi Organisasi Golkar dimana pada masa Orde Baru mekanisme organisasi Golkar sangat tidak demokratis sesuai dengan petunjuk dan arahan 'empunya' Orde Baru. Sehingga momentum diadakannya proses demokrasi internal dalam memilih Ketua Umum yang baru berdasarkan mekanisme demokrasi internal Partai Golkar yang disebut Munas/Munaslub merupakan hal yang pertama dilakukan oleh Partai di Indonesia dan sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan organisasional Golkar yang meninggalkan nilai-nilai *patron-client* menjadi proses demokrasi di dalam tubuh Organisasi.

¹¹⁵ Alan Warre, *Political Parties and Party Systems*, New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 259.

3.2. MUNASLUB GOLKAR 1998

Pasca keputusan Soeharto untuk tidak meneruskan kembali posisinya sebagai Presiden RI hingga tahun 2003, Golkar mengalami kegamangan tidak hanya hilangnya patron utama yang menjadi dalang utama dalam setiap kegiatan organisasi Golkar namun juga menjadi permasalahan bagi Golkar disebabkan Soeharto tidak lagi menunjukkan minat politiknya dengan terlihat tidak memakai wewenangnya untuk dapat mempengaruhi proses-proses politik di internal Golkar. Hal ini mendorong manuver politik yang dilakukan Harmoko yang menolak mendukung kembali/menyarankan agar Soeharto mengundurkan diri selaku Presiden. Tak pelak mendorong terjadinya polarisasi di dalam tubuh partai Golkar yaitu kubu yang mendukung dan tidak mendukung bagi pengunduran diri Soeharto.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut diadakan Rapimnas pada 3 Juni 1998 di Jakarta dalam upaya menyelesaikan permasalahan internal Golkar pasca pengunduran diri Soeharto. Perdebatan di dalam suasana Rapimnas didominasi oleh permasalahan yaitu mengenai pernyataan sikap dari Harmoko yang meminta agar Soeharto mundur tidak dikoordinasikan kepada seluruh pengurus DPP Pusat namun seolah-olah menjadi pernyataan sikap DPP Pusat secara keseluruhan.¹¹⁶

Seperti apa yang dituturkan oleh Fahmi Idris yaitu :

“Mundurinya Pak Harto sebagai presiden telah menimbulkan pertentangan dalam tubuh Golkar. Konflik itu sendiri diawali oleh pernyataan Ketua MPR/DPR yang juga Ketua Umum Golkar Harmoko yang meminta agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden. Karena pernyataan itulah barisan orang-orang dalam tubuh Golkar yang anti-reformasi menganggap bahwa Harmoko tidak layak menjadi Ketua Umum Golkar, Harmoko dianggap tidak loyal, membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Pak Harto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.¹¹⁷

Meskipun tidak semua kelompok yang mempermasalahkannya dengan menimbang kondisi perpolitikan nasional yang tidak menguntungkan bagi Golkar apabila terus mempertahankan Soeharto. Namun kelompok yang melihat langkah

¹¹⁶ Stanley dkk. *Golkar Retak?*, Institut Arus Informasi, Jakarta, 1999, hlm. 99.

¹¹⁷ Saya kutip dari wawancara Fahmi Idris dengan *Tempo Interaktif*, tanggal 17 Mei 1998, di Jakarta. <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/16/nas3.htm> diakses pada 12 Mei 2012.

Harmoko sebagai pengkhianatan meminta agar Harmoko segera mundur dari jabatan Ketua Umum dan segera diadakan Munaslub.

Dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi politik pada saat pasca mundurnya Soeharto dari Kekuasaan Pemerintahan, maka diperlukan langkah cepat mengkoordinasikan seluruh fungsionaris dan pimpinan Organisasi Golkar melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapimnas yang dilangsungkan pada 3 Juni 1998 tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan yaitu dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan Golkar, maka perlu dilakukan reformasi Golkar dengan:

- a. menyelenggarakan Munas Luar Biasa selambat-lambatnya bulan Juli 1998.
- b. Musda Tingkat I dan Tingkat II diselenggarakan segera setelah Munas Luar Biasa
- c. Agenda dalam Munas Luar Biasa sesuai kewenangan diadakan perubahan AD/ART dan segala sesuatu kewenangan diadakan perubahan AD/ART dan segala sesuatu yang menyangkut reformasi Golkar.

Menyadari dengan seksama bahwa dirinya tidak lagi mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang dekat Soeharto menjadi Ketua Umum Golkar, Harmoko mendukung penuh keinginan kader Golkar untuk segera melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Umum yang baru dan melakukan perubahan di dalam AD/ART organisasi Golkar. Namun tidak semua kader Golkar menginginkan perubahan dengan meninggalkan pengaruh “cendana” di tubuh Golkar. Hal ini menjadi sangat mudah dipahami karena anak-anak Soeharto yang menduduki posisi-posisi penting di dalam tubuh organisasi Golkar, seperti Mbak Tutut yang menduduki salah satu ketua di kepengurusan DPP Pusat dan Bambang Trihatmodjo yang mendapat posisi bendahara umum tetap menginginkan agar Golkar masih dibawah pengaruh keluarga “cendana”.

3.2.1. Kontestasi Faksi “Militer+Cendana” Dengan Faksi “Sipil” pada Munaslub 1998.

Pertarungan perebutan kekuasaan kursi Ketua Umum Golkar sesungguhnya telah dimulai pada saat pertarungan penentuan kepanitian Munaslub 1998. Dalam menentukan pihak panitia Munaslub menjadi permasalahan tersendiri disebabkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar yang baru kepanitian Munaslub merupakan hal yang dapat mempengaruhi hasil terpilihnya seorang bakal calon Ketua Umum yang baru. Pada saat Orde Baru, seluruh kepanitiaan dan Kepengurusan DPP pada saat Munas telah ditentukan oleh Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar. Sesungguhnya telah ditetapkan panitia untuk menghadapi Munas ke-enam pada saat sebelum Soeharto mundur, akan tetapi terjadi penolakan diantara pengurus DPP Golkar pada saat itu.

Pada saat pertarungan pembentukan kepanitian Munaslub diwarnai persaingan dua kubu besar yang berkepentingan untuk memegang kendali Organisasi Golkar dengan menyukseskan anggota-anggotanya menjadi kepanitian Munaslub. Kubu yang bertarung yaitu kelompok Edi Sudrajat dikenal dengan sebutan kelompok Anti-Reformis yang beranggotakan kelompok keluarga besar ABRI yang tergabung di dalam PEPABRI, serta orang-orang yang memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto seperti Waskito, Ary Moerdjono, Sarwono Kusumaatmadja. Sedangkan kubu yang berkepentingan mendukung Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Golkar yang baru yaitu dikenal dengan kelompok Reformis terdiri kelompok Habibie yang tergabung dalam Iramasuka, beberapa Organisasi Massa seperti HMI, Ormas Islam sayap organisasi Golkar serta beberapa fungsionaris Golkar seperti Harmoko, Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, dan Fadel Muhamad.

Adanya Kubu Reformis dan Anti-Reformis di dalam pertarungan menjelang Munaslub didasarkan kepada perbedaan ideologi dan agenda politik terkait masa depan Golkar. Kubu Reformis menginginkan agar sesuai dengan tuntutan reformasi yaitu untuk menghapuskan segala pengaruh ABRI di dalam kehidupan politik sipil termasuk di dalam organisasi Golkar, dan menjadikan Organisasi Golkar menjadi mandiri dengan melepaskan segala atribut-atribut yang

berkaitan dengan kekuasaan Orde Baru. Kubu Reformis memperjuangkan agar Golkar dapat diterima sebagai Partai politik baru yang sesuai dengan semangat reformasi terutama menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan Soeharto. Kubu anti-reformis memiliki agenda untuk menghukum kelompok Habibie dan Harmoko yang dianggap telah mengkhianati Soeharto sebagai orang telah berjasa besar terhadap mereka secara pribadi maupun dalam membesarkan Golkar. Kelompok anti-reformis memiliki kepentingan apabila berhasil menduduki posisi Ketua Umum Golkar dan berhak menentukan kepengurusan Golkar yang baru, maka dapat digunakan sebagai kekuatan untuk menekan Habibie turun dari Pemerintahan.

Sukarnya menemukan kesepakatan akibat di dalam pembentukan kepanitian Munaslub terjadi persaingan dalam kepentingan kubu reformis dan anti-reformis, sehingga diambil keputusan melalui rapat pengurus DPP Golkar untuk menentukan Panitia Munaslub, maka dibentuklah tim tujuh. Tim tujuh yaitu yang beranggotakan Abdul Gafur, Bambang Trihatmodjo, Ary Mardjono, Waskito Reksosoedidjo, Aulia Rachman, Agung Laksono dan Moestahid Astari. Ke-tujuh orang yang tergabung dalam upaya pembentukan panitia Munaslub merupakan wakil dari anggota kedua kubu yang bertarung menjadikan kandidatnya sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Setelah terbentuk panitia Munaslub, pada tanggal 15 Juni 1998 dengan dihadiri oleh 43 Pengurus DPP Golkar diadakan voting dalam dua tahap yaitu:

1. Menentukan panitia penyelenggara. Pada tahap ini calon yang bertarung yaitu Waskito Reksosoedirdjo, Pinantun Hutasoid dan Agung Laksono. Pinantun Hutasoid mengundurkan diri, sehingga tinggal Waskito dan Agung Laksono yang memperebutkan posisi Panitia Penyelenggara. Waskito mendapat 23 suara sedangkan Agung Laksono mendapatkan 19 Suara. Waskito menjadi Ketua Panitia Penyelenggara.
2. Menentukan panitia pengarah. Calonnya adalah Ary Mardjono, Abdul Gafur, Moestahid Astari. Hanya Ary dan Gafur yang bertahan, Ary mendapatkan

27 suara dan Gafur 16 suara. Ary Mardjono keluar sebagai Ketua Panitia Pengarah.

3. Panitia pelaksana dipegang oleh Aulia Rachman karena dimenangkan secara aklamasi.

Kemenangan anggota-anggota yang berasal dari kubu Edy Sudrajat (kubu anti-reformis) menjadi pesan kewaspadaan terhadap kubu Akbar Tandjung mengenai peluangnya dalam Munaslub. Sinyalmen yang dapat ditangkap oleh Kubu Reformasi adalah bahwa kubu Edy Sudrajat memiliki koordinasi dan kematangan di dalam pertarungan yang bersifat voting. Hal ini harus diwaspadai mengingat mekanisme pada saat Munaslub akan melalui proses voting kembali dimana hak suara diserahkan kepada pengurus Golkar DPD Provinsi yang berjumlah 27 orang dari wakil tiap DPD Golkar tingkat Provinsi di Indonesia. Kubu Akbar Tandjung menyadari bahwa perlu strategi lain dan pendekatan khusus yang harus dilakukan kepada pemegang suara Munaslub. Posisi kubu Akbar Tandjung tidak lebih menguntungkan dibandingkan kubu Edy Sudrajat mengingat mayoritas kepengurusan Golkar di Tingkat Provinsi maupun posisi Gubernur dipegang oleh Purnawirawan ABRI. Edy Sudrajat sendiri memiliki posisi dan pengaruh yang kuat untuk bisa mengerahkan para purnawirawan ABRI tersebut untuk memilihnya mengingat Edy Sudrajat pada saat itu adalah Ketua keluarga besar purnawirawan ABRI yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI).

Menjelang Munaslub dimulai dengan sudah terbentuknya Panitia Munaslub, maka tinggal menentukan tata-tertib di dalam Munaslub yang akan diselenggarakan. Pada saat penentuan di dalam tata-tertib pimpinan Munaslub, disepakati akan lebih tepat apabila bersifat kolektif yang terdiri atas satu wakil Dewan Pembina, dan dua orang wakil DPP, 4 Ketua DPD I dan wakil DPD-DPD I Golkar. Hal ini untuk menjaga netralitas dan tidak adanya dominasi salah satu kubu di dalam menentukan tata-tertib Munaslub. Kejadian yang menarik pada saat sebelum Munaslub berlangsung yaitu pada saat terjadi friksi antar pimpinan ketika Try Sutrisno maju dengan mengeluarkan surat yang menunjuk Siswaono Yudhusodo sebagai pemegang mandat dari Dewan Pembina, namun hal itu

ditolak oleh Akbar Tandjung dan menilai surat tersebut tidak sah karena hanya ditandatangani sepihak oleh Try Sutrisno tidak melalui rapat Dewan Pembina.¹¹⁸ Hal ini terlihat tidak hanya sebagai ketegangan diantara anggota Dewan Pembina, namun pengaruh Soeharto di dalam menentukan kebijakan organisasi pada saat itu masih belum lepas secara seutuhnya.

3.2.2. Kemenangan Akbar Tandjung (Faksi Sipil) pada Munaslub 1998

Pada saat pemilihan Munaslub dengan agenda pemilihan Ketua Umum, faksi-faksi reformis dan anti reformis kembali bertarung. Edi Sudrajat sebagai wakil yang dijagokan dari faksi anti-reformis yang terdiri dari fungsionaris Golkar yang masih memiliki kedekatan dengan keluarga cendana yaitu Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudohusodo, Tarmizi Taher, Hayono Isman, Haryanto Danutirto, Subiakto Tjakrawerdya. Sedangkan Kubu Habibie dan Harmoko yang merupakan kelompok jalur G (Golkar) menjagokan Akbar Tandjung. Pada saat pemilihan pertama guna menjaring calon Ketua Umum yang baru minimal harus mendapat dukungan dari 5 DPD. Pada saat putaran pertama menghasilkan, Akbar Tandjung memperoleh 15 suara, Edi Sudrajat 11 suara dan Sultan Hamengkubuwono 1 suara. Setelah mendapat calon Ketua Umum yang akan bertarung maka baru diadakan pemilihan Ketua Umum yaitu antara Akbar Tandjung dan Edi Sudrajat. Hasil penghitungan suara menghasilkan Akbar Tandjung mengantongi 17 suara, dan Edi Sudrajat mendapatkan 10 suara.

Kemenangan kubu reformasi yang mengusung Akbar Tandjung terhadap kubu anti-reformasi dibawah komando Edy Sudrajat menjadi hal yang tidak diduga sebelumnya mengingat pada saat voting pemilihan panitia Munaslub yang melibatkan para pemilik suara untuk memilih Ketua Umum pada Munaslub. Hal ini tidak pelak menjadi hal diluar perkiraan kubu Edy Sudrajat yang merasa telah secara mayoritas akan mendapatkan suara dari para purnawirawan ABRI yang menjadi pengurus DPD Tingkat satu Golkar. Beberapa fungsionaris Golkar yang mendukung kubu anti-reformis menuturkan bahwa kegagalan Edi Sudrajat

¹¹⁸ Kholid Novianto, M. Alfian Alfian M, Riyono Isman, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*, Sejati Press, Bekasi, 2004. hlm. 44.

disebabkan kematangan tim sukses dari kubu Akbar Tandjung melakukan kampanye/pendekatan terhadap pemegang suara seperti yang diutarakan oleh Sarwono Kusumaatmadja yaitu :

“Itulah politik. Karena Akbar sudah terbiasa bersaing, maka bersama kawan-kawannya, Akbar tahu dan paham caranya bisa menang. Akhirnya Akbar betul-betul kampanye. Sementara yang dilakukan Edi Sudrajat Cs. hanya mengandalkan Pepabri saja. Dan ternyata hasilnya tidak sekukuh yang disangka. Edi masih memegang kultur politik lama. Dianggapnya calon ketua umum masih seperti dulu. Seperti pengantin yang dipingit, tidak boleh bertemu orang sebelum hari h-nya tiba. Akhirnya Edi hanya terpaksa pada Pepabri dan tidak melakukan kampanye. Dalam munaslub, Akbar Cs. sudah tahu dan mencium peluang. Akbar Cs. leluasa kampanye dan tidak mendapat saingan dari kubu Edi. Saya sendiri sempat rikuh dan beberapa kali bilang ke Pak Edi, ini politik baru karena orang perlu kampanye untuk mencari dukungan”.¹¹⁹

Hal ini menyebabkan kelompok Edy Sudrajat yang seharusnya berada diposisi terdepan untuk memenangkan pertarungan kursi Ketua Umum menjadi tidak tercapai. Akbar Tandjung yang memiliki latar belakang dan jam terbang yang tinggi di dalam organisasi sekaligus aktivis mampu membaca dan memanfaatkan peluang untuk dapat memperoleh dukungan dari kelompok yang seharusnya telah mendukung Edi Sudrajat. Dilain pihak sosok Edi Sudrajat yang memiliki latar belakang dari TNI/ABRI dibesarkan oleh nilai-nilai yang berpegang teguh pada prinsip loyalitas penuh terhadap atasan. Hal ini tampaknya tidak berlaku pada para Purnawirawan yang terbukti mendukung dengan memberikan suaranya kepada Akbar Tandjung.

Kekuatan jaringan PEPABRI yang diandalkan oleh Edi Sudrajat untuk mengalahkan kubu Akbar Tandjung yang didukung oleh Habibie, kenyataannya membelok dan memberikan dukungannya terhadap pesaing Edi Sudrajat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh Edi Sudrajat yang tidak melakukan kampanye dan pendekatan khusus terhadap jaringan Pepabrinya namun juga disebabkan dukungan dari Wiranto terhadap Akbar Tandjung untuk menjadi Ketua Umum. Seperti yang dituturkan oleh Sarwono Kusumaatmadja yaitu :

¹¹⁹ Saya kutip dari wawancara *Tempo Interaktif* dengan Sarwono Kusumaatmadja tanggal 14 Juli 1998, sumber <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/20/lapsus2.htm> pukul 14.00 hari Selasa, 6 Mei 2012.

“Habibie perlu dukungan ABRI, dan Wiranto juga memerlukan Habibie. Walaupun Wiranto tetap loyal pada Soeharto, masa depan Wiranto sudah bukan pada jamannya Soeharto yang kini sudah kehabisan orang. Omong kosong jika anak-anak Soeharto seperti Bambang Trihatmodjo merupakan ancaman Golkar. Nyatanya mereka hanya hadir sebentar saat pembukaan munaslub. Akbar memasukkan Wiranto dalam permainannya karena orang-orang Akbar jago kampanye. Wiranto merupakan bagian kampanyenya pendukung Akbar. Dugaan saya mungkin mengukuhkan Wiranto supaya tetap berada di posisi Pangab”.¹²⁰

Menjadi sangat mudah dipahami dukungan Wiranto terhadap kubu Akbar Tandjung mengingat kelompok Habibie yang mendukung penuh agar Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Golkar. Dilain pihak meskipun Edi Sudrajat menjadi ketua PEPabri serta memiliki kedekatan emosional dengan pengurus Golkar di tingkat Provinsi, namun posisi Wiranto yang menjabat sebagai Panglima TNI pada saat itu secara struktural organisasi lebih menguntungkan untuk memberikan pengaruh terhadap para purnawirawan ABRI yang duduk sebagai Ketua DPD Golkar tingkat 1, seperti yang dituturkan oleh Rully Chairul Azwar salah satu tim sukses Akbar Tandjung mengatakan :

Meskipun Edi Sudrajat didukung oleh keluarga besar purnawirawan TNI yaitu pak Try Sutrisno sebagai Ketua Umum PEPABRI pada saat itu, akan tetapi Wiranto yang menjabat sebagai Panglima TNI dan telah terbiasa menjadi mitra keluarga besar Golkar yaitu sebagai wakil dari Jalur ABRI. Pada saat itu Jalur B yaitu Birokrasi dipegang oleh Mendagri Yogi S. Memed, sedangkan Jalur Golkar meskipun pada saat itu dipegang oleh Harmoko tidak bisa seenak jidat. Harus mendapat dukungan dari pak Wiranto, karena secara struktural yaitu Kasospol dan Asospol masih dipegang oleh pak Wiranto sebagai Panglima TNI. Disitulah terjadi tarik menarik kepentingan antara Habibie dan Wiranto, dimana Habibie meminta Wiranto untuk melakukan lobi dengan koneksi dan seluruh Purnawirawan TNI yang berada dibawah Kasospol dan Pangab dan tampaknya itu berhasil.¹²¹

Disamping itu pula sesungguhnya ikatan yang terjadi antara kelompok Edi Sudrajat dan beberapa Fungsiaris Golkar yang mendukungnya terlihat tidak solid dan tidak memiliki kesamaan visi yang jauh kedepan seperti apa yang dituturkan oleh Fahmi Idris yaitu :

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Wawancara dengan Rully Chairul Azwar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012. pukul 14.00.

“Aliansi mereka sangat rentan. Sulit membayangkan ada kerjasama antara Sarwono, Siswono, dengan Tutut dan Bambang Tri. Jadi, aneh kalau mereka tidak rentan. Karena selama ini Siswono dan Sarwono juga berdiri di barisan reformis. Yang menyatukan mereka hanya kepentingan jangka pendek. Karena kepentingan jangka pendek membuat mereka tidak memiliki visi. Yang ada hanyalah keinginan untuk kembali berkuasa, dan saya tidak bisa membayangkan jika kekuasaan dipegang orang-orang yang anti-reformasi. Ini akan sangat berbahaya”.¹²²

Kondisi pada saat itu dimana masyarakat sangat gencar menyuarakan semangat reformasi, dengan menghapuskan segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan Orde Baru menyebabkan suara-suara dan brand yang berkaitan dengan reformis lebih mendapat simpati dan dukungan dari rakyat serta organisasi massa daripada suara yang anti-reformis.¹²³ Oleh karena itu adanya tuntutan dan keinginan dari kelompok terutama yang dimotori oleh Akbar Tandjung agar membersihkan pengaruh TNI di dalam Golkar agar organisasi Golkar tidak semakin terpuruk dan sesuai dengan tuntutan semangat reformasi, seperti yang dituturkan oleh Firman Subagyo yaitu :

“Memang pada saat itu (Munaslub 1998), Bang Akbar dan teman-teman melihat, dalam pandangan mereka yaitu kalau Golkar dipimpin oleh Militer di dalam Golkar, mungkin akan semakin terpuruk karena kondisi masyarakat pada saat itu sangat anti dengan kekuatan TNI yang berafiliasi dengan kekuatan politik”.¹²⁴

Kemenangan Akbar Tandjung juga sangat dipengaruhi disamping mendapat dukungan penuh dari dari kelompok Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Kawasan Timur) yang merupakan kelompok loyalis Habibie, namun juga tidak terlepas dari pengaruh dan kekuatan organisasi massa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang merupakan organisasi sayap Golkar pada zaman Orde Baru. Kekuatan jaringan HMI dalam mensukseskan

¹²² Saya kutip dari wawancara Fahmi Idris dengan *Tempo Interaktif*, tanggal 17 Mei 1998. Sumber Internet <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/16/nas3.htm> diakses pada 9 Mei 2012, Pukul 14.35.

¹²³ Rully Chairul Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era, dari Partai Hegemonik ke Partai Beorientasi Pasar*, PT Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 143

¹²⁴ Wawancara Firman Subagyo Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011

kemenangan Akbar Tandjung dapat dilihat dari ‘petinggi’ HMI yang bersatu di dalam kubu yang sama yaitu Fahmi Idris yang juga salah satu aktivis HMI Senior.

Meskipun HMI tidak memiliki suara di dalam pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru pada Munaslub 1998, namun demonstrasi dan tekanan terhadap upaya reformasi di dalam tubuh Golkar dengan menggelar spanduk-spanduk yang berisikan anti-ABRI dan anti-Soeharto mendapat simpati publik dan fungsionaris Golkar lainnya. Sehingga banyak fungsionaris Golkar yang mendukung dan bersatu membantu memenangkan Akbar Tandjung sesungguhnya tidak semua memiliki visi yang sama mengenai reformasi penuh di dalam tubuh Golkar, namun ingin menyelamatkan diri dari tuntutan reformasi karena sebagian besar fungsionaris Golkar pada zaman Orde Baru merasakan masa depan Partai Golkar yang suram.¹²⁵

Duet Akbar Tandjung dan Fahmi Idris yang memiliki latar belakang dari organisasi massa yang sama menjadikan kekuatan yang besar dibawah bendera HMI yang satu. HMI merupakan organisasi massa yang telah lama dan besar dan memiliki kepengurusan cabang organisasi hingga hampir keseluruhan provinsi besar di Indonesia pada zaman Orde Baru. Oleh sebab itu HMI menjadi kendaraan dan organisasi penekan yang kuat di daerah-daerah guna mengerahkan massa HMI mendukung kemenangan Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Golkar yang baru.

Gabungan antara kekuatan kelompok Habibie dan posisi Habibie sebagai kepala Pemerintahan yang mampu mengerahkan Wiranto untuk melakukan konsolidasi dengan Kasospol dan Asospol para purnawirawan ABRI yang berada di struktur pengurusan Golkar di tingkat Provinsi serta HMI sebagai basis massa penekan untuk menekan agar kepengurusan Golkar yang baru bersih dari sisa-sisa kekuasaan Orde Baru yaitu orang-orang yang memiliki hubungan emosional dan kedekatan dengan keluarga Soeharto.

¹²⁵ Wawancara dengan Rully Chairul Azwar. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

Setelah berhasil menjadi Ketua Umum Golkar pertama pasca Orde Baru, Akbar mengeluarkan beberapa keputusan penting di dalam Munaslub yaitu *pertama*, melakukan revisi AD/ART Golkar dimana institusi Dewan Pembina dihapuskan di seluruh jajaran Organisasi, digantikan oleh Dewan Penasehat yang berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan, namun tidak mempunyai hak veto sebagaimana Dewan Pembina. *Kedua*, dihapuskannya jalur A (ABRI) dan jalur B (Birokrasi) di dalam jalur pendukung organisasi Golkar seperti pada zaman Orde Baru.

Pasca terpilihnya Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Golkar yang baru, tidak berlebihan apabila Golkar dilihat menjadi sebuah Golkar yang baru. Hal ini mengingat Golkar telah melepaskan diri secara penuh terhadap segala pengaruh dari Soeharto terutama di dalam pendanaan Partai Golkar. Dengan berani memandirikan Golkar tidak lagi bergantung kepada dana yang berasal dari Yayasan Dakab dibawah kepemimpinan Soeharto, menjadikan Golkar tidak lagi dicap sebagai Partai “mesin pemerintahan Orde Baru”.

Kemenangan Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 menjadi tonggak pertama bagi kemenangan jalur G (Golkar) dan menjadikan Partai Golkar hanya menerima satu jalur untuk bisa menjadi keanggotaan Organisasi Partai Golkar yaitu hanya melalui jalur G. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi identifikasi dan konsolidasi di dalam tubuh organisasi Partai Golkar. Namun juga menghentikan kekuatan-kekuatan faksi di dalam tubuh Golkar yang menggunakan pangkat “bintang” untuk menekan dan mempengaruhi keputusan organisasi Partai Golkar. Kemenangan Akbar Tandjung juga memberikan semangat bagi para kader Golkar yang berlatar belakang dari organisasi sayap, masuk menjadi posisi tertinggi di dalam Partai melalui proses jenjang karir dan pengabdian yang lama. Sehingga tidak ada pengkaderan instan dan mekanisme pimpinan Partai Golkar berdasarkan prinsip merit-system.

3.3. MUNAS PARTAI GOLKAR KE-VII (TUJUH) 2004

Munas Partai Golkar ke-VII (tujuh) yang dilaksanakan pada 15-20 Desember 2004 menjadi momentum bagi kebangkitan Partai Golkar terbukti keberhasilannya dengan memenangkan Pemilu Legislatif 2004. Menduduki posisi pertama sebagai Partai yang mendapatkan suara terbanyak di dalam Pileg 2004 memberikan kembalinya rasa percaya diri bagi Partai Golkar sebagai Partai yang besar dan tidak bergantung pada kekuatan selain kemampuan yang dimiliki di dalam tubuh organisasi sendiri. Menjadi Partai yang memenangkan pemilihan Legislatif 2004 memberikan keuntungan bagi Partai Golkar untuk bisa mengendalikan kekuasaan Legislatif.

Keberhasilan Partai Golkar dalam Pemilihan Legislatif 2004 menjadi 'obat luka' bagi para kader Golkar akibat kegagalan pasangan Capres Wiranto-Siswono Yudohusodo yang diusung Partai Golkar di dalam Pilpres 2004. Kegagalan Capres duet Wiranto-Siswono yang diusung partai Golkar tak pelak menimbulkan keretakan dan berkembangnya isu bahwa tidak adanya soliditas dan komunikasi yang baik dengan kader-kader Golkar hingga ke pelosok daerah akibat dukungan setengah hati dari Akbar Tandjung selaku Ketua Umum.¹²⁶ Tak pelak hal ini kemudian mendorong terjadinya upaya yang dilakukan oleh beberapa fungsionaris Golkar yang meminta agar Akbar Tandjung mundur akibat kegagalan Capres yang diusung oleh Partai Golkar sendiri dan pada putaran kedua justru mendukung pasangan Capres Megawati-Hasyim Muzadi dari Partai PDI-P yang memiliki historis sebagai oposisi Golkar pada masa Orde Baru.¹²⁷

Kegagalan pada Pilpres 2004 dan kemenangan pada Pileg 2004 menjadi pengantar dalam persiapan mengadakan Munas Golkar ke-tujuh di Bali dalam agenda melakukan pidato pertanggung jawaban Akbar Tandjung selaku Ketua Umum periode 1998-2004 sekaligus mengakhiri masa jabatan lima tahunan.

¹²⁶ Dirk Tomsa, "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive Regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", *Indonesia*, April 2006, ProQuest Research Library hlm 20.

¹²⁷ lihat *Tempo Interaktif*, "Fahmi Idris Cs. Minta Akbar Tandjung Mundur", Rabu 22 September 2004. melalui situs <http://www.tempo.co/read/news/2004/09/22/05548375/Fahmi-Idris-Cs-Minta-Akbar-Tandjung-Mundur> diakses pada 14 Mei 2012.

Munas Golkar ke-tujuh yang dilaksanakan di Hotel Nusa Bali, juga dipersiapkan untuk melakukan pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru untuk membentuk kepengurusan DPP Golkar yang baru masa jabatan 2004-2009. Hal ini sekaligus juga sebagai langkah awal persiapan menghadapi Pilpres 2009.

3.3.1. Pertarungan Faksi Akbar Tandjung (Faksi “Struktural”) Dengan Faksi Jusuf Kalla (Faksi “Saudagar Kaya”).¹²⁸

Seperti Munaslub 1998 dimana pertarungan politis telah dimulai pada saat pembentukan panitia Munas, perbedaannya pada saat Munaslub 1998 pembentukan kepanitiaan dilakukan melakukan mekanisme voting. Akan tetapi pada Munas 2004 di Bali pertarungan politis terutama yang dilakukan oleh kandidat yang berhak menentukan Kepanitiaan Munas yaitu dilakukan dengan penetapan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemilihan Ketua Umum pada Munas 2004. Seperti biasa dilakukan Rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan fungsionaris Partai Golkar dari tingkat Pusat, Ormas Sayap dan Pendukung serta Pimpinan DPD Tingkat 1. Rapimnas merupakan langkah pertama untuk menetapkan syarat-syarat dan mekanisme proses pemilihan Ketua Umum pada saat Munas. Rapimnas ke 10 yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2004 di Hotel Chandra, Jakarta selatan, telah ditentukan tata-tertib mengenai “aturan main” di dalam MUNAS ke-tujuh yang akan diadakan pada 15-20 Desember 2004 yaitu menyangkut terutama dua hal: *pertama*, menyangkut syarat-syarat kandidat calon Ketua Umum yang harus dipatuhi dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dianggap tidak sah untuk dapat mengikuti pemilihan calon Ketua Umum yang baru. *Kedua*, mengenai Hak Suara yang diberikan hanya pada tingkat DPD I.

Pada saat penyaringan kandidat calon Ketua Umum yang baru berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam AD/ART struktur organisasi Partai Golkar maka, hanya 3 orang calon yang memenuhi kriteria calon

¹²⁸ Saya kutip di dalam tulisan Akbar Tandjung, *Op. Cit.*, 303. Faksi Akbar Tandjung disebut sebagai faksi struktural karena merupakan faksi yang memegang jabatan struktur di kepengurusan DPP Pusat Golkar, sedangkan faksi Jusuf Kalla dikenal sebagai faksi saudagar karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha kaya.

Ketua Umum yang baru yaitu Akbar Tandjung selalu incumbent, Marwah Daud Ibrahim dan Slamet Jusuf Effendi¹²⁹. Nama-nama seperti Wiranto dan Jusuf Kalla berdasarkan aturan syarat seorang calon Ketua Umum yang baru tidak dapat lolos. Wiranto terganjal karena belum pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus DPD provinsi selama satu periode penuh. Sedangkan Jusuf Kalla terganjal karena di dalam Tar-tib juga ditentukan bahwa calon ketua umum adalah kader yang setia pada keputusan partai dan tak pernah berpaling ke partai lain (penjelasan mengenai pasal 12 ayat (d)).¹³⁰ Namun yang terjadi adalah Jusuf Kalla tetap bisa mecalonkan diri sebagai calon Ketua Umum. Hal ini mengingat Jusuf Kalla pernah menjadi kepengurusan di DPD Sulawesi dan memiliki sertifikat sebagai bukti pernah terlibat dalam kepengurusan DPD Golkar di Sulawesi.¹³¹

Pada saat Munas dibuka oleh Pimpinan sidang yaitu Abdul Gafur, Sekertaris sidang yaitu Tjok Gde Budi Suryawan, dan tiga anggota sidang lainnya yaitu H. Zoerman Manap, Ir. Ridwan Hisyam, dan Demas Paty SPd. Abdul Gafur selaku pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Ketua Umum DPP Golkar (1999-2004) untuk membacakan pidato pertanggung jawaban selama menduduki posisi Ketua Umum, yang kemudian diputarkan video bagaimana kiprah Partai Golkar yang terpuruk pasca Rezim Orde Baru yang kemudian bangkit dan menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2004 tidak terlepas dari peran sentral Akbar Tandjung yang berusaha mati-matian mempertahankan soliditas dan konsolidasi kader-kader di seluruh wilayah Indonesia. Tepuk tangan dan *standing ovation* dilakukan oleh peserta Munas pada saat Akbar Tandjung melakukan pidato penutup. Reaksi peserta Munas yang meneriakkan “hidup bang Akbar” menggetakan dan seolah memberikan isyarat kuat bahwa Akbar Tandjung akan terpilih kembali.

¹²⁹ Slamet Effendi Yusuf akhirnya mengundurkan diri sebelum masuk pada proses pemilihan kandidat Ketua Umum yang baru.

¹³⁰ Wawancara Muhammad Hatta sebagai Ketua Panitia Pengawas MUNAS ke-tujuh di Bali kepada SCTV.

¹³¹ Wawancara dengan Andi Matalata, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Periode 2004-2009. Jakarta, 7 Maret 2012.

Menariknya pada kondisi Munas sangat berubah 360 derajat sesaat pimpinan sidang Abdul Gafur membuka pembahasan mengenai pemilihan calon Ketua Umum yang baru. Pada saat itu pula calon Ketua Umum Jusuf Kalla yang secara verifikasi tidak lolos, namun dapat masuk ke dalam sidang Munas. Hal ini disebabkan Jusuf Kalla menggunakan satuan pengamanan Wakil Presiden untuk dapat memaksa masuk di dalam Munas dan satuan pengamanan Munas tidak dapat melawannya. Kondisi mulai ricuh dan Akbar Tandjung meminta agar pimpinan sidang menskors sidang. Namun para Peserta memaksa untuk terus dilanjutkan dan menekan pimpinan sidang untuk meneruskan sidang tanpa mengindahkan sosok Akbar Tandjung yang “mendapatkan tepuk tangan dua kali” karena jasanya mengantarkan Golkar menjadi pemenang Pemilu Legislatif.

2.3.2. Kemenangan Jusuf Kalla Pada Munas Golkar 2004

Akhirnya, Munas diundur disebabkan kondisi yang dirasakan tidak kondusif. Selang beberapa waktu, Jusuf Kalla mengklaim telah mendapatkan dukungan 28 DPD I dari total 36 suara DPD I dan optimis akan menjadi pemenang Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini kemudian mendorong Akbar Tandjung melakukan manuver politik dengan mengadakan sidang Paripurna lanjutan untuk melakukan perubahan di dalam pemberian hak suara di dalam pemilihan Ketua Umum yang baru. Hasil Paripurna tersebut memutuskan para pengurus DPD II diberikan hak suara menjadikan total suara ada 484 suara. Untuk bisa menjadi calon Ketua Umum harus mendapatkan minimal 150 suara. Manuver politik yang dilakukan oleh Akbar Tandjung dilakukan karena keyakinan Akbar Tandjung akan bisa dapat memenangkan pemilihan Ketua Umum karena ia didukung oleh Wiranto yang memiliki kedekatan dengan pengurus DPD II serta Akbar Tandjung yang meyakini bahwa kader tingkat *grass roots* memiliki loyalitas terhadap dirinya. Uniknya justru pada saat penghitungan suara belum dilakukan, Jusuf Kalla telah mengklaim ia mendapatkan 300 suara. Hasil Munas memenangkan kubu Jusuf Kalla dengan mendapatkan 323 suara, Akbar Tandjung 156 suara sedangkan Marwah Daud Ibrahim hanya 13 suara.

Yang paling menarik hasil temuan di dalam studi proses pemilihan Ketua Umum Golkar di MUNAS Bali adalah susunan AD/ART yang dapat diubah-ubah berdasarkan kebijakan dari Ketua Umum terutama menyangkut susunan peserta MUNAS yang boleh memilih/memberikan suara dalam Pemilihan Ketua Umum. Nuansa kepentingan politis oleh setiap calon Ketua Umum begitu kuat hingga aturan-aturan main dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Rapimnas menjadi sangat cair dan dapat diubah-ubah sesuai kepentingan para kandidat calon Ketua Umum.

Pencalonan Jusuf Kalla menjadi perhatian banyak pihak tidak hanya disebabkan posisinya sebagai Wapres pada saat itu, memberikan keyakinan adanya pengaruh dan kepentingan Pemerintah yang berkuasa pada saat itu untuk menjaga agar stabilitas kekuasaan Pemerintahan SBY dapat terjaga. Seperti yang dituturkan oleh Akbar Tandjung yaitu :

Waktu munas Golkar di Bali, saya ingin maju kembali karena periode itu adalah periode yang sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar Partai Golkar selanjutnya. Saya mengatakan bahwa kita telah melewati tahap-tahap yang berat dan mestinya tahap setelah saya adalah tahap tinggal landas.. dalam pikiran saya waktu itu apa? saya berfikir bahwa kita harus menyiapkan kader-kader baru Partai dalam era politik yang boleh dibilang pekerjaan baru. Menurut saya Pak JK tidak menyadari, karena apa? Karena Pak JK tidak dibesarkan dalam pergulatan politik yang begitu berat dan dia kan hanya menerima jadi. Dia Wapres, jadi Pak JK terpilih menjadi ketua umum karena dorongan orang-orang yang tidak happy atau tidak suka kepada saya kemudian ditambah lagi ada kekhawatiran. Kalau saya memimpin terus, dikhawatirkan akan ada kekuatan penyeimbang yang besar dan kuat bagi pemerintah. Tentu saja orang-orang di pemerintah juga telah mempertimbangkan dengan melakukan intervensi. Mereka melihat bahwa satu-satunya yang bias mengalahkan saya adalah Pak JK apalagi dia ada di kekuasaan tentu ini menjadi kekuatan untuk maju.¹³²

Penuturan Akbar Tandjung didasarkan kepada posisi Partai Golkar pada saat itu yang memilih untuk bersatu menjadi oposisi Pemerintahan SBY-JK dengan membentuk Koalisi Kebangsaan bersama dengan PDI-P, PPP dan PDS. Dengan

¹³² Wawancara hanta yudha dengan Dr Akbar tandjung. Ketua Umum DPP Partai Golkar 1998-2004, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar 2009-2015. Jakarta 16 Mei 2012.

terpilihnya Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Golkar yang baru akan mempengaruhi peta koalisi Partai Golkar di Parlemen. Posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum akan mampu mengendalikan setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY-JK akan mendapat dukungan dari Fraksi Golkar di Parlemen.

Kubu yang mendukung Jusuf Kalla masuk ke dalam bursa Calon Ketua Umum yang baru mengaku bahwa pada awalnya kelompok Anti-Akbar mencalonkan untuk menjadi Ketua Umum yang baru bukanlah Jusuf Kalla, melainkan Surya Paloh, karena sesungguhnya Jusuf Kalla belum ada keinginan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum. Akan tetapi terdapat pertimbangan bahwa akan sulit melawan Akbar jika menjagokan Surya Paloh karena syarat pernah menjadi Pengurus Partai Golkar tidak dimiliki oleh Surya Paloh. Oleh sebab itu demi memuluskan keinginan agar bisa mengalahkan Akbar di dalam pertarungan Ketua Umum pada Munas 2004 di Bali, serta untuk mengamankan Pemerintahan SBY-JK agar pola hubungan antara Golkar dan Demokrat di DPR bias berubah oleh sebab itu terjadi pertukaran peran yaitu Jusuf Kalla menjadi calon Ketua Umum sedangkan Paloh menjadi Ketua Dewan Penasehat Golkar.¹³³

Keinginan Jusuf Kalla untuk menjadi Ketua Umum sesungguhnya juga didasarkan oleh rasa ‘tersinggung’ terhadap sikap remeh yang ditunjukkan Akbar Tandjung terhadap Jusuf Kalla pada pertemuan yang dilakukan di kediaman Aburizal Bakrie sebelum diadakan Munas ke-tujuh di Bali. Menurut Firman Subagyo, paska pertemuan segitiga tersebut itulah yang mendasari keinginan Jusuf Kalla masuk menjadi Calon Ketua Umum pada Munas 2004 di Bali. Firman Subagyo menuturkan :

“Suatu saat itu ada pertemuan yang diprakarsai oleh Bang Ical (Aburizal Bakrie) di kediaman Bang Ical. Pak Jk diundang dan difasilitasi untuk ketemu Ketua Umum pada saat itu Bang Akbar (Akbar Tandjung). Nah ketika pertemuan disitu, saya kira jam tujuh (malam), harinya saya lupa, ada pertemuan segitia antara Bang Ical, Pak JK dan Bang Akbar. Nah disitulah Pak JK langsung pulang, dan langsung sesampai di rumah saya ditelpon pak Akhsan (Akhsan Mahmud), “Man (Firman) kamu dimana?”,

¹³³ Rully Chairul Azwar, *Op. Cit.* hlm. 140

“Saya dirumah”, “Kamu langsung ke Ponegoro, Penting”. Kita bertiga bertemu, saya, Pak JK, dan Pak Akhsan. Ketika sedang proses (pertemuan), Pak JK bercerita “Saya baru pulang”, saya bertanya “Dari mana Pak”, “Saya dari rumahnya Ical, ketemu Bang Akbar difasilitasi Ical”, “Apa materi Pak”, Pak JK menuturkan “Begini sampai disana saya dipanggil untuk ketemu Bang Akbar difasilitasi oleh Ical, saya pikir sampai disana itu yang namanya Akbar Tandjung itu mau menyerahkan estafet Ketua Umum, saya diberikan kewenangan untuk memilih siapa yang menjadi Ketua Umum, rupa-rupanya tidak, malah Akbar menantang.” “Suf, Kamu mau jadi Ketua Golkar”, saya menjawab “Kalo iya emangnya kenapa?”. Itu ceritanya dari pak JK. “Kalau kamu mau, kamu tidak bisa melawan saya”. Pak JK menjawab “Saya sendiri yang akan mencalonkan sebagai Ketua”.¹³⁴

Masuknya Jusuf Kalla menjadi lawan yang kuat bagi Akbar Tandjung dalam perebutan kekuasaan Ketua Umum pada saat Munas juga dimotori oleh kelompok anti-Akbar yang tergabung dalam kelompok Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) yang dimotori Fahmi Idris. Kelompok FPPG merupakan kelompok fungsionaris Golkar yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Hal ini menyebabkan faksi Fahmi Idris yang tergabung dalam kelompok Forum Pembaharu Partai Golkar (FPPG) diberikan peringatan keras oleh DPP Golkar dibawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tandjung.¹³⁵

Kemenangan Jusuf Kalla pada saat awal wacana pemilihan Ketua Umum yang baru di Munas Bali 2004 sangat tidak diperhitungkan dan mengingat prestasi Akbar Tandjung dalam menghantarkan Partai Golkar menjadi Partai pemenang Pemilihan Legislatif 2004. Hampir dapat dipastikan posisi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2004-2009 akan kembali direbut oleh *incumbent* Akbar Tandjung. Namun hasil pemilihan Ketua Umum Munas ke-tujuh 2004 di Bali menghasilkan Ketua Umum baru dan menghapuskan semua prediksi yang telah diperkirakan pengamat politik di berbagai Surat Kabar Nasional mengenai kemenangan kedua-kalinya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini mengingat meskipun Akbar Tandjung tersandung kasus hukum skandal Bulloggate dan dipenjara namun hasil Pemilihan Legislatif 2004 yang menjadikan

¹³⁴ Wawancara dengan Firman Subagyo, Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011.

¹³⁵ Tim Penelitti Indonesian Insitute, Op. Cit.

Partai Golkar mendapat kursi terbanyak di Parlemen memberikan bukti tidak berdampak negatif terhadap pilihan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Meskipun kasus Bulloggate menimbulkan tekanan terhadap Akbar untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum, akan tetapi justru banyak puluhan pejabat menengok Akbar di penjara.¹³⁶ Kemenangan Jusuf Kalla mengalahkan sosok Akbar Tandjung yang memiliki jam terbang tinggi dan jaringan pendukungnya hingga kepengurusan Golkar tingkat II menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dilihat dari kekuatan pengaruh di dalam Organisasi Golkar pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari *standing ovation* dan tepuk tangan yang sangat riuh dilakukan seluruh peserta Munas Bali 2004.¹³⁷ Soliditas di dalam organisasional Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung sesungguhnya telah terbukti dengan keberhasilan menyukseskan kemenangan Partai Golkar pada Pemilihan Legislatif 2004.

Merujuk kepada prinsip di dalam suatu proses dimana terdapat proses *input* yang berdasarkan pada pengaruh internal dan eksternal yang menyebabkan suatu hasil bisa terjadi. Maka kekalahan Akbar Tandjung dalam Munas 2004 di Bali memiliki faktor penyebab yang kuat sehingga faksi Anti-Akbar yang berada diluar kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung dapat memenangkan pertarungan Ketua Umum di Bali. Kekuatan eksternal yaitu salah satunya faksi anti-Akbar yang dimotori Fahmi Idris dan fungsionaris Golkar yang menjadi tim sukses capres SBY-JK pada Pilpres 2004 seperti Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Anton Lesiangi, Yuslin Nasution, Juniwati M Sofwan, Abu Hasan Sazili, Abu Hanifah, dan Firman Subagyo. Kesembilan orang tersebut merupakan fungsionaris Golkar yang dipecat oleh Akbar Tandjung karena dianggap tidak patuh pada keputusan Partai membela duet

¹³⁶ Kholid Novianto, dkk., *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*, Sejati Press, Jakarta, 2004. Hlm. 162-163.

¹³⁷ Pada saat pidato pertanggung jawaban yang dibacakan oleh Akbar Tandjung, juga diputarkan video dokumenter selama ±10 menit yang menceritakan perjuangan Partai Golkar yang terpuruk pasca Orde Baru namun berkat usaha keras dan peranan penting Akbar Tandjung dalam memimpin Partai Golkar keluar dari bayang-bayang rezim Soeharto berhasil mandiri dan menjadi pemenang pemilu legislative 2004. Setelah pemutaran video tersebut, diikuti oleh suara dukungan kader yang meneriakkan “Hidup Bang Akbar” berkali-kali. Lihat tulisan di Kompas 17 Desember 2004, dengan judul “Akbar pun terbata-bata...”.

Mega-Hasyim yang diusung oleh PDI-P. Disamping itu pula menjadi sangat mudah dipahami bahwa SBY memiliki kepentingan untuk mendukung pemenangan Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Golkar agar nakhoda Partai Golkar di Parlemen dapat diarahkan sesuai dengan kebijakan Pemerintahan SBY-JK.

Kekuatan eksternal dengan mengusung bendera anti-Akbar disatukan kepada kepentingan untuk menyingkirkan Akbar Tandjung selaku *Godfather*-nya Partai Golkar yang dikhawatirkan apabila kembali terpilih menjadi Ketua Umum Golkar akan menjadi Partai yang memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang besar terhadap percaturan politik di Parlemen mengkritisi setiap kebijakan Rezim SBY-JK. Hal ini diakui oleh Firman Subagyo yang menuturkan :

“Yang paling menarik pada saat Munas Bali 2004, seluruh kekuatan yang mendukung Pak JK menjadi Ketua Umum pada saat itu adalah orang-orang yang berada diluar lingkungan kekuasaan kepengurusan Golkar pada saat itu (Periode Akbar Tandjung)”.¹³⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa sesungguhnya banyak kader-kader Golkar yang berada dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung, justru tidak mendukung kembali Akbar. Pada saat Munas 2004 banyak dari pendukung Akbar pada Munaslub 1998 memberikan dukungan kepada JK. Hal ini juga dirasakan oleh Akbar pada saat itu, Ia menuturkan :

“Tentu ada. Termasuk Yahya Zaini. Saya yang merekrut Yahya untuk masuk Golkar dari bukan siapa-siapa. Saya besarkan dia sampai jadi orang. Waktu konvensi, saya lihat Yahya sudah main mata dengan Aburizal. Saya lihat mobilnya sudah berubah, ha ha ha”.¹³⁹

Kelompok yang menjadi faksi anti-Akbar sesungguhnya dimulai pada saat pasca Munaslub 1998 di dalam Fraksi Golkar di MPR dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung mendapat tekanan perpecahan kembali dimana menyangkut

¹³⁸ Wawancara Firman Subagyo Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011

¹³⁹ Wawancara Akbar Tandjung pada saat peluncuran website www.bangakbar.com yang saya kutip dari detiknews.com melalui situs <http://sport.detik.com/read/2008/04/05/124114/918757/10/akbar-sebut-permainan-uang-jusuf-kalla-dan-yahya-zaini> pada tanggal 13 Mei 2012.

pencalonan kembali Habibie dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) 1999, dimana pada saat itu muncul kelompok Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, Kawasan Indonesia Timur) dimana berseberangan dengan kelompok Akbar Tandjung mengenai pencalonan Habibie sebagai presiden pada Pemilu 1999.¹⁴⁰ Hal ini kemudian berdampak pada pandangan dari kelompok Iramasuka terhadap Akbar Tandjung yang telah mengkhianati Habibie padahal jasa Habibie yang sangat besar dalam menyukseskan Akbar menjadi Ketua Umum Golkar pada Munaslub 1998.

Tidak hanya kelompok Iramasuka yang kecewa dengan Akbar Tandjung, namun juga beberapa fungsionaris Golkar yang dahulu bersatu di dalam kelompok reformis pada Munaslub 1998 justru menjadi kelompok yang gencar mendorong agar Akbar tidak lagi kembali terpilih pada Munas 2004. Kekecewaan beberapa kader Golkar diantaranya pada saat pembentukan kepengurusan Partai Golkar yang baru pasca Munaslub 1998 yang tetap memasukkan nama-nama lama yang memiliki kedekatan dengan simbol Orde Baru seperti Harmoko dan Abdul Gafur.¹⁴¹ Begitupula kekecewaan lain juga diutarakan ketika Akbar Tandjung justru memasukkan caleg pada pemilu legislatif 2004 yang bukan orang-orang yang telah berjasa besar bagi Golkar, namun dari kader-kader organisasi massa seperti Nusron Wahid yang berasal dari PMII mendapatkan nomor urut Caleg no.1.¹⁴² Hal ini dirasakan mekanisme demokratisasi tidak berjalan dengan baik dan sehat di dalam Partai Golkar dimana para kader Golkar justru tidak dicalonkan menjadi caleg pada Pileg 2004.¹⁴³

Jaringan HMI sebagai basis dukungan Akbar pada saat Munaslub 1998 tidak lagi menjadi kekuatan utama pendukung Akbar. Terpecahnya kekuatan HMI disebabkan beberapa kader HMI menjadi pesaing satu sama lain pada Munas

¹⁴⁰ Tim Peneliti The Indonesian Institute, *Kajian Meta Analisa The Indonesia Institute, Mempertahankan Kemenangan, Meraih Suara Mayoritas di Pemilu 2009*, The Indonesian Institute, 2008.

¹⁴¹ Wawancara *Tempo Interaktif* dengan Sarwono Kusumaatmadja tanggal 14 Juli 1998, sumber <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/20/lapsus2.htm> pukul 14.00 hari Selasa, 6 Mei 2012

¹⁴² Wawancara Firman Subagyo Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011

¹⁴³ *ibid.*

2004. Kader HMI yang menjadi posisi berseberangan dengan Akbar Tandjung yaitu Fahmi Idris dan Jusuf Kalla. Pengaruh Fahmi Idris terbilang kuat di dalam organisasi Golkar sehingga menjadi musuh yang kuat bagi Akbar untuk bisa memenangkan Munas 2004 pada saat itu. Seperti apa yang dituturkan oleh Dr. Poempida Hidayatullah yaitu :

“Kalau saya jadi akbar, punya orang kayak fahmi idris, pegang bener gitu kan? Jadi bareng-bareng aja udah gitu, nah, jadi orang kayak pak fahmi nggak bisa dipegang diatur. Karena dia ini kan punya mindset bebas, punya level sama dengan Akbar dalam konteks senioritas. Umurnya juga lebih tua dibandingkan pak fahmi dibandingkan akbar kan? Tapi sebenarnya justru plusnya dong yang dilihat. Kalau dia jadi aliansi pegang dong jadi aliansi. Jangan malah di ini, dan itu adalah kesalahan Akbar yang paling fatal; sebenarnya. Kalau nggak, mungkin HMI merajai Golkar saat ini. Sekarang kan sudah tercecer lagi”.¹⁴⁴

Perpecahan antara kekuatan Akbar dan Fahmi sesungguhnya sudah bermula pada saat pasca tidak terpilih kembalinya Habibie menjadi calon Presiden karena ditolaknya pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Istimewa MPR 1999 yang memicu kemarahan besar dan kekecewaan dari kelompok Iramasuka yang sesungguhnya lebih mendukung Fahmi Idris untuk menjadi Ketua Umum pada Munaslub 1998. Seperti yang dituturkan kembali oleh Dr. Poempida Hidayatullah yaitu :

“Kalau saya pikir, HMI ya sebut saja faksi HMI, nggak usah disebut Akbar atau Fahmi. Karena kasus jaman dulu, 2004 aja. Dan Akbar sebetulnya kalau dia pegang pak Fahmi, dia akan jadi orang yang kuat banget. Pada saat itu ni, sebenarnya tentara yaitu Prabowo, Wiranto, dan lain-lain sudah setuju untuk mendukung Fahmi Idris menjadi Ketua Umum, pada saat awal reformasi namun pak Fahmi orangnya loyal. Dia dipanggil sama Habibie yang sudah didekati oleh Akbar, “Bapak Fahmi, anda dukung Akbar ya” selesai, karena Habibie presiden, dan dia menteri dia bilang “siap”. Akhirnya akbar menang kan? Lah edi sudrajat lawannya. Saat itu faksi HMI lagi solid. Dikemudian hari, bahkan ketika Akbar menolak pertanggung jawaban Presiden Habibie. Itu Bugis-bugus itu masuk ke kantornya Akbar, Udah mau bawa clurit, orang-orang Baramulilah. Yah mereka kan Habibie banget kan ?. Udah mau dihabisi

¹⁴⁴ Wawancara Hanta yudha dengan Dr. Poempida Hidayatullah, wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2004-2009, Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 2009, di Jakarta 10 Mei 2011,

itu. Akbar nangis disitu. Pak Fahmi bawa pistol keluar “lo berani, hadapi gwe keluar”.¹⁴⁵

Kelompok anti-Akbar yang dikomandoi oleh Fahmi Idris, Akhsan Mahmud, Firman Subagyo, Marzuki Daruzman, Anton Lesiangi, David Napitupulu, Yuni (Mantan Istri Gubernur Jambi), kemudian mengkonsolidasikan kekuatan untuk membangun kekuatan bersama mengalahkan Akbar di dalam Munas 2004 di Bali. Pertemuan dilakukan oleh kelompok di Hotel Mulia dan dilakukan pengumpulan dana untuk mempersiapkan menghadapi biaya Munas di Bali.¹⁴⁶ Menjadi tidak mengherankan apabila pada masa Munas 2004 menyebar isu money politics yang dilakukan oleh kandidat yang bertarung pada saat pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar ke-tujuh di Bali. Jeffrey Winters dalam penyelidikannya menyangkut Munas Golkar di Bali tahun 2004 dengan bersumber pada salah satu kandidat yang mengikuti Munas menuturkan :

Di Munas Denpasar, uang dikeluarkan di toilet! Orang-orang jadi ragu untuk memilih. Dan tahu tidak apa yang mereka lakukan? Mereka bawa telepon genggam ke bilik suara untuk membuktikan mereka memilih “A” atau “B”. Jadi mereka diberi separuh (uang yang dijanjikan) dulu, lalu kalau sudah menunjukkan benar memilih Jusuf Kalla, sisanya diberikan.¹⁴⁷

Politik uang yang diberikan kepada peserta Munas 2004 tampak sangat berpengaruh besar dalam terpilihnya Jusuf Kalla. Hal ini seperti dituturkan oleh Akbar Tandjung sendiri yang mengatakan bahwa yang terpenting di dalam Golkar itu bukanlah kekuasaan, tetapi uang.¹⁴⁸ Politik uang terjadi dalam pemilihan Ketua Umum di Munas Bali 2004 diakui Hudarni Rani (Ketua DPD I Partai Golkar Bangka Belitung) yang saat menjadi peserta Munas mengakui bahwa hamper semua kandidat menggunakan politik uang menurutnya :

“iya kayak kemarin (Munas Golkar 2004) kandidat sama-sama punya duit, yang kalah itu kalah setengah triliun, yang menang juga hilang setengah triliun. Kalah menang habis segitu, dan tidak bias kembali lagi. Dan masing-masing mengklaim bahwa (dukungan) yang dipegangnya itu sudah diatas 50 persen plus 1.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Wawancara Firman Subagyo Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011

¹⁴⁷ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm. 280.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Misalnya Surya Paloh, menggalang itu di Hotel di Bali. Dan berangkat ke Munas itu hanya untuk memilih. Setahu saya seperti itu, jangankan itu, yang di DPD Babel aja kayak gitu.¹⁴⁹

Jusuf Kalla sendiri mengakui bahwa Ia telah menghabiskan uang sebesar 2-3 Miliar yang digunakan untuk akomodasi peserta Munas.¹⁵⁰ Meskipun harian the Age Australia melansir angka yang lebih besar yang dihabiskan oleh Jusuf Kalla untuk memegang posisi Ketua Umum Golkar.¹⁵¹ Menjadi sesuatu yang tidak 'afdol' apabila delegasi dari DPD tidak membawa 'sesuatu' dari pusat yang merupakan lembaga sinterklas untuk membangun partai.¹⁵² Akbar tandjung menuturkan bahwa kealahannya disebabkan pragmatisme kader partai yang melihat peluang kedudukan jabatan di pemerintahan dan uang yang ditawarkan oleh Jusuf Kalla, seperti apa yang dikatakannya di salah satu media yaitu :

Saat itu saya kalah power dengan Jusuf Kalla. Ketika Munas di Bali Jusuf Kalla (JK) didukung oleh tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan yang sama, seperti: Ginandjar, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Muladi, Sultan Hamengkubuwono X dan Fahmi Idris. Sebagai Wakil Presiden, JK memiliki kekuasaan dan uang yang unlimited. Masalahnya, saat itu mental politik orang-orang Golkar masih pragmatis. Tiba-tiba ada tawaran kekuasaan dan uang. Akhirnya Saya runtuh dan mereka mendukung JK.¹⁵³

Dalam sejarahnya, Golkar berada di dalam kekuasaan. Baru lima tahun terakhir, Golkar merasakan bagaimana bedanya di luar dan di dalam pemerintahan. Mungkin, mereka melihat peluang. Masuklah mereka dan mendukung Jusuf Kalla. Artinya, mereka lebih suka berada di dalam pemerintahan. Membangun kekuatan melalui sebuahkoalisi, menghasilkan jabatan politik, yaitu Ketua DPR di tangan Partai Golkar. Itu kan jabatan yang memiliki simbol politik yang kuat, selain presiden, wakil Presiden

¹⁴⁹ Wawancara Hanta Yudha dengan Hudarni Rani, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung Periode 2004-2009 di Jakarta pada 19 Mei 2011.

¹⁵⁰ Saya kutip di situs *Tempo Interaktif*, Pada 12 Mei 2012 melalui alamat situs : <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/11/078319229/Jusuf-Kalla-Akui-Bocoran-Wikileaks-Benar>

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Abdul Muin Angkat (Sekjen PPK Kosgoro Periode 2001-2005), "Politik Uang, Memperburuk Citra Golkar" dalam <http://muin-angkat.blogspot.com>.

¹⁵³ Wawancara Akbar Tandjung pada saat peluncuran website www.bangakbar.com yang saya kutip dari detiknews.com melalui situs <http://sport.detik.com/read/2008/04/05/124114/918757/10/akbar-sebut-permainan-uang-jusuf-kalla-dan-yahya-zaini> pada tanggal 13 Mei 2012.

dan ketua MPR. Saya yakin tanpa koalisi Golkar tidak dapat jabatan ketua DPR.¹⁵⁴

Merebaknya kekuatan uang di dalam menentukan keberpihakan suara kepada salah satu kandidat Ketua Umum pada Munas 2004 mengindikasikan bahwa di dalam internal Golkar telah berkembang dan mengarah kepada pragmatisme politik. Pertimbangan memilih Ketua Umum tidak lagi berdasarkan merit-system yakni mengenai prestasi dan pengabdian di dalam mengembangkan Partai Golkar. Upaya Akbar Tandjung untuk menjadikan Partai Golkar memiliki nilai-nilai baru yang berorientasikan kepada upaya perbaikan sistem kepartaian Indonesia dengan berani menjadi kekuatan oposisi pertama kalinya di dalam Parlemen tidak mendapat dukungan penuh di dalam internal kader-kadernya. Akbar Tandjung berpendapat :

“Mengenai Munas 2004 kamu bisa tanyakan kepada pak JK. namun saya mau mengatakan bahwa pada Munas 2004 proses pemilihan ketua umum di bali itu sangat diwarnai adanya pengaruh-pengaruh selaku pak JK seorang wapres dan pengaruh orang-orang yang mendukung Pak JK. Dalam memberikan dukungan juga dirasakan adanya permainan politik uang. nah ini sebenarnya tidak sejalan dengan semangat reformasi yang perjuangkan dari sejak 1998 hingga tahun 2004. Tapi karena adanya dua pengaruh tersebut dimana pak JK sebagai Wapres tentu memiliki kekuatan, dan faktor-faktor lainnya yang saya sebut tadi disini boleh dikatakan mencederai semangat reformasi dan demokrasi yang saya perjuangkan. Dan sejak saat itu tidak lagi memperlihatkan semangat reformasi dan demokrasi”.¹⁵⁵

Hal ini pula yang menyebabkan kekuatan anti-Akbar yang sejatinya berada diluar sistem kepengurusan DPP Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung dapat memperoleh dukungan yang besar untuk memilih Ketua Umum yang baru yang dekat dengan kekuasaan Pemerintah pada saat itu yaitu Jusuf Kalla. Hal ini dibenarkan oleh Firman Subagyo dan Rully Chairul Azwar yang berpendapat yaitu :

“Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Golkar tidak terbiasa untuk tidak masuk di dalam kekuasaan. Hal ini disebabkan selama hampir 30 tahun

¹⁵⁴ Wawancara Akbar Tandjung dengan *Tempo Interaktif*, Pada 20 Desember 2004. melalui situs <http://www.tempointeractive.com/hg/narasi/2004/12/20/nrs,20041220-01.id.html> diakses pada 12 Mei 2012.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Dr. Akbar Tandjung, Mantan Ketua Umum Golkar 1998-2004, pada 26 Mei 2012, pukul 11.00

lebih, Golkar selalu memberikan kader-kader terbaiknya untuk dapat berperan dan membantu menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan. Sehingga ketika pada saat itu banyak kader yang mendukung pak JK untuk menjadi Ketua Umum karena menjadi oposisi bukanlah kodrat Golkar. Masuk di dalam kekuasaan bukanlah hal yang buruk, karena hanya dengan masuk dalam kekuasaan Partai politik bisa bertahan”.¹⁵⁶

“Memang pada saat itu musuh bang Akbar banyak sekali, terutama diluar sistem kepengurusan. Dan juga banyak kader yang tidak siap dan kecewa dengan pilihan bang Akbar untuk mendukung Mega-Hasyim dan menjadi oposisi Pemerintahan SBY-JK. Padahal PDI-P memiliki track record buruk dengan Golkar pada masa awal reformasi terutama di Jawa Tengah dimana banyak kader yang digolokin, diancam dibunuh, ditelanjingin dan Bang Akbar pun mengalaminya sendiri. Justru banyak kader yang kecewa mengapa tidak mendukung JK yang jelas-jelas adalah kader Golkar”.¹⁵⁷

Kekalahan Akbar Tandjung dalam Munas Bali tahun 2004 merupakan kombinasi dari banyak faktor yang bersatu dalam satu tujuan untuk mengagalkan kembali terpilihnya Akbar Tandjung. Ketidakpuasan dan kekecewaan beberapa kader pasca Munaslub 1998 seperti kelompok Fahmi Idris terhadap kebijakan Akbar Tandjung yang tetap memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan Orde Baru seperti Abdul Gafur dan Harmoko. Kader seperti Fahmi Idris kemudian bergabung dan mendukung kelompok kader Golkar yang menjadi tim sukses SBY-JK dimana pada saat itu telah banyak pula beberapa kader di dalam Partai Golkar yang tidak sependapat dengan pilihan menjadi oposisi di Parlemen daripada ikut dalam Koalisi Pemerintahan SBY-JK. Menurut Akbar Tandjung pilihan untuk tidak bergabung di dalam koalisi Pemerintahan SBY-JK bukan didasarkan kepada ketidaksukaan terhadap JK, akan tetapi merupakan keputusan Partai melalui Rapimnas yang berdasarkan visi Partai Golkar seperti apa yang dituturkan Akbar Tandjung yaitu :

“Ketika orang berkoalisi, mereka selalu mengesankan diri sebagai kekuatan inti koalisi. Jika ada orang baru yang mau ikut, diletakkan di posisi luar kalau tidak pinggiran. Sulit bagi Golkar yang memiliki suara besar, diajak

¹⁵⁶ Wawancara Firman Subagyo Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011.

¹⁵⁷ Wawancara Rully Chairul Azwar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

berkoalisi tetapi pada posisi pinggiran. Belum lagi platformnya. PBB mengusung syariat Islam. Kami tidak bisa dong berkoalisi dengan PBB, justru demi memegang jati diri Golkar. Saya juga tidak tahu, kok dikatakan menyimpang dari jati diri. Apa karena Pak SBY dulu tentara sehingga harus mendukung beliau”.¹⁵⁸

Pilihan untuk tidak berkoalisi jika melihat dari sisi upaya pendidikan politik bagi Partai Golkar yang dilakukan oleh Akbar Tandjung selaku Ketua Umum merupakan sebuah langkah yang baik mengingat jika Partai Golkar menjadi oposisi maka di Parlemen Partai Golkar bisa menjadi kekuatan penyeimbang guna mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan Pemerintahan. Akan tetapi justru menjadi boomerang bagi Akbar Tandjung dimana banyak kader Partai Golkar tidak lagi semilitan dan se-visi dengan Akbar Tandjung untuk menjadikan Partai Golkar kekuatan penyeimbang Pemerintah di Parlemen tidak berada dalam lingkaran kekuasaan selamanya. Namun tampaknya kultur lama dimana kader Golkar selalu terbiasa terlibat di dalam Pemerintahan yaitu mendapat jatah beberapa kursi di Kabinet Menteri.

Kelompok Firman Subagyo, Akhsan Mahmud yang menjadi tim sukses pemenangan SBY-JK kemudian melihat peluang untuk menggalang kekuatan dengan fungsionaris Golkar yang berada di luar sistem kepengurusan DPP Golkar Akbar Tandjung. Dengan menjagokan Jusuf Kalla memiliki keunggulan bila dibandingkan menjagokan Surya Paloh pada saat Munas Bali 2004. Hal ini mengingat Jusuf Kalla memiliki kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh Akbar Tandjung untuk ditawarkan kepada para peserta Munas Golkar 2004. Jusuf Kalla sebagai seorang pengusaha miliuner bugis yang telah terkenal dikalangan para pengusaha dan berlatar belakang dari keluarga pengusaha memiliki kekuatan finansial yang jauh sangat kuat bila dibandingkan Akbar Tandjung.

¹⁵⁸ Wawancara Akbar Tandjung dengan *Tempo Interaktif*, Pada 20 Desember 2004. melalui situs <http://www.tempointeractive.com/hg/narasi/2004/12/20/nrs,20041220-01.id.html> diakses pada 12 Mei 2012.

Jusuf Kalla yang menjadi Wapres pada pemerintahan SBY jilid pertama memiliki kekuatan dalam konteks kekuasaan dalam pengaruh di Pemerintahan. Posisi Jusuf Kalla sebagai Wapres tentu saja memiliki posisi tawar yang tinggi untuk bisa memasukkan kader-kader Golkar menduduki beberapa pos-pos Menteri di dalam Kabinet SBY-JK. Hal ini jelas memberikan keunggulan tersendiri bagi JK untuk bisa mengalahkan Akbar Tandjung yang tidak menjadi bagian dalam kekuasaan Pemerintahan SBY-JK. Terlebih itu protokoler sebagai Wapres mendapatkan pengawalan khusus dari Paspampres menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa memaksa masuk pada saat Munas.

Tawaran jabatan Menteri dan posisi tinggi dalam Pemerintahan SBY-JK sepertinya benar digunakan untuk menarik simpati dan dukungan kader-kader Golkar untuk memilih Jusuf Kalla. Hal ini terbukti pasca terpilihnya Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru beberapa fungsionaris Golkar mendapat posisi penting di dalam Pemerintahan. Agung Laksono menjadi Ketua DPR RI 2004-2009, Aburizal Bakrie menjadi Menteri Perekonomian. Oleh sebab itu meskipun prestasi dan perjuangan yang telah dilakukan Akbar Tandjung dalam upaya mempertahankan dan membesarkan Partai Golkar dibawah tekanan yang menyudutkan Partai Golkar, namun dapat dikalahkan Jusuf Kalla yang memiliki sumber daya kekuasaan yaitu kekuatan finansial dan kekuatan kekuasaan dalam jabatan strategis di Pemerintahan.

Tersingkirnya Akbar Tandjung dari posisi Ketua Umum meskipun memiliki sederet prestasi dalam menghantarkan berkibar kembalinya Partai Golkar setelah terpuruk pada awal Reformasi, digantikan oleh Jusuf Kalla menjadi catatan penting bagi perkembangan Partai Golkar selanjutnya. Akbar Tandjung sebagai simbol aktivis dan pejuang di dalam menghantarkan Partai Golkar ke era kejayaan kembali, mampu dikalahkan dengan sosok Jusuf Kalla yang tidak terlibat secara langsung dalam upaya mempertahankan Partai Beringin dari tekanan masyarakat dan politisi yang menginginkan Partai Golkar dihapuskan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang. Hal ini menjadi awal

berakhirnya proses pemilihan Ketua Umum yang menggunakan asas merit-system.

Jusuf Kalla merupakan sosok yang menjadi Ketua Umum Golkar ke-dua setelah Sudharmono yang sekaligus menjabat sebagai Wapres.¹⁵⁹ Kemenangan Jusuf Kalla juga dapat dipahami sebagai kembalinya Partai Golkar yang selalu menjadi bagian dalam kekuasaan. Dengan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla akan mampu mengendalikan kader-kader Golkar untuk mendukung setiap kebijakan Pemerintahan. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi Pemerintahan SBY dalam meloloskan setiap kebijakan Pemerintahan yang akan selalu didukung dari Parlemen. Partai Golkar yang mendapatkan kursi terbanyak dalam Parlemen akan menjadi mitra koalisi yang sangat menguntungkan bagi stabilitas Pemerintahan SBY jilid pertama. Sedangkan keuntungan bagi kader Partai Golkar adalah mendapatkan bagian kue kekuasaan dari Pemerintahan SBY-JK dengan mendapatkan beberapa posisi di Kabinet dan Ketua DPR yang berasal dari kader Golkar.

3.3. MUNAS GOLKAR KE-VII (DELAPAN) 2009

Setelah kegagalan yang dialami kembali calon Presiden yang diusung oleh Partai Golkar yaitu duet JK-Wiranto pada Pilpres 2009 serta kegagalan Pileg 2009 menjadi catatan penting bagi Partai Golkar untuk mengadakan Munas ke-delapan di Pekanbaru tahun 2009. Pada Pilpres 2004, pasangan JK-Wiranto hanya 12,41 persen dari total suara serta pada Pileg 2009 hanya mendapat 14,45 persen dari total suara yang menyebabkan Golkar tidak lagi menjadi Partai pemenang.¹⁶⁰ Rapor buruk Golkar secara berturut-turut tersebut menjadi perhatian serius dari seluruh kader Golkar dalam mengadakan Munas ke-delapan Partai Golkar diadakan di Hotel Furia, di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tanggal 5-8 Oktober 2009 diikuti oleh 1.361 peserta. Para peserta Munas terdiri dari unsur DPP, DPD

¹⁵⁹ Rully Chairul Azhwar, Op. Cit., hlm. 142

¹⁶⁰ *Media Center KPU (24 Juli 2009) berdasarkan Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2009 (22-23 Juli 2009)*

Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota, yang memperebutkan 538 suara sah. Kegagalan JK untuk menjadi Presiden pada Pilpres 2004 menjadikan nama JK selaku Ketua Umum tidak dijagokan banyak kader untuk bisa terpilih kembali melanjutkan jabatannya 5 tahun ke depan.

Munas ke-delapan di Pekanbaru menjadi sorotan banyak pihak terutama pasca kemenangan sosok JK yang berasal dari kelompok pengusaha, dan menguatnya isu pragmatisme politik di dalam internal Partai Golkar pasca Munas 2004 di Bali menjadi latar yang menghantarkan proses di Munas Golkar di Pekanbaru 2009. Tidak sedikit yang ingin melihat bagaimana peluang Akbar Tandjung untuk bisa terpilih kembali pada Munas 2009 akibat kekalahan faktor finansial yang kuat dari kelompok pengusaha. Pertarungan Ketua Umum menjadi tidak lagi bersifat ideologis seperti pada masa Munaslub 1998 disebabkan sosok Akbar Tandjung yang memiliki prestasi yang sangat hebat untuk Partai Golkar tidak terpilih kembali akibat pragmatisme politik para kader peserta Munas yang memilih JK karena pengaruh kedekatan kekuasaan dan kekuatan uang yang besar dari JK.

Jusuf Kalla terlihat tidak menaruh minat yang besar untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2009-2014. Hal ini disebabkan dana yang terkuras habis dari kantong JK untuk membiayai kampanye pada saat Pilpres 2004 yang menghabiskan uang kurang lebih 700-900 Miliar Rupiah.¹⁶¹ Dana pribadi JK yang sangat besar untuk membiayai kampanye Presiden pada Pilpres, serta kekecewaan telah gagal untuk bisa menjadi Presiden dimana pada tahun 2004 Partai Golkar merupakan Partai pemenang Pemilu terlihat menjadi penyebab rasa ketidakinginan JK untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sosok JK yang tidak kembali dijagokan akibat kegagalan pada Pilpres 2004, Akbar Tandjung yang meskipun memiliki basis pendukung yang tetap kuat di dalam Partai Golkar, namun Partai Golkar mengharapkan sosok baru yang dapat menjadi Ketua Umum Golkar untuk

¹⁶¹ Wawancara Andi Matalata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Periode 2004-2009. Jakarta, 7 Maret 2012.

kembali mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Legislatif 2014 dan Pilpres 2014.

3.3.1. Pertarungan Antar-Pengusaha Kaya¹⁶² di Munas 2009

Berpijak pada hasil Munas Golkar yang dimenangkan oleh JK yang memiliki latar belakang dari kelompok pengusaha, dengan menyingkirkan Akbar Tandjung yang berasal dari aktivis organisasi massa pada posisi Ketua Umum menjadikan awal bagi berakhirnya pertarungan ideologi di dalam tubuh Partai Golkar pada pemilihan Ketua Umum. Proses jenjang karir dan prestasi menjadi tidak hal yang utama di dalam menentukan seorang Ketua Umum. Para kader Golkar yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Umum yang baru menjadi semakin mengerti bahwa kondisi internal Golkar para peserta Munas yang pragmatis. Berdasarkan pengalaman Munas Golkar 2004, para calon Ketua Umum harus berhitung pada kekuatan modal finansial menjadi keharusan sebagai harga yang ditawarkan kepada pemegang suara Munas guna mendapatkan dukungan.

Tentu saja yang mampu bersaing dalam segi kekuatan finansial adalah kader-kader Partai Golkar yang berasal dari kelompok pengusaha. Kelompok pengusaha yang terkuat pada saat menjelang Munas Golkar 2009 di dalam internal Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh (Paloh). Sehingga telah diprediksi bahwa dua kekuatan yang bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2009 adalah Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Meskipun terdapat kandidat lain seperti Yudi Krisnandi yang merupakan politisi Golkar muda dan Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto. Baik Yudi Krisnandi maupun Tommy Soeharto sedari awal telah diprediksi akan mendapat dukungan yang kecil. Yudi meskipun salah satu politisi muda Golkar yang memiliki potensi yang baik, namun berhadapan dengan taipan seperti Ical dan Paloh akan sangat sulit. Sedangkan Tommy

¹⁶² Pertarungan antar pengusaha kaya menjadi tema di dalam Munas Golkar 2009 disebabkan sosok yang bertarung menjadi Ketua Umum adalah sama-sama memiliki latar belakang pengusaha ternama.

Soeharto meskipun memiliki sumber finansial yang kuat, namun Tommy dipandang sebagai sosok yang tidak berpengalaman dalam kepengurusan Partai Golkar. Ditambah lagi kekuatan kroni-kroni Soeharto di dalam Partai Golkar sudah sangat jauh berkurang pasca Munaslub 1998 dan memilih mendirikan Partai Baru.

Ical dan Paloh menjadi calon Ketua Umum yang menjadi favorit untuk bertarung sengit di dalam perebutan kursi Ketua Umum. Kedua sosok Ical dan Paloh telah dikenal publik sebagai pengusaha kaya yang memiliki perusahaan-perusahaan yang besar. Tampaknya Ical maju menjadi calon Ketua Umum didasarkan karena tidak adanya sosok yang menjadi favorit untuk bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum setelah Akbar dan JK dan sekaligus memiliki modal yang kuat untuk bisa memenangkan Ketua Umum Golkar yang baru. Sedangkan Surya Paloh kembali ingin mencapai cita-citanya menjadi pimpinan Partai Golkar, setelah memenuhi syarat terlibat di dalam kepengurusan Partai Golkar di Pusat pada masa Ketua Umum Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Dewan Penasehat. Seperti diketahui tidak majunya Surya Paloh pada saat Munas Golkar di Bali karena syarat sebagai pernah menjadi pengurus pusat Partai Golkar tidak dipenuhi.

Sosok Aburizal Bakrie adalah anak pertama dari Achmad Bakrie pendiri Grup Bakrie yang merupakan gabungan dari berbagai perusahaan besar yang bergerak di multi-bidang seperti pertambangan, pertelevisian, jasa dan lain sebagainya. Selain memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses, Ical pun tercatat di majalah *Asia Globe* sebagai orang terkaya di Asia Tenggara pada tahun 2008. Ical sangat akrab dikalangan para pebisnis di Indonesia karena menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) selama 10 tahun sejak tahun 1994-2004. Pada masa pemerintahan SBY-JK, Ical pernah menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial. Ical juga memiliki perusahaan media televisi terkenal yaitu *AnTV* dan *Tv One*.

Paloh juga sangat dikenal sebagai pengusaha yang besar bahkan ia dikenal sebagai pengusaha dari hulu hingga ke hilir. Pengusaha dari hulu hingga ke hilir

berarti bahwa Paloh merupakan pengusaha yang memiliki jaringan bisnis dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Namun Paloh lebih dikenal sebagai pemilik perusahaan yang bergerak di media informasi yaitu media cetak seperti *Media Indonesia* dan media televisi seperti *Metro TV*. Bergerak di bidang informasi menjadikan sosok Surya Paloh memiliki kekuatan untuk membangun pencitraan dan sekaligus dukungan terhadap upaya pemenangannya menjadi Ketua Umum Golkar.

Pertarungan antara dua saudagar Ical dan Paloh menjadi sorotan utama mengingat masing-masing pihak melakukan strategi yang hampir sama guna mendapatkan dukungan dari para DPD I dan DPD II. Upaya Paloh untuk mendapatkan dukungan penuh dari para DPD I dan DPD II, ia melakukan strategi kampanye dengan mengkarantina kader-kader Golkar di Westin Hotel Nusa Bali guna mendapatkan pembekalan politik dari beberapa pakar dan pengamat politik seperti Eep Saefullah Fattah, Garin Nugroho, Frank Sahilatua dan Romo Beni Setiawan.¹⁶³ Upaya yang dilakukan oleh Surya Paloh melakukan pembekalan politik terhadap para kader Golkar untuk menanamkan kembali ideologisasi perjuangan ke dalam hati dan jiwa para kader Golkar tidak hanya pada prinsip pragmatisme politik seperti pada masa Munas ke-tujuh di Bali. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Ical yaitu salah satunya dengan mengadakan pertemuan singkat di Hotel Furaya, Pekanbaru pada 5 Oktober 2009 sebelum acara Munas ke-delapan dilangsungkan. Hal ini dilakukan Ical untuk memastikan dukungan dari mayoritas DPD I dan DPD II yang tetap berada pada angka 350 suara.¹⁶⁴

Pada Munas ke-delapan di Pekanbaru 2009 sesungguhnya telah disadari banyak pihak bahwa akan menjadi pertarungan antar kubu yang memiliki kekuatan finansial. Hal ini disebabkan tidak ada figur sentral atau favorit yang diprediksi dapat menjadi Ketua Umum seperti pada saat Akbar Tandjung di Munas 2004. Ini pulalah yang memberikan dampak pada pertarungan sengit

¹⁶³ *Media Indonesia*, "800 Pendukung Surya Paloh Berangkat dari Bali", Senin 6 Oktober 2009. hlm. 5

¹⁶⁴ situs Akbar Tandjung Institute pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 14.50 dengan alamat situs <http://www.akbartandjunginstitute.org/index.php/detail/view/01/1185>

terutama kedua taipan pemilik perusahaan media dan informasi yaitu antara Ical dan Paloh. Kedua saudagar kaya tersebut saling mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas sekitar 70-80% dari pemegang suara di Munas. Kubu Surya Paloh yang diketuai Jeffrie Geovanie mengklaim bahwa ia telah mendapatkan suara sebanyak total 80% dari jumlah keseluruhan suara.¹⁶⁵ Sedangkan Kubu Ical yang diketuai Idrus Marham mengklaim bahwa telah mendapatkan dukungan dari 349 DPD.¹⁶⁶ Pada saat pemaparan dukungan dari para DPD I, DPD II, dan para Ormas, Aburizal Bakrie mendapatkan dukungan mayoritas dari para pemegang suara.¹⁶⁷

3.3.3. Kemenangan Aburizal Bakrie pada Munas 2009

Pada saat penghitungan suara dari para pemegang suara yang terdiri dari DPD I, DPD II, dan para Ormas, Aburizal Bakrie mendapatkan 297 suara, Surya Paloh mendapatkan 239 suara, sedangkan Yuddy Chrisnandi dan Tommy Soeharto tidak mendapatkan dukungan suara sama sekali. Aburizal Bakrie berhasil menjadi Ketua Umum Golkar yang ke delapan untuk periode 2009-2014. Kemenangan Aburizal Bakrie tidak terlepas dari strategi dan kekuatan/*sumber resource* yang diiliki olehnya. Berpijak pada pengalaman Munas Bali 2004, ketika Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum, Aburizal Bakrie memiliki kesamaan latar belakang sebagai seorang pengusaha kaya.

Merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Ical menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas ke-delapan di Pekanbaru maka faktor keunggulan materi dan faktor dukungan dari Pemerintahan SBY jilid ke-dua untuk meneruskan koalisi dengan Partai Demokrat di Parlemen. Ke-dua faktor ini menjadi sumber kekuatan utama bagi kemenangan kubu Ical dalam perebutan kekuasaan Pimpinan Partai Golkar. Kemenangan Ical sesungguhnya memiliki kesamaan dengan cara-cara dan faktor kemenangan JK di dalam Munas di Bali tahun 2004.

¹⁶⁵ <http://www.akbartandjunginstitute.org/index.php/detail/view01/1187>

¹⁶⁶ *ibid.*

¹⁶⁷ *Vivanews*, Rabu, 7 Oktober 2009, pukul 00.12 WIB.

Faktor isu kader-kader Golkar yang pragmatis di dalam Munas menjadikan isu *money politic* menjadi isu yang biasa pada saat Munas. Berpijak pada pengalaman pada Munas 2004 dimana kader-kader yang memiliki hak suara memilih Ketua Umum yang baru tidak lagi berdasarkan kepada latar belakang prestasi dan jenjang karir di dalam organisasi kepartaian. Faktor kekuatan finansial menjadi faktor utama dalam persyaratan untuk menjadi Ketua Umum. Gizi dalam pengertian yang berkaitan dengan materi bisa berupa uang, mobil, jabatan dan lain sebagainya. Senada dengan pendapat Yunarto Wijaya salah satu analis politik Charta Politik berpendapat :

“Kemenangan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014 dalam Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau dengan mengalahkan calon kuat Surya Paloh tidak terlepas dari faktor ‘gizi’ (*money politics*). Faktor ‘gizi’ dalam politik, khususnya politik praktis merupakan hal yang lazim dan sering dilakukan oleh elite-elite partai politik”.¹⁶⁸

Bahkan para kontestan calon Ketua Umum tidak segan-segan memberikan janji berupa insentif uang apabila terpilih menjadi Ketua Umum. Aburizal Bakrie menjanjikan akan memberikan dana abadi sebesar 1 triliun yang digunakan untuk menjalankan semua operasional Partai Golkar sedangkan Tommy Soeharto berjanji akan memberikan Rp.500 juta rupiah kepada DPD I apabila ia terpilih menjadi Ketua Umum.¹⁶⁹ Pertarungan menjadi Ketua Umum seperti layaknya seorang pedagang yang menawarkan harga yang apabila pas maka terjuallah kepada pembeli. Hal ini menyebabkan pertarungan di dalam perebutan kursi Ketua Umum pada Munas ke-delapan bagaimana membangun visi besar Partai, namun bagaimana gizi yang ditawarkan kepada para pemegang suara. Pasca keberhasilan Partai Golkar keluar dari kemelut tekanan arus reformasi dan kembali berjaya menjadi Partai pemenang Pemilu. Berdampak kepada tidak kuatnya lagi persatuan di dalam tubuh Partai mengenai sosok Ketua Umum yang berdasarkan merit-system. Merupakan sesuatu kewajaran apabila faktor perekat di dalam Partai Golkar sangat rentan dan berdasarkan kepada pragmatisme politik. Rully Chairul Azwar menuturkan :

¹⁶⁸ <http://www.indonesiabicara.com/y-wijaya-kemenangan-ical-karena-money-politics/>

¹⁶⁹ lihat situs <http://news.okezone.com/read/2009/10/08/339/263658/munas-riau-kemenangan-akbar-atas-jk> diakses pada 12 Mei 2012.

“Jadi mungkin di era awal reformasi kita sebut survival, itu kita masih punya satu faktor yang kelihatannya penting perekatnya, karena ada ancaman makanya kita survival, sehingga itu yang menyebabkan konflik-konflik kedalam itu cepat terselesaikan karena serangan dari luar. Tapi setelah itu selesai, di era sekarang sejak era JK itu faktor perekatnya luntur”.¹⁷⁰

Kubu ical merupakan kubu pecahan Jusuf Kalla yang tidak mendukung pencalonan JK maju menjadi Presiden karena tahu bahwa gak akan menang pada Pilpres 2009. Pada saat Rapim dimana Pak JK mengumumkan “saya akan maju sebagai Capres”, Kelompok ini sudah mengkristal dan disitulah Pak Ical berada. Dan Surya Paloh memberikan dukungan kepada pak JK maju terus menjadi Capres. Dan itu berlanjut kepada Munas (ke-delapan di Pekanbaru, 2009). Nah disitulah para pendukung Ical sejak awal mengklaim bahwa apabila nanti Ical terpilih menjadi Ketua Umum, kelompok pendukung JK harus menyingkir dari kepengurusan.¹⁷¹

Terbentuknya kubu yang tidak akan kembali mendukung JK untuk maju di dalam Munas Golkar di Pekanbaru 2009, telah dimulai pada saat beberapa kader Golkar yang tergabung di dalam kepengurusan Golkar periode Jusuf Kalla tidak menyetujui JK maju sebagai Capres pada Pilpres 2009. Sejumlah kader yang tidak mendukung JK untuk maju sebagai Capres disebabkan keyakinannya bahwa JK akan kalah. Kader-kader yang memisahkan diri dan memilih untuk tidak mendukung JK salah satunya digerakkan oleh Ical. Sedangkan kader yang mendukung penuh agar JK tetap maju sebagai Calon Presiden adalah Surya Paloh. Sehingga menjadi suatu kewajiban apabila JK lebih mendukung Surya Paloh untuk menjadi Ketua Umum meskipun pada saat JK berhasil menjadi Ketua Umum tidak terlepas dari dukungan Ical.

Pada saat Pilpres 2009 dimana JK tidak lagi berada dalam satu pencalonan Capres dan Cawapres seperti pada Pilpres 2004 bersama SBY, menjadikan dukungan Pemerintahan SBY jilid kedua tidak berada pada pihak JK yang mendukung Surya Paloh pada saat Munas. Justru ada kemungkinan besar jika Surya Paloh menjadi Ketua Umum Golkar akan memilih berada diluar

¹⁷⁰ Wawancara Hanta Yudha bersama Rully Chairul Azwar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009.

¹⁷¹ Wawancara dengan Rully Chairul Azwar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

Pemerintahan SBY. Hal ini menjadi kelemahan dari kubu Surya Paloh adalah di mata banyak kader yang memilih mendukung Ical karena dekat dengan kekuasaan dan sekaligus tidak mendukung JK pada saat Pilpres 2009. Jika Surya Paloh terpilih ada kemungkinan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat di Parlemen¹⁷². Tentu kecenderungan para kader Golkar pada Munas 2009 di Pekanbaru akan mendukung calon Ketua Umum yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Ical sendiri selama masa Pemerintahan SBY jilid pertama dipercaya menjadi Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Oleh sebab itu keyakinan dari kader Golkar apabila Ical terpilih menjadi Ketua Umum, Golkar akan kembali mendapatkan kursi Menteri di Kabinet SBY jilid ke-dua.¹⁷³ Bertitik tumpu pada pengalaman kemenangan JK pada Munas Bali 2004 dimana faktor kekuasaan di dalam Pemerintahan terhadap akses jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan menjadi daya tarik para kader Golkar untuk mendukung JK. Begitu pula faktor kedekatan dengan kekuasaan menjadi kekuatan bagi kubu Ical untuk memenangkan pertarungan pada Munas Golkar 2009.

Faktor kekuatan finansial dan kedekatan dengan sosok SBY yang memberikan peluang terhadap akses jabatan strategis di dalam Kabinet menjadikan Ical memiliki keunggulan bila dibandingkan Surya Paloh meskipun memiliki kekuatan finansial yang kuat. Faktor kedekatan terhadap akses jabatan di dalam Pemerintahan memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kubu Surya Paloh. Partai Golkar yang tidak bisa lepas dari kekuasaan telah menjadi darah daging dalam tubuh organisasi, memberikan keuntungan bagi Ical agar para kader Golkar menunjuknya sebagai Ketua Umum Golkar di Munas Golkar Pekanbaru, tahun 2009.

¹⁷² <http://www.akbartandjunginstitute.org/index.php/detail/view01/1145> diakses pada 12 Mei 2012

¹⁷³ *Ibid.*

BAB IV
DEMOKRASI INTERNAL GOLKAR PADA PEMILIHAN KETUA
UMUM DI MUNAS (1998, 2004, dan 2009).

Pada bab ini membahas mengenai analisis demokrasi internal di dalam Partai Golkar dengan melihat hasil sosok Ketua Umum yang terpilih pada ke-tiga Munas. Pertarungan di dalam memenangkan kursi Ketua Umum menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana kematangan demokratisasi di dalam Golkar. Dalam penulisan Bab empat ini, akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu pergeseran ideologi paradigma baru menjadi pragmatisme politik, berakhirnya merit-system menjadi oligarki system, tantangan Golkar dalam hegemoni pragmatisme politik di tubuh organisasi.

4.1. PERGESERAN IDEOLOGI PARADIGMA BARU MENJADI PRAGMATISME POLITIK.

Berakhirnya kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang bertahan hingga 32 tahun, menjadi pelecut pula bagi akhir kekuasaan Soeharto di dalam tubuh Organisasi Golkar. Demonstrasi yang hampir merata di seluruh Indonesia menuntut Soeharto turun dari jabatan Presiden, menjadi pertanda kuat bagi berakhirnya karir politik Soeharto. Golkar sebagai mesin legitimasi Rezim Orde Baru, justru mendorong agar Soeharto mundur sebagai Presiden melalui pernyataan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar pada masa itu. Kondisi politik nasional pada saat krisis moneter memberikan pilihan politik yang sulit bagi Golkar untuk tidak mengikuti tuntutan rakyat yang menginginkan penguasa Orde Baru meletakkan jabatannya.

Berakhirnya karir politik Soeharto di dalam sistem politik Indonesia, berdampak kepada pilihan Soeharto untuk tidak lagi memberikan sumbangsih bagi Golkar terutama menyangkut pendanaan organisasi Golkar yang selama rezim Orde Baru berasal dari Yayasan yang dinaungi oleh Soeharto. Sesungguhnya jika dilihat dari sisi organisasional, hilangnya patron Soeharto di

dalam tubuh Golkar berdampak positif. Sisi positif dilihat dari kemandirian Partai Golkar untuk bisa menetapkan keputusan dan kebijakan Partai berdasarkan kesepakatan melalui mekanisme Organisasi yang disepakati bersama seperti dalam hal pemilihan Ketua Umum melalui Munas.

Dihapuskannya posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang memiliki hak 'veto' di dalam menentukan segala keputusan Golkar, menjadikan posisi Ketua Umum menjadi satu-satunya posisi tertinggi yang dapat menentukan kebijakan Partai. Proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada masa Reformasi menjadi hal yang menentukan bagi masa depan Partai Golkar. Sosok Ketua Umum yang terpilih akan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan 'nakhoda' Partai dan sekaligus menentukan langkah-langkah penting dalam kebijakan politik Golkar di Parlemen dan Pemerintahan. Tidak mengherankan menjadi Ketua Umum Golkar menjadi pertarungan penting bagi kader-kader Golkar terutama untuk mencapai kekuasaan.

Masing-masing Ketua Umum yang terpilih memiliki keunggulan dan strategi politik yang berbeda pada saat Munas. Situasi politik di luar lingkungan Partai Golkar juga memberikan pengaruh terhadap terpilihnya seorang calon Ketua Umum. Pembentukan faksi pendukung dalam kampanye menjelang Munas merupakan hal yang menentukan bagi penggalangan dukungan memenangkan pertarungan kursi Ketua Umum. Kemampuan *resources*, perangkulan kader-kader sebagai faksi pendukung pada Munas, dukungan rezim yang berkuasa menjadi hal yang mempengaruhi kemenangan seorang Ketua Umum Partai Golkar Reformasi pada Munas.

4.1.1 Kemenangan Ideologi Paradigma Golkar Baru Pada Munaslub 1998

Munaslub Golkar yang berlangsung di Jakarta, tahun 1998 merupakan titik awal dari keberhasilan upaya membangun Partai Golkar yang bebas dari pengaruh Soeharto dan militer. Persaingan di dalam Munaslub 1998 sesungguhnya dilakukan oleh tiga kubu besar. Kubu militer yang berada di bawah faksi Edi Sudrajat. Kubu yang memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto dan birokrasi rezim Orde

Baru yaitu berada di bawah faksi Ary Moerdjono dan Sarwono Kusumaatmadja. Kubu Akbar Tandjung yang merupakan faksi dari kelompok sipil yang ingin melakukan pembersihan organisasi dari kekuatan Orde Baru yaitu faksi militer dan faksi Soeharto sebagai upaya agar Golkar tetap bisa masuk dalam arus Reformasi.

Kemenangan Akbar Tandjung dengan menggunakan bendera reformasi sebagai prinsip yang diperjuangkan di dalam Munaslub 1998 merupakan awal bagi upaya memandirikan Golkar dengan nilai-nilai reformasi. Nilai-nilai reformasi yaitu menghilangkan nilai-nilai yang telah lama mendarah daging di dalam tubuh Golkar yang menyebabkan Golkar tidak bisa mandiri untuk bisa menjadi kekuatan politik yang hanya bergantung kepada kekuatan organisasi. Kemandirian sebuah organisasi hanya bisa dibangun oleh kekuatan yang berasal dari kader-kadernya sendiri.

Dukungan terhadap Akbar Tandjung untuk menjadi Ketua Umum pada saat Munaslub 1998 berasal dari internal dan eksternal Partai Golkar. Internal Golkar yang mendukung Akbar Tandjung adalah kader Golkar yang berasal dari Jalur G (Golkar). Jalur G adalah jalur yang melakukan perekrutan kader Golkar melalui Organisasi sayap Golkar, seperti HMI, KNPI, Satkar Ulama, MDI, HWK, AMPI, Al Hidayah dan lain sebagainya. Meskipun tidak semua fungsionaris Golkar yang mendukung Akbar memiliki keinginan yang sama untuk terus mempertahankan Golkar. Kekuatan eksternal yang mendukung Akbar adalah Habibie yang merupakan kader Golkar namun menjabat sebagai Kepala Pemerintahan menggantikan Soeharto pada saat itu.

Semangat reformis yang diusung oleh Akbar Tandjung dalam upaya menjadikan Golkar menjadi organisasi yang sejalan dengan cita-cita Reformasi merupakan simbol utama perjuangan untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Akbar Tandjung menginginkan perombakan secara struktural di dalam tubuh organisasi Golkar apabila terpilih menjadi Ketua Umum. Hanya Ketua Umum yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan keputusan politik organisasi Golkar setelah dihapuskannya posisi Ketua Dewan Pembina. Akbar Tandjung

yang masuk ke dalam tubuh Golkar melalui proses jenjang karir sebagai aktivis dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan Pemuda memiliki jaringan pendukung organisasi massa yang besar pada masa Munaslub.

Sosok Akbar Tandjung dikenal baik sebagai seorang politisi yang berasal dari aktivis. Pengalaman yang lama dalam berorganisasi memberikan pengaruh bagi dukungan yang diperoleh dari banyak organisasi sayap pendukung Golkar. Bahkan organisasi-organisasi Islam seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) turut mendukung pencalonan Akbar disebabkan sosok Akbar dinilai sebagai seseorang yang memiliki corak kepemimpinan sipil yang humanis lepas dari doktrin militer.¹⁷⁴ Latar belakang politisi sipil memberikan pengaruh positif dalam perjuangan Akbar untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Disebabkan latar belakang Akbar sebagai politisi sipil yang memulai karir sebagai aktivis di berbagai organisasi seperti HMI, KNPI dan menjadi politisi Golkar di DPR, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa melakukan persiapan kampanye meraih dukungan terhadap DPD-DPD I yang memiliki hak suara. Pada saat Munaslub dukungan kampanye pemenangan kubu Akbar Tandjung juga didukung oleh kalangan pengusaha kaya yang bersimpati pada perjuangan Akbar untuk melakukan reformasi total terhadap Golkar. Pengusaha kaya yang mendukung Akbar pada Munaslub 1998 adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yaitu Aburizal Bakrie yang memberikan dukungan finansial dengan menghabiskan 1,8 Milyar Rupiah yang dipakai sebagai lobi dalam upaya pemenangan Akbar.¹⁷⁵

Pertarungan Akbar di dalam Munaslub sesungguhnya bukanlah pertarungan antara kelompok Islam dengan kelompok yang memiliki wawasan kebangsaan, karena pada dasarnya DPD yang memberikan suaranya kepada Akbar cenderung lebih suka apabila Akbar yang memimpin Golkar dibandingkan kekuatan lama yang memiliki kedekatan dengan Soeharto disebabkan perangai anak Soeharto yang banyak tidak disukai oleh para pengurus DPD I Golkar di

¹⁷⁴ Stanley dkk. *Golkar Retak?*, Institut Arus Informasi, Jakarta, 1999, hlm. 155

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 144

seluruh Indonesia.¹⁷⁶ Hal ini dapat dipahami dengan melihat seperti DPD I Irian Jaya yang memberikan dukungan kepada Akbar dan DPD I Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Pepabri memberikan dukungannya kepada Akbar.

Berkembangnya isu perebutan kekuasaan Ketua Umum antara kelompok militer melawan kelompok politisi sipil sesungguhnya memberikan keuntungan bagi pencitraan kubu Akbar Tandjung dari segi arus aspirasi pasar yang anti militer dan anti Soeharto.¹⁷⁷ Pembangunan pencitraan yang dilakukan Akbar dengan memanfaatkan kondisi arus pasar yang anti militer dan anti Soehartois diperkuat dengan menggunakan jasa konsultan komunikasi politik profesional serta pendekatan secara personal kepada media yang menyebabkan Akbar selalu tampil di dalam pemberitaan media secara baik dalam upaya mendapatkan simpati masyarakat.¹⁷⁸ Langkah pencitraan yang dilakukan Akbar tidak hanya pada foto kegiatan yang dilakukan Akbar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun juga pada pesan-pesan politik yang disampaikan kepada media sehingga memberikan pemaknaan yang baik terhadap sosok Akbar.

Kemenangan ideologi di dalam Munaslub 1998 sejatinya dapat dilihat dengan basis pendukung Akbar yang berasal dari jaringan organisasi sayap Golkar. Ideologi yang diusung Akbar yaitu dengan menjadikan Golkar sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan pada organisasi-organisasi sayap Golkar lepas dari militer dan birokrasi. Akbar melihat bahwa satu-satunya harapan untuk bisa tetap mempertahankan Golkar di arus reformasi adalah dengan menjadikan Golkar sejalan dengan tekanan reformasi. Disamping itu pula sesungguhnya dengan lengsernya Soeharto sebagai *Godfather* Golkar, menjadi momentum peluang bagi politisi sipil untuk bisa mengendalikan Golkar tanpa ada pengaruh dari rezim dan militer seperti pada masa Orde Baru.

Golkar tetap kuat meskipun perkembangan Golkar sangat disokong oleh Rezim dan militer, namun ormas pendiri dan ormas sayap pendukung memiliki

¹⁷⁶ Lihat *Forum Keadilan*, 7 Juli 1998 hlm. 3.

¹⁷⁷ Rully Chairul Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era, dari Partai Hegemonik ke Partai Beorientasi Pasar*, PT Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 132.

¹⁷⁸ *Ibid.* hlm. 124-125.

kader yang besar untuk tetap bisa menjadi basis dukungan massa Golkar tanpa militer dan rezim. Pertarungan Akbar di dalam Munaslub 1998 menjadi ajang bagi upaya memantapkan pengaruh ormas pendiri dan sayap pendukung Golkar sebagai saluran utama bagi kaderisasi Golkar di era reformasi. Pemutusan jalur A dan jalur B sebagai saluran pendukung utama organisasi Golkar, sebagai bukti keseriusan Akbar untuk memberikan peranan lebih dari kader-kader Golkar yang berasal dari ormas pendiri (KINO) dan ormas sayap pendukung Golkar untuk lebih berpengaruh terlibat di dalam membesarkan Golkar dibandingkan pada masa Orde Baru.

Melihat tekanan masyarakat yang ingin membubarkan Golkar karena peranan Golkar yang besar sebagai mesin politik Rezim Orde Baru. Sosok yang dapat menyelamatkan Golkar pada saat awal Reformasi adalah orang yang memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam berorganisasi. Simbol beringin telah menjadi simbol perlawanan reformasi terhadap penguasa Orde Baru. Hal ini menjadikan Golkar sangat rentan dan bisa memiliki masa depan yang suram apabila dipimpin oleh Ketua Umum yang tidak berpengalaman dalam berorganisasi, tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, tidak memiliki rasa pengorbanan yang besar demi mempertahankan Golkar serta bukanlah dari kelompok militer ataupun kedekatan dengan keluarga Cendana. Akbar memiliki semua syarat-syarat untuk menjadi pimpinan Golkar pada saat itu di tengah arus turbulensi yang bisa menghapuskan Golkar dari peredaran sistem kepartaian Indonesia di era Reformasi.

Pada munaslub 1998 yang memperebutkan posisi kursi Ketua Umum Golkar sesungguhnya terdapat pertarungan nilai-nilai yang menentukan bagi kelangsungan organisasi Golkar. Pertarungan nilai yang dipegang oleh Akbar adalah nilai perjuangan untuk menyelamatkan Golkar, apabila kembali direbut oleh militer dan soeharto maka Golkar akan hancur. Tidak semua fungsionaris Golkar pada saat itu benar-benar menunjukkan itikad untuk mempertahankan Golkar karena Golkar yang sudah sangat identik dengan kekuasaan Orde Baru. Prediksi yang melihat runtuhnya Orde Baru akan berdampak pada runtuhnya

Golkar sebagai kekuatan politik banyak dipercaya oleh banyak pihak baik pengamat politik maupun fungsionaris Golkar lainnya.¹⁷⁹

Kemenangan Akbar juga sangat dipengaruhi kepentingan dari kelompok Iramasuka yang berkepentingan untuk meneruskan Habibie menjadi Presiden. Kelompok Edi telah jelas ingin mengagalkan Habibie karena dianggap sebagai pengkhianat Soeharto. Kelompok Iramasuka yang merupakan faksi pendukung loyalis Habibie mendukung Akbar sebagai Ketua Umum meskipun memiliki agenda politik yang berbeda, namun jelas tidak mendukung Golkar kembali dipegang oleh kelompok militer maupun orang-orang yang memiliki sejarah kedekatan dengan keluarga Soeharto.

Peran serta dan dukungan Fahmi Idris untuk mendukung Akbar menghadapi Edi Sudrajat pada pemilihan Ketua Umum Munaslub 1998 tidak dapat dikesampingkan. Sesungguhnya melihat pertarungan pada Munaslub 1998, kursi Ketua Umum Golkar pada saat itu lebih menjanjikan kesuraman dibandingkan kejayaan. Kursi Ketua Umum meskipun menjadi pimpinan tertinggi di dalam Golkar, akan tetapi dibawah tekanan reformasi Golkar justru berada dibawah ambang kehancuran. Menjadi Ketua Umum Golkar pada saat situasi tekanan reformasi bukanlah jabatan yang menjanjikan bagi kekuasaan.

Tidak mengherankan banyak fungsionaris dan pimpinan Golkar tidak menaruh kepentingan yang besar untuk terlibat dan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar pada Munaslub 1998. Oleh sebab itu para pemilik suara DPD I pada saat Munaslub 1998 meskipun tidak semua berpandangan untuk terus memperjuangkan Golkar, namun sosok Ketua Umum Golkar yang akan terpilih harus memiliki jiwa kepemimpinan dan pengorbanan yang tinggi untuk menyelamatkan Golkar. Menjadi Ketua Umum pada huru-hara 1998 lebih terlihat memerlukan kerja keras dan perjuangan dibandingkan memberikan keuntungan bagi karir politik di dalam sistem politik pada masa awal Reformasi. Akbar yang memiliki pengalaman di berbagai organisasi massa telah terlatih dan terbina

¹⁷⁹ Wawancara Rully Chairul Azwar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

memiliki mental aktivis yang berani berjuang dan menanggung resiko demi mempertahankan Golkar di bawah tekanan arus Reformasi.

Akbar ingin menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang mengusung semangat reformasi dengan membangun jaringan organisasi yang merekrut kader-kader militan yang loyalis Semangat reformasi yaitu semangat untuk mengembalikan supremasi sipil dalam setiap sendi kehidupan politik. Dukungan dari organisasi sipil akan memberikan pencitraan yang baik bagi perjuangan untuk merebut Golkar dari tangan kelompok militer dan cengkeraman anak-anak Soeharto yang ingin menguasai Golkar. Kemenangan Akbar juga sangat dipengaruhi kepentingan dari kelompok Iramasuka yang berkepentingan untuk meneruskan Habibie menjadi Presiden. Kelompok Edi telah jelas ingin mengagalkan Habibie karena dianggap sebagai pengkhianat Soeharto. Kelompok Iramasuka yang merupakan faksi pendukung loyalis Habibie mendukung Akbar sebagai Ketua Umum meskipun memiliki agenda politik yang berbeda, namun jelas tidak mendukung Golkar kembali dipegang oleh kelompok militer maupun orang-orang yang memiliki sejarah kedekatan dengan keluarga Soeharto.

Faksi-faksi yang tergabung baik di dalam kelompok Edi maupun Akbar merupakan faksi yang terbentuk dari perbedaan prinsip terhadap masa depan Golkar. Meskipun kader-kader Golkar yang mendukung Edi dan Akbar tidak memiliki agenda yang benar-benar sama dengan sang calon Ketua Umum. Kader-kader yang tergabung di dalam Faksi Edi dan Faksi Akbar adalah faksi yang tergabung pada dasarnya bersifat sementara dan taktis. Faksi yang tergabung pada saat Munaslub 1998 menyangkut isu politik mengenai kelompok yang ingin melakukan perubahan di dalam Golkar sesuai dengan arus semangat reformasi dan kelompok yang ingin kembali berkuasa karena merasa memiliki kewenangan untuk kembali berkuasa di dalam Golkar. Baik Faksi Edi maupun Faksi Akbar tidak memiliki ikatan formal yang bersifat jangka panjang namun

disatukan kepada satu kepentingan besar yang sama mengenai masa depan Golkar.¹⁸⁰

Orientasi dari Faksi Akbar adalah pada perjuangan untuk mereformasi struktur kepengurusan dan kaderisasi organisasi Golkar yang hanya menerima jalur G untuk menjadi keanggotaan Golkar. Kader-kader yang bergabung di dalam Faksi Akbar mengetahui perlunya melakukan perubahan yang mendasar dengan memutus mata rantai peranan ABRI dan keluarga Soeharto di dalam Golkar karena tidak sesuai dengan semangat reformasi dan situasi politik pada masa Reformasi. Apabila sosok yang terpilih adalah kalangan militer dan memiliki keterkaitan dengan keluarga Soeharto akan menyebabkan Golkar terpuruk dan hilang dari percaturan politik di era Reformasi. Tidak mengherankan dukungan para kader Golkar lebih berpihak kepada Akbar meskipun taktik politik dan kepewawain Akbar dalam menarik simpati dan dukungan melalui lobi kampanye ke DPD-DPD sangat menentukan.

Melihat hasil Munaslub 1998 yang menghasilkan keputusan melalui proses voting memilih Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum merupakan keputusan yang baik jika melihat dari syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Ketua Umum. Menurut Alan Warre bahwa hal yang paling utama yang harus dimiliki di dalam rekrutmen politik menyangkut pimpinan partai pada saat sekarang yaitu harus telah memiliki pengalaman yang lama sebagai seorang legislator, bekerja sebagai legislator partainya yang berada di parlemen menjadi jalan untuk tangga karir bagi seseorang untuk bisa naik menjadi seorang pimpinan partai.¹⁸¹ Akbar Tandjung yang memiliki pengalaman di berbagai organisasi sayap Golkar seperti menjadi pernah menjabat sebagai pimpinan HMI, KNPI, dan memiliki pengalaman yang lama di Parlemen dan pernah menjabat sebagai Ketua DPR-RI 1999-2004, memenuhi prasyarat untuk dapat menjadi Ketua Umum Golkar. Hal ini juga menjadi contoh yang baik bagi organisasi Golkar dengan

¹⁸⁰ Paul G Lewis, *Political Parties in Post-Communist Eastern Europe*, New York: Routledge, 2000, hlm 116.

¹⁸¹ Alan Warre, *Political Parties and Party Systems*, New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 144

terpilihnya Akbar sebagai seorang sosok yang menaiki karir di dalam Golkar dari level grass roots yang berasal dari HMI, menjadi Ketua AMPI, kemudian masuk ke dalam kepengurusan Pusat, menjadi anggota Dewan Pembina, terpilih sebagai legislator mewakili Golkar di Parlemen, dan seterusnya hingga menjadi Ketua Umum Golkar akan menjadi pembelajaran yang baik bagi kader-kader Golkar lainnya.

Kekuatan organisatoris menjadi hal utama bagi kemenangan Akbar di dalam Munaslub 1998. Meskipun tidak dapat dipungkiri dukungan dari pengusaha seperti Aburizal Bakrie memainkan peranan penting dalam merangkul dukungan dari para kader. Kelompok pengusaha yang mendukung Akbar tentu mempertimbangkan pentingnya memperjuangkan kepentingan yang lebih besar yaitu menyelamatkan organisasi Golkar dengan melakukan perubahan penting terutama dalam mendukung Ketua Umum Golkar yang baru yang memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan semangat Reformasi.

Kemenangan ideologi di dalam Munaslub 1998 adalah kemenangan yang berdasarkan kepada pertarungan ideologi reformasi yang diusung faksi Akbar mengalahkan ideologi dwifungsi ABRI yaitu tetap menginginkan militer terlibat di dalam kehidupan organisasional Golkar. Ideologi reformasi yaitu menginginkan agar Golkar dapat menjadi organisasi mandiri dan bebas dari pengaruh militer dan sisa-sisa kekuatan Rezim Orde Baru. Selama Orde Baru peranan militer dan Rezim Orde Baru yang terlampau besar menyebabkan Golkar tidak dapat menjadi kekuatan politik yang murni sebagai suatu Partai Politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Keberhasilan Akbar setelah menjadi Ketua Umum tidak membawa ideologi yang ke-kiri (sosialis) atau ke-kanan (liberal) sebagai pijakan Partai Golkar di dalam menentukan arah kebijakan politik di Parlemen dan Pemerintahan. Doktrin kekaryaan sebagai Partai terbuka tetap diusung dengan alasan bahwa kader-kader Golkar berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, kepentingan dan Agama. Eksklusifitas ideologi hanya akan menjadikan Partai Golkar sebagai Partai politik yang kerdil dan tidak mencakup seluruh

kepentingan bangsa yang memiliki multi-kultur dan multi-etnis. Ideologi kekaryaan masih menjadi tuntunan Partai Golkar Reformasi yaitu menciptakan kader-kader Golkar yang potensial dan profesional dalam mengisi jabatan publik baik di Parlemen maupun Pemerintahan.

4.1.2. Kemenangan Pragmatisme Politik Pada Munas 2004

Munaslub di Denpasar, pada tahun 2004 mendapat sorotan banyak pihak disebabkan sosok Akbar Tandjung dengan prestasinya menghantarkan Golkar dari zaman keterpurukan menjadi zaman kegemilangan tidak lagi terpilih menjadi Ketua Umum. Sosok yang mengalahkan Akbar adalah seorang Wakil Presiden yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha kaya raya dari Sulawesi Selatan. Pencalonan JK sebagai Ketua Umum pun mengejutkan dan membingungkan mengingat posisi JK sebagai Wapres Rezim yang berkuasa dan posisi Partai Golkar yang telah memutuskan menjadi oposisi Pemerintahan di Parlemen. Terpilihnya JK tentu saja tidak hanya membiaskan posisi Ketua Umum Golkar sebagai penentu kebijakan Partai yang akan selalu tidak mungkin untuk memilih kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintahan. Tidak mengherankan posisi Fraksi Golkar di Parlemen sebagai oposisi bersama PDI-P, PDS, PPP berubah dan menjadi koalisi bersama pemerintahan SBY-JK.

Kekalahan Akbar Tandjung terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar, digantikan oleh Jusuf Kalla menjadi awal bagi berakhirnya merit-system yang hendak dibangun di dalam Golkar. Regenerasi kepemimpinan Partai Golkar tidak lagi melalui proses perekrutan kader melalui pemenuhan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang kader sebelum maju sebagai calon Ketua Umum. Syarat-syarat pimpinan Partai seharusnya telah memiliki sejarah yang panjang di dalam kepengurusan Partai terutama di dalam pengabdian seorang kader baik pada saat kemenangan pemilu maupun mewakili Partainya di Parlemen. Kapasitas pengalaman dan pengabdian yang lama di dalam Partai akan sangat menentukan bagi platform Partai di dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan politik Partai di Pemerintahan dan Parlemen.

Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 menjadi awal kemenangan pragmatisme politik pada saat pemilihan Ketua Umum Golkar. Pertarungan Ketua Umum menjadi sangat bergantung kepada gizi yang dapat ditawarkan kepada kader-kader Golkar untuk mendukungnya. Faktor pengabdian dan prestasi di dalam sejarah selama menjadi kader tidak menjadi hal yang utama dalam menentukan bakal calon Ketua Umum terpilih. Akbar yang tidak menjabat posisi apapun di dalam Pemerintahan selain sepenuhnya hanya fokus pada upaya mempertahankan dan mengembalikan Golkar sebagai Partai terkuat di dalam sistem kepartaian Indonesia. Oleh sebab itu pula Akbar hanya fokus pada langkah-langkah konsolidasi dan membangun komunikasi yang intensif dalam upaya memperkuat fungsi Partai Golkar hingga ke pelosok daerah. Akbar Tandjung berargumen yaitu :

Pada Munas 2004 itu terkait pertarungan antara visi reformasi dengan motivasi yang dibawa oleh saya kedua visi yang terkait obsesi berada di dalam kekuasaan ditambah motivasi adanya praktek-praktek money politik. orang-orang yang pragmatisme melawan visi orang2 demokrasi. nah orang2 itu tadi yang memperoleh uang adalah orang2 yang pragmatis.¹⁸²

Kekuatan yang dibangun oleh Akbar untuk menjadi Ketua Umum Golkar kembali adalah dengan prestasi yang selama ini telah dibuktikannya sebagai Ketua Umum. Prestasi terbesarnya yaitu pada saat menjelang Munas 2004, ia berhasil menjadikan Golkar pemenang Pemilihan Legislatif 2004. Komunikasi dan konsolidasi yang rutin dilakukan oleh Akbar hingga ke daerah-daerah dalam upaya agar kebijakan Partai lebih efektif dan efisien dari Pusat hingga ke daerah-daerah di berbagai Provinsi Indonesia. Nama Akbar Tandjung tentu lebih dikenal baik dan populer dikalangan kader Golkar bila dibandingkan Jusuf Kalla.¹⁸³ Sumber kekuatan yang dibangun oleh Akbar untuk terpilih kembali menjadi Ketua Umum yaitu melalui komunikasi yang baik dan prestasi yang memuaskan selama menjadi Ketua Umum Golkar. Suara kader yang lebih banyak memilih

¹⁸² Wawancara dengan Dr. Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar Periode 1998-2004, Jakarta, 26 Mei 2012, pukul 11.00 WIB.

¹⁸³ Jusuf Kalla cukup tenar dikalangan fungsionaris Golkar yang berasal dari Indonesia Timur yaitu kelompok Iramasuka.

Jusuf Kalla untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tandjung menunjukkan pragmatisme politik di dalam tubuh organisasi Golkar. Mengingat keberhasilan Akbar mempertahankan Golkar dan menghantarkan kembali menjadi Partai yang memiliki kader terbanyak menjadi wakil di Parlemen 2004 sesungguhnya sulit diterima secara logika politik Akbar tidak dapat terpilih kembali menjadi Ketua Umum. Pilihan kader Golkar memilih Jusuf Kalla tidak terlepas dari *resources* yang dimilikinya yaitu sumber daya kekuasaan sebagai Wapres dan sumber finansial sebagai seorang pengusaha kaya.

Satu hal yang sulit dan tidak dapat diubah di dalam mentalitas organisasi Golkar adalah selalu dekat dengan kekuasaan. Pilihan Akbar untuk berani melakukan manuver politik dengan pertama kalinya Golkar mengambil posisi sebagai oposisi ternyata menyebabkan banyak kader yang tidak menyukai kebijakan Golkar tersebut. Kader-kader Golkar tidak terbiasa untuk mengambil sikap tidak menjadi bagian dalam Pemerintahan. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada Rezim SBY jilid pertama tentu memiliki akses untuk dapat memasukkan kader-kader Golkar menduduki beberapa pos di Kabinet Menteri yang dipimpinnya bersama SBY. Kekuasaan di dalam Pemerintahan tentu hanya dimiliki JK pada saat pencalonan Ketua Umum Golkar di Munas 2004.

Tidak dapat terpisahkan dari kekuasaan menjadi simbol yang mendarah daging dikalangan mayoritas kader Golkar terutama yang tergabung di dalam faksi Jusuf Kalla dalam Munas 2004. Hal ini seperti dituturkan oleh Firman Soebagyo yang menjabat sebagai Ketua Tim Sukses Pemenangan Pemilu SBY-JK di Madura dan sekaligus pemenang Jusuf Kalla pada Munas 2004. Firman berpendapat :

“Golkar tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Saya bisa membuktikan dengan thesis saya bahwa memang semua partai politik untuk dapat bertahan di dalam sistem politik harus terlibat di dalam kekuasaan. Hanya dengan masuk di dalam kekuasaan, Partai politik dapat berkembang. Sumber pendanaan Partai politik yang baik adalah bersumber dari kader-kadernya. Sehingga bagaimana mungkin kader dapat menyumbang bagi Partai apabila dia tidak memiliki jabatan. Jabatan di dalam kekuasaan akan

memberikan pemasukan dana bagi kader dan berdampak pula bagi Partai”.¹⁸⁴

Logika politik menyangkut kekuasaan yang tak dapat dipisahkan dari Golkar berpengaruh pada pilihan kader-kader Golkar untuk mendukung JK menjadi Ketua Umum. Kader-kader Golkar menjadi pragmatis lebih memilih JK karena posisinya yang dekat dengan kekuasaan Rezim pada saat itu.

Jabatan strategis di dalam Pemerintahan hanya kader Golkar tertentu yang mendapatkannya. Bagi kader-kader Golkar yang berada di kepengurusan DPD II tentu JK memiliki strategi lain untuk mendapatkan dukungannya. Disinilah taktik atau strategi uang digunakan untuk mendapatkan dukungan kader di tingkat DPD II yang berasal dari daerah-daerah. Tidak berlebihan jika Akbar berpendapat bahwa hal yang paling penting di dalam Golkar itu bukan kekuasaan, tetapi uang.¹⁸⁵ Meskipun tidak dapat dibuktikan secara pasti, namun perilaku *money politic* pada saat mencari dukungan suara pada Munas menjadi rahasia umum para kader Golkar. Rully Azhwar berpendapat :

“Disamping karena Akbar memiliki banyak musuh pada saat Munas, namun pragmatisme politik saya yakin berlangsung pada saat Munas di Bali. Meskipun hal itu tidak dapat dibuktikan secara empiris, namun pragmatisme politik yaitu menyangkut sebar uang pada saat Munas saya yakin memang berlangsung terjadi seperti yang diberitakan media. Namun saya tidak tahu berapa besaran yang diberikan kepada kader pada saat itu”.¹⁸⁶

Pesta demokrasi dalam menyampaikan aspirasi kader terbawah terhadap calon pimpinan Golkar pada Munas menjadi pertarungan kekuatan uang. Uang menghilangkan ingatan para kader Golkar terhadap pidato pertanggung jawaban Akbar Tandjung yang diiringi oleh *standing ovation* dari para kader bahkan sebanyak dua kali. Mentalitas para kader Golkar ternyata tidak memikirkan pentingnya pengaruh seorang Ketua Umum yang terpilih terhadap masa depan Partai terutama di dalam menentukan langkah kebijakan jangka panjang.

¹⁸⁴ Wawancara Firman Soebagyo, Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2012

¹⁸⁵ Jeffrey Winters, Op. Cit., hlm. 280

¹⁸⁶ Wawancara Rully Chairul Azwar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

Keuntungan yang diperoleh secara instan yaitu berupa uang yang ditawarkan pada saat Munas begitu mempengaruhi alasan pilihan kader.

Menunjukkan bahwa pada saat Munas pertarungan memperebutkan kursi Ketua Umum begitu *lack of political ideology debate*. Persaingan tidak berdasarkan perdebatan antar calon Ketua Umum menyangkut visi-misi Partai yang terlihat dari pertarungan ide dan kebijakan yang akan dilakukan kepada Partai apabila terpilih menjadi Ketua Umum. Para kader yang akan memilih tidak disuguhkan mengenai strategi politik dan kebijakan Partai dari masing-masing Calon sehingga para kader dapat memilih berdasarkan akal sehat dan pemikiran yang rasional dalam menentukan calon Ketua Umum yang baru. Kursi Ketua Umum seolah-olah menjadi kursi cantik yang seolah-olah diperdagangkan kepada siapa saja yang bisa memenuhi harga yang ditetapkan oleh para kader.

Bersatunya kader Golkar yang berada di luar sistem kepengurusan Akbar, seperti Fahmi Idris, kelompok Iramasuka, dan kader Golkar yang menjadi tim sukses SBY-JK membentuk faksi anti-Akbar. Para pengusaha kaya seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh ikut mensponsori faksi anti-Akbar guna memuluskan upaya menggagalkan kemenangan Akbar menjadi Ketua Umum kembali. Faksi anti-Akbar adalah faksi yang terbentuk tidak bertahan lama dan bersifat jangka pendek karena hanya berkepentingan untuk menyingkirkan Akbar dari kursi Ketua Umum Golkar. Faksi yang mendukung JK tidak memiliki ikatan formal dan kekuatan yang mengikat untuk jangka panjang karena tidak disatukan atas visi dan kesamaan pandangan yang bersifat prinsipil dan ideologis.

Perebutan kursi Ketua Umum penuh dengan strategi dan kepentingan politis namun lemah pada persaingan yang bersifat debat politik terkait visi dan misi calon Ketua Umum terhadap Partai apabila terpilih. Kader-kader Golkar pun mengambil keuntungan dan melihat peluang yang ada dengan melihat tawaran baik berupa jabatan kekuasaan maupun uang menjadi sangat pragmatis. Faksi yang mendukung JK tentu lebih kuat secara kekuatan finansial dan *power* di dalam *bargaining* mendapatkan dukungan dari kader Golkar. Bergabungnya dua pengusaha kaya dan sekaligus JK adalah pengusaha kaya pula maka memiliki

sumber daya kekuatan finansial yang sangat kuat dibandingkan faksi Akbar yang hanya didukung Wiranto seorang Jenderal Purnawirawan militer.

Para oligark yang bergabung di dalam faksi JK akan sulit untuk ditaklukan karena kampanye yang dilakukan oleh faksi yang didukung oleh dana yang besar akan lebih berpeluang untuk mendapatkan dukungan dibandingkan kelompok yang memiliki dana yang terbatas. Kekuatan finansial menjadi sarana bagi para pengusaha mencapai agenda politiknya menduduki jabatan politik. Pragmatisme politik muncul di dalam Munas Golkar disebabkan demokratisasi yang dibangun di dalam Partai Golkar tidak diikuti kultur politik yang baik. Kultur politik yang baik yaitu adanya proses merit-system yang benar-benar disepakati dan dijalankan oleh seluruh kader Partai sebagai satu-satunya mekanisme penilaian terhadap pantas tidaknya seorang calon mendapatkan jabatan di Partai.

Kemenangan JK menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas 2004 menjadi awal bagi kemenangan bagi keunggulan para kader Golkar yang berprofesi sebagai pengusaha kaya. Saudagar kaya memiliki keunggulan disebabkan keunggulan materi dan finansial yang dimilikinya dibandingkan kader Golkar yang membangun kekuatan politiknya di dalam pengalaman dan pengabdian untuk organisasi. Kader-kader Golkar yang memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan Partai dan berperan penting dalam perjuangan mempertahankan Golkar pada masa awal reformasi menjadi tidak penting dan menentukan seorang kader terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

4.1.3. Kemenangan Kembali Politik Pragmatis Pada Munas 2009

Terpilihnya Aburial Bakrie menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas 2009, menjadi keberlanjutan pragmatisme politik pada Munas 2004. Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada Kabinet Menteri Pemerintahan SBY-JK, serta latar belakang sebagai pemilik perusahaan Bakrie Group menjadi kekuatan yang dimiliki Ical untuk dapat terpilih menjadi Ketua Umum. Munas 2009 merupakan pertarungan dua saudagar kaya

yang bersaing karena hanya saudagar kaya yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara kekuatan finansial.

Ical yang terpilih menjadi Ketua Umum, mengikuti rekam jejak JK pada Munas 2004. JK menggunakan sumber daya kekuasaan yaitu menjabat sebagai Wapres dan sumber daya kekuatan finansial karena memiliki dana yang besar untuk membiayai kampanye mensukseskan pemilihannya. Sebagai seorang oligark, sumber dana untuk mendapatkan dukungan merupakan suatu hal yang tidak sulit bagi Ical. Pragmatisme politik telah menjadi mentalitas para kader Golkar untuk menentukan pilihan Ketua Umum bagi Partainya. Sejak Munas 2004, pemilihan Ketua Umum yang penuh nuansa pragmatisme politik menjadi pengalaman dan berkelanjutan pada Munas 2009.

Situasi Golkar yang tidak lagi berada di dalam tekanan seperti pada Munaslub 1998, serta berhasil menjadi Partai yang kembali diterima di dalam masyarakat Indonesia di era reformasi menjadikan Golkar sebagai sarana bagi pencapaian kekuasaan yang begitu potensial. Munas yang dijadikan sebagai upaya demokratisasi di dalam Partai Golkar dimana DPD I dan DPD II memiliki hak suara untuk menentukan Ketua Umum namun tidak mencerminkan proses demokrasi yang sehat. Proses demokrasi yang sehat adalah proses dimana terjadinya pertarungan yang bersifat ide dan ideologi sehingga seseorang memberikan dukungan atau tidak memberikan dukungan sangat bergantung kepada ide dan ideologi yang ditawarkan oleh calon Ketua Umum. Pikiran yang rasional dan itikad baik demi kepentingan Partai yang bersifat jangka panjang diperlukan untuk menjadikan Munas sebagai proses demokrasi yang sehat.

Faksi-faksi pendukung pada masa Munas 2009 merupakan faksi yang bersifat individual bukan kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau visi yang ditawarkan untuk Partai Golkar 5 tahun ke depan. Faksi-faksi pendukung terbentuk karena individu-individu yang berkumpul mendukung calon Ketua Umum yang sama atas dasar kesepakatan per-individu dengan calon Ketua Umum. Pragmatisme politik menjadi hal yang begitu kuat di dalam menentukan dukungan terhadap suatu calon. Syamsul muarif, berpendapat bahwa :

“Faksionalisasi yang terjadi itu kalau berlatar belakang kayak KOSGORO, MKGR, SOKSI, AMPI, and segala macam, kalau berasal dari itu gak ada masalah. Karena memang dia harus berlomba. Tetapi faksionalisasi itu tidak terjadi disitu, faksionalisasi itu terjadi adalah pergeseran dari kelompok fungsional menjadi individual. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang tidak memiliki track record, memiliki kemampuan finansial, dan sebagainya. Dia menjadi terhormat di Partai, walaupun dia belum tentu sudah punya track record panjang di partai. Karena partai ini berharga. Ketika partai ini berharga, orang yang ingin mendapatkan harga partai, dia harus menang dalam pertarungan Munas, Musda I, Musda II.¹⁸⁷

Dukungan terhadap calon Ketua Umum menjadi sangat bergantung kepada apa yang mampu ditawarkan olehnya bukan apa yang telah ia berikan untuk Partai. Sumber-sumber kekuasaan menjadi hal yang krusial dari keberhasilan calon Ketua Umum untuk mendapatkan dukungan. Ical memiliki semua sumber kekuasaan tersebut. Sedangkan Paloh hanya mampu bersaing secara sumber finansial namun kedudukannya yang tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan, tidak dapat menawarkan jabatan-jabatan strategis di dalam Pemerintahan.

Power struggle yang terjadi pada saat Munas 2009 merupakan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai Ketua Umum Golkar. Pengalaman ketika JK menjadi Ketua Umum Golkar, kemudian maju sebagai calon Presiden yang dicalonkan Partai Golkar pada Pilpres 2009 menjadi posisi menjanjikan untuk mencapai kekuasaan di Pemerintahan. Mengingat Munas 2004, Akbar yang memiliki prestasi gemilang menghantarkan Golkar kembali kepada kejayaan dikalahkan oleh JK dengan kekuatan sebagai Wapres dan kekuatan finansial. Pada Munas 2009, kader Golkar yang berani menjadi calon Ketua Umum memahami dengan seksama bahwa kekuatan modal dan kedekatan dengan kekuasaan menjadi modal utama untuk bisa menang di Munas. Pasca Munas 2004 yang menyingkirkan faksi-Akbar yang berisi kader-kader yang banyak berlatar belakang dari organisasi massa, digantikan oleh faksi-JK yang berisi kader-kader yang mendukung JK atas dasar pragmatisme politik. Memberi dampak pada mentalitas kader-kader kepengurusan Golkar pada saat Munas 2009 pun telah menjadi begitu pragmatis. Kader-kader Golkar yang memiliki visi membawa arah

¹⁸⁷ Wawancara Hanta Yuda dengan Syamsul Muarif, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Periode 2004-2009 di Jakarta pada 13 Oktober 2009.

baru bagi Golkar untuk dapat tidak selalu bersikap terlibat di dalam kekuasaan ternyata mayoritas kader Golkar masih belum dapat untuk memahami benar peran penting Partai Golkar tidak harus berada di kekuasaan untuk dapat menyuarakan kepentingan rakyat.

Kemenangan Aburizal Bakrie menjadi bukti bahwa posisi Ketua Umum adalah posisi bagi kader yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Hanya kader-kader yang mampu bertarung secara kekuatan finansial saja yang dapat menjadi Ketua Umum Golkar saat ini. Hal ini berpijak pada pengalaman Munas 2004 dan 2009 yang menentukan di dalam terpilihnya seorang Ketua Umum bukan pada proses jenjang karir dan sejarah yang telah dilakukannya terhadap Partai. Pertarungan Munas Golkar 2009 meskipun penuh dengan proses demokratis namun tidak menghasilkan proses demokrasi yang sehat. Kesepakatan politik yang dilakukan oleh kader pendukung maupun dukungan dari kader tidak berdasarkan pada visi yang bersifat strategi politik dalam hal kepentingan bangsa. Namun hanya berdasar pada dukung-mendukung seorang untuk jadi Ketua Umum tanpa ada pemikiran yang rasional dan berdasar kepada akal sehat kader Golkar.

Tabel 4.1.
Perbandingan Munas Golkar Pasca Orde Baru (1998, 2004, dan 2009)

Perebutan Kursi Ketua Umum Golkar Pasca Orde Baru	Calon Ketua Umum yang Bersaing	Faksi yang Bersaing	Kondisi Politik Golkar Pada Saat Munas/Munaslub	Ketua Umum yang Terpilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangannya.
Munaslub 1998	Akbar Tandjung versus Edi Sudrajat	Faksi Sipil (Akbar) versus Faksi militer (Edi)	- Kekosongan Posisi Pimpinan Golkar dengan dihapuskannya a posisi Ketua Dewan Pembina (Soeharto) - Tekanan arus reformasi (anti-militer dan anti Soeharto) terhadap Golkar	Akbar Tandjung Ketua Umum Partai Golkar (1998-2004) Faktor kemenangan Akbar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosok Akbar politisi Sipil yang sejalan dengan semangat reformasi. 2. Membawa paradigma baru bagi Golkar yaitu dihapuskannya jalur AB, membawa era demokrasi di dalam struktur Golkar. 3. Kekuatan jaringan HMI menjadi massa pendukung Akbar. (Mantan Ketua PB HMI Pusat) 4. Dukungan Pemerintahan Habibie dan Wiranto (Pangab) terhadap Akbar. 5. Posisi Akbar menjabat Menteri Sekretaris Negara 6. Dukungan Pengusaha Kaya seperti Aburizal Bakrie.
Munas 2004	Akbar Tandjung versus Jusuf Kalla	Faksi struktural (Akbar) versus faksi Saudagar (JK)	-Kemenangan Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2004. - Kekalahan capres Golkar Wiranto-Solahudin Wahin pada Pilpres 2004. -Koalisi kebangsaan Golkar oposisi bersama PDI-P, PDS, PPP.	Jusuf Kalla menjadi Ketum Partai Golkar (2004-2009). Faktor kemenangan Kalla : <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Jusuf Kalla sebagai Wapres memiliki akses untuk jabatan strategis di Pemerintahan seperti Kabinet Kementerian. 2. Dukungan SBY untuk mengamankan dukungan parlemen bagi rezim yang ia pimpin. 3. Latar belakang JK sebagai pengusaha kaya memiliki kekuatan finansial yang besar dan didukung pengusaha kaya lainnya seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. 4. Mendapat dukungan dari faksi anti-Akbar yaitu kelompok Iramasuka dan Fahmi Idris cs.

Perebutan Kursi Ketua Umum Golkar Pasca Orde Baru	Calon Ketua Umum yang Bersaing	Faksi yang Bersaing	Kondisi Politik Golkar Pada Saat Munas/Munaslub	Ketua Umum yang Terpilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangannya.
Munas 2009	Aburizal Bakrie versus Surya Paloh	Non-faksi. Karena masing-masing memperoleh dukungan melalui lobi-lobi secara individual.	<ul style="list-style-type: none"> - Kekalahan pada Pilpres 2009 (JK-Wiranto). - Kekalahan pada Pileg 2009. - Banyaknya fungsionaris Golkar yang keluar dan membentuk Partai baru, Wiranto (Hanura), Prabowo (Gerindra). 	<p>Aburizal Bakrie menjadi Ketum Partai Golkar (2009-2014).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Ical sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada rezim SBY jilid I dan II. 2. Latar belakang sosial Ical sebagai orang terkaya di Asia Tenggara versi Majalah <i>Asia Globe</i>. 3. Dukungan 'sesepuh Golkar' yaitu Akbar Tandjung.

Data diambil dari berbagai Sumber.

Tabel 4.2.

Perbandingan Indikator Kunci Kemenangan Ketua Umum Golkar Terpilih pada Munas 1998, 2004 dan 2009

Ketua Umum Golkar Terpilih	Nama-Nama yang tergabung di dalam faksi Pendukung Ketua Umum Terpilih.	Kekuasaan (Memegang Jabatan Strategis di Pemerintahan)	Kekuatan Sumber Finansial/Dukungan Pengusaha Kaya.	Dukungan Organisasi Sayap
Akbar Tandjung	Fungsionaris Golkar yang tergabung di dalam faksi AT yaitu : Fahmi Idris, Fadel Muhammad, Harmoko, Habibie, Wiranto, Abdul Gafur, Agung Laksono, Aburizal Bakrie.	AT menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara	Dukungan dari Aburizal Bakrie sebagai sponsor utama dalam kampanye AT	Dukungan Organisasi HMI
Jusuf Kalla	Fungsionaris Golkar yang tergabung di dalam faksi JK yaitu : Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Agung Laksono, Fahmi Idris, Prabowo, Akhsan Mahmud, Firman S.	JK menjabat sebagai Wapres pada rezim SBY Jilid I	Dukungan dari pengusaha kaya yaitu Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, serta JK sendiri memiliki latar belakang seorang pengusaha kaya.	Tidak didukung oleh organisasi sayap Golkar2
Ketua Umum Golkar Terpilih	Nama-Nama yang tergabung di dalam faksi Pendukung Ketua Umum Terpilih.	Kekuasaan (Memegang Jabatan Strategis di Pemerintahan)	Kekuatan Sumber Finansial/Dukungan Pengusaha Kaya.	Dukungan Organisasi Sayap
Aburizal Bakrie	Fungsionaris Golkar yang tergabung di dalam faksi ARB yaitu : Akbar Tandjung, Firman Soebagyo, Agung Laksono, Idrus Marham, Fadel Muhammad.	ARB menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Rezim SBY Jilid I & II	Latar belakang ARB sebagai orang terkaya di Asia Tenggara versi majalah Globe Asia tahun 2008	Dukungan penuh seluruh organisasi sayap Golkar

Data diperoleh dari berbagai Sumber.

4.2. PERUBAHAN *MERIT-SYSTEM* MENJADI *OLIGARCH SYSTEM* DALAM PEMILIHAN CALON KETUA UMUM GOLKAR.

Merit-system adalah proses perekrutan kader untuk menempati posisi jabatan strategis di dalam tubuh partai ataupun jabatan di dalam Parlemen atau Pemerintahan berdasarkan penilaian loyalitas, pengalaman berorganisasi, prestasi yang dicapai selama menjadi kader.¹⁸⁸ Sedangkan *oligarch system* adalah sistem dimana orang-orang yang memiliki kelebihan sumber daya (*resources*) menggunakannya untuk menduduki jabatan politis dan kekuasaan.¹⁸⁹ Sehingga *oligarch system* merupakan orang-orang yang mampu mengendalikan sistem atau memanfaatkan sistem karena kelebihan dan kekayaan yang dimiliki.¹⁹⁰ Perbedaan *merit-system* dengan *oligarch system* terletak kepada pertarungan yang terjadi di dalam menentukan kemenangan seorang kader. *Merit-system* akan memihak ke kader yang memiliki kemampuan yang ia peroleh dari hasil pengabdian dan prestasi dalam jenjang karirnya, sedangkan *oligarch system* sangat bergantung kepada keunggulan materi dan kedudukan seorang kader baik itu kekayaan, kedudukan di dalam Pemerintahan, dan lain sebagainya.

Upaya Golkar untuk melakukan demokratisasi di dalam internal organisasi dengan semangat paradigma baru ternyata mengarah kepada sistem oligark. Sistem ini telah dapat dirasakan menjadi hal yang tanpa sadar terbangun di dalam mentalitas organisasi Golkar. Gejala ini telah tampak dan menjadi hegemoni dalam proses pemilihan Ketua Umum Golkar terutama pada saat Munas 2004 di Bali. Pada saat itu Akbar Tandjung yang mengandalkan prestasi dalam mempertahankan dan mengembalikan kejayaan Golkar sebagai Ketua Umum namun tidak terpilih kembali. Padahal pada saat itu pidato pertanggung jawaban para kader melakukan *standing ovation* kepada Akbar sebagai bukti pengakuan prestasi yang dicapai selama ia menjabat sebagai Ketua Umum. Namun hasil Munas 2004 justru memilih Jusuf Kalla yang pada saat itu tidak terlibat di dalam kepengurusan Pusat Golkar tahun 1998-2004 dan berada di luar sistem

¹⁸⁸ Alan Warre, *Op. Cit.*, hlm. 16

¹⁸⁹ Jeffrey Winters, *Op. Cit.* hlm. 9.

¹⁹⁰ *Ibid.*

kepengurusan. Akan tetapi Jusuf Kalla dapat memenangkan pertarungan karena posisinya sebagai Wapres dan pengusaha kaya raya menjadi faktor penentu keberpihakan kader kepada Jusuf Kalla.

Kemenangan Jusuf Kalla pada Munas 2004 menjadi bukti dan sekaligus awal dari pergeseran ideologi paradigma baru menjadi paradigma pragmatisme politik. Di dalam pragmatisme politik maka yang bekerja adalah sistem oligark bukan *merit-system*. Hal ini berlanjut kepada Munas 2009 dimana sosok Yudy Krisnandi sebagai politisi muda yang berpotensi namun tidak masuk dalam percaturan politik Ketua Umum karena kekurangan modal. Visi dan idealisme di dalam Golkar telah mati menurut Yudi Krisnandi.¹⁹¹ Kader-kader yang memiliki kemampuan intelektual dan pemikiran politik dimiliki tidak menjadi sandaran penilaian kader untuk memilihnya. Tidak mengherankan pula bahwa pertarungan di Munas yang terjadi adalah pertarungan *money politic*.

4.3. TANTANGAN GOLKAR DALAM ERA PRAGMATISME POLITIK DI TUBUH GOLKAR.

Pasca Akbar, relasi faksi yang terbentuk adalah faksi berdasarkan relasi bisnis.¹⁹² Oleh sebab itu yang menjadi fungsionaris dan pimpinan Partai Golkar pasca Akbar adalah orang-orang pengusaha atau pebisnis kaya. Hanya orang-orang yang menjadi pengusaha yang mampu menawarkan bisnis dan kerjasama dalam keuntungan ekonomi dibandingkan dengan kader yang membangun karirnya di dalam Golkar lewat pengalaman dan perjuangan di dalam Organisasi dari tingkat *grass roots*.

Demokrasi yang dibangun lewat ideologi paradigma baru pada masa Golkar di awal era reformasi ternyata dalam perkembangannya tidak diikuti oleh

¹⁹¹ saya kutip di dalam alamat situs <http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--Sudah-Diperkirakan,-Kubu-Surya-Paloh-Tak-Bakalan-Diakomodasi---Yuddy:-Idealisme-Sudah-Mati-di-Partai-Golkar---Pengurus-Baru-Golkar-Sarat-Masalah-Hukum---Kalla:-Kemenangan-Ical-Bukan-Kemenangan-SBY-td25830257.html>, diakses pada 21 Mei 2012, pukul 13.00.

¹⁹² Wawancara Hanta Yudha dengan Indra Jaya Piliang, Ketua Dep. Kajian Kebijakan DPP Partai Golkar 2009-2015, Jakarta 2 Mei 2011.

semangat pertarungan demokrasi yang sehat. Pertarungan demokrasi yang sehat adalah ketika kekuatan politik yang bersaing dengan menggunakan keunggulan dalam perbedaan visi, ide, dan kebijakan yang akan diterapkan apabila menduduki jabatan. Sehingga kader dapat memilih berdasarkan nurani dan akal sehat yang rasional hanya untuk kepentingan organisasi.

4.3.1. Platform/Ideologi Partai Golkar yang Tidak Spesifik.

Pragmatisme di dalam tubuh partai Golkar sesungguhnya tidak dapat dihindari disebabkan beberapa faktor terutama faktor ketiadaan ideologi yang spesifik. Seperti yang dituturkan oleh Poempida Hidayatullah yang berpendapat bahwa :

“Nggak ada ideology Golkar itu sebenarnya apa sih? Kita (Partai Golkar) tidak punya ideology. Ideologinya adalah berkarya. Kalau mengajarkan orang untuk berkarya kan tidak bisa?”.¹⁹³

Hal ini menjadikan Golkar tidak memiliki platform kepartaian yang jelas dalam jangka panjang kebijakan Partai. Kebijakan Partai akan tergantung kepada corak kepemimpinan Ketua Umum yang terpilih. Menjadi tidak dapat dihindari apabila Partai Golkar kemudian hanya menjadi kepentingan politik dari Ketua Umum yang terpilih tidak berdasarkan mekanisme *merit-system*. Tentu saja pragmatisme politik akan berdampak buruk terhadap kinerja dan citra Partai Golkar di dalam sistem politik.

Proses demokratisasi di dalam Partai Golkar yang tidak dibangun dengan ideologi yang jelas menjadi boomerang bagi Golkar. Para kader yang masuk ke dalam Golkar tidak mengherankan memiliki agenda yang berbeda dan kepentingan yang berbeda untuk masuk ke dalam Partai. Ketika Partai sudah menjadi besar dan memiliki pengaruh politik dalam menentukan kekuasaan di Pemerintahan maka akan semakin sulit untuk membendung orang-orang yang memiliki cita-cita kekuasaan melalui Partai Golkar. Seperti pendapat Syamsul Muarif yaitu :

¹⁹³ Wawancara Hanta yudha dengan Dr. Poempida Hidayatullah, wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2004-2009, Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 2009, di Jakarta 10 Mei 2011

“Satu hal yang agak bergeser dari mainstream, adalah ketika terjadi liberalisasi dalam tubuh partai Golkar. Nah, liberalisasi mengantarkan Golkar menjadi memilih orang berdasarkan “one man one vote”. Dan itu adalah Golkar menangkap reformasi yang menghembuskan demokratisasi. Ketika itu terjadi. Maka sistem rekrutment tidak banyak lagi ditentukan oleh merit system. Kualitasnya dia, sudah mulai rusak dengan orientasi kepada money politik. Ini terjadi distorsi menurut pengamatan saya sebagai OKK, sehingga mainstream-nya, originalnya itu mulai bergeser dan ini harus diselamatkan, diperbaiki tidak boleh begitu.”¹⁹⁴

Organisasi yang menjadi proses pengkaderan menjadi tidak efektif disebabkan ketiadaan ideologi yang spesifik untuk ditanamkan ke dalam mentalitas pengkaderan. Mentalitas yang terbangun justru berorientasi kepada kekuasaan bukan kepada perjuangan politik bagi kepentingan rakyat melalui kebijakan partai.

Ketiadaan ideologi yang spesifik di dalam preferensi kebijakan Partai Golkar merupakan ciri-ciri dari Catch-all Party yang melihat bahwa spesifikasi ideologi hanya akan membatasi perolehan suara, dengan menyamakan ideologi maka akan lebih fleksibel untuk merangkul setiap elemen masyarakat.¹⁹⁵ Tidak mengherankan pula pertarungan di dalam Munas Golkar antar kandidat calon Ketua Umum sangat bergantung kekuatan *resources* yang dimiliki oleh sang kandidat yang merupakan ciri khas dari *catch-all party* yang bergantung kepada sumber *resources* individu kandidat.¹⁹⁶ Terlihat jelas pula pada saat kampanye Pemilu, *catch-all party* memiliki ciri khas yaitu hal yang ditawarkan dan dibangun untuk menarik simpati masyarakat bukanlah program kebijakan yang spesifik melainkan populisme dari sang kandidat.¹⁹⁷ Ketiadaan ideologi yang spesifik dan program yang ditawarkan pada saat pemilu menegaskan posisi Partai Golkar sebagai Partai yang termasuk di dalam ciri-ciri *catch-all Party*.

¹⁹⁴ Wawancara Hanta Yuda dengan Syamsul Muarif, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Periode 2004-2009 di Jakarta pada 13 Oktober 2009.

¹⁹⁵ Otto Kirchheimer, *Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat*, tulisan ini berada di dalam buku Ichlasul Amal (Editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1988 hlm. 71-79

¹⁹⁶ Steven Wolinetz, “Party System Change: The Catch-all Thesis Revisited”, *West European Politics* 14 January 1991 hlm 113-28.

¹⁹⁷ Larry Diamond & Richard Gunther (editor), *Political Parties and Democracy*, London and Baltimore: John Hopkins University Press, 2001. hlm.27

4.3.2. Kebutuhan Dana Yang Besar Untuk Operasional Partai Golkar.

Pragmatisme politik di dalam Partai Golkar juga disebabkan oleh besarnya biaya untuk menjalankan organisasi Golkar sehingga hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang besar yang mampu membiayai organisasi Golkar sehari-hari dan mensukseskan Golkar pada saat pemilu. Firman Soebagyo berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihindari karena pembiayaan Partai Golkar tidak bisa lagi bersandar kepada dana yang diberikan Pemerintah. Firman Soebagyo berpendapat bahwa :

“Partai Politik tidak mungkin bisa melakukan konsolidasi tanpa menggunakan uang, nah selama partai diberikan kebebasan mengelola dana partai sendiri, dan bantuan dana Pemerintah kecil dan akhirnya seperti sekarang ini. Karena untuk partai sebesar partai Golkar seperti ini untuk melakukan konsolidasi di tingkat nasional, biayanya tidak sedikit. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu kan per suara 1000 Rupiah. Itu masih lumayan, kalau kita menang 10 juta suara, kalikan 1000, 10 Milyar lumayan. Sekarang ini kan kecil. Perkursian hanya 25 juta Rupiah. Kalau Golkar cuma punya kursi 100, berarti kan hanya 2 setengah milyar. Gak mungkin lah. Untuk Munas saja tidak cukup apalagi untuk (organisasi) jalan tiap hari”.¹⁹⁸

Pembiayaan Partai Golkar sebagai yang memiliki organisasi yang besar sangat tidak memungkinkan apabila hanya mengandalkan bantuan Pemerintah. Partai harus mencari sendiri sosok yang mau dan mampu untuk membiayai Partai Golkar. Hal ini serupa dengan pendapat Rully Chairul Azwar yaitu :

“Partai Golkar saat ini telah menjadi partai besar yang keputusannya telah go public , partai modern yang tidak bisa lagi dikuasai oleh satu dinasti saja seperti partai-partai lainnya. Sehingga siapapun yang bisa menguasai saham terbesar di dalam Partai, ya dia menjadi Ketua Umum. Biaya untuk bisa mengelola untuk Partai Golkar sangat besar, sehingga keunggulan materi luar biasa besar (untuk menjadi Ketua Umum). Jadi salah satu kendala untuk bisa mengelola Partai (menjadi Ketua Umum), dia harus memiliki kemampuan finansial, kalau tidak dia tidak mungkin bisa mengurus kepentingan dana Partai sebesar ini, walaupun tidak harus

¹⁹⁸ Wawancara Firman Soebagyo, Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta, 26 Desember 2011.

punya uang sendiri namun kalau dia bisa menghimpun akses untuk memperoleh dana untuk partai juga tetap bisa”.¹⁹⁹

Dilema yang sangat besar yang dihadapi oleh Partai Golkar mengingat kecilnya bantuan dari Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan dana bagi Partai. Di sisi lainnya berdampak kepada sosok Ketua Umum yang terpilih adalah sosok yang mampu untuk membiayai kebutuhan Partai. Biaya operasional Partai Golkar membutuhkan dana sebesar 2,5 – 3 Miliar Rupiah per bulan, Angka Rp 3 miliar itu untuk subsidi kesekretariatan di DPD masing-masing Rp 2,5 juta, DPD I masing-masing Rp 5 juta, dan overhead DPP Rp 400-500 juta.²⁰⁰ Hal ini tentu saja memerlukan sosok yang memiliki kekuatan finansial yang besar untuk dapat membiayai kegiatan organisasional Golkar. Seperti pendapat Rully Chairul Azwar yaitu :

“Partai modern yang seperti Golkar yang telah *go public*, artinya siapapun dapat bisa masuk dengan intervensi dana dan materinya untuk menjadi Ketua Umum walaupun dalam sejarah (Partai Golkar) dia tidak pernah berbuat apa-apa, kunci utamanya bukan dari sejarahnya terhadap Partai Golkar, tetapi dinilainya dari bagaimana ia bisa mengelola kebutuhan dana untuk partai. Kebutuhan dana menjadi kebutuhan bagi darahnya Partai. Darahnya ini ternyata lebih penting di dalam kehidupan Partai ketimbang organ-organ lainnya. Dan tidak semua orang memiliki darah segar ini. Kenapa orang semua berminat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, karena menentukan kekuasaan buat pribadi, kelompok, dan lain sebagainya. jeleknya kita tidak bisa jangka panjang, ganti juragan ganti kebijakan. tidak seperti jaman pak harto, kita bisa naik menjadi ketua umum berdasarkan perjuangan panjang dan pengabdian lama di dalam Partai.”²⁰¹

Tentu saja sosok yang mau membiayai kebutuhan Partai yang besar tentu memiliki kepentingan untuk mencapai kekuasaan. Orang-orang yang mampu untuk membiayai partai seperti menurut pendapat Rully Chairul Azwar bahwa adalah orang yang memiliki kemampuan materi (finansial) dan yang memiliki

¹⁹⁹ Wawancara Rully Chairul Azwar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

²⁰⁰ <http://news.detik.com/read/2009/10/07/190420/1217326/10/golkar-butuh-rp-3-miliar-per-bulan-untuk-biaya-operasional> Saya akses pada 3 Juli 2012, Pukul 14.00.

²⁰¹ Wawancara Rully Chairul Azwar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan Periode 2004-2009., 4 Mei 2012.

akses untuk mengumpulkan dana partai yaitu dekat dengan kekuasaan. Tidak mengherankan apabila mentalitas pragmatisme politik di tubuh organisasi menjadi begitu kuat. Menjadi seperti peraturan tidak tertulis dan dimahfumi bersama di kalangan internal kader Golkar. Pasca Akbar merupakan dimulainya era pengusaha-pengusaha kaya yang menjadi pimpinan fungsionaris Partai Golkar. Namun hal ini dalam pandangan salah satu fungsionaris Golkar yaitu Andi Matalata melihat bukanlah hal yang buruk, ia berpendapat :

“Tidak masalah orang-orang kaya masuk di dalam jajaran fungsionaris pimpinan Partai Golkar, itu sah-sah saja. Dia menggunakan kekayaannya untuk kepentingan politiknya termasuk dalam perebutan posisi Ketua Umum Golkar. Asalkan harta yang dipakainya itu harta yang halal. Itu haknya dia untuk menggunakannya untuk apa untuk apa dan sebagainya. Tetapi kalau saya ditanya bagaimana sosok ideal seorang Ketua Umum adalah orang yang sudah habis dengan masalah dunia. Tidak tertarik lagi tentang keduniawian. ya harta, uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah itu baru sosok Ketua Umum yang ideal jadi fokus bagaimana bisa membesarkan Partai dan untuk kepentingan Partai saja tidak yang lain-lain dibekalangnya. Jadi kedepan Ketua Umum yang terpilih haruslah orang yang tidak lagi memikirkan keduniawian”²⁰²

4.3.3. Penurunan Suara dan Kekalahan Pada Pilpres 2009 dan Pileg 2009.

Partai Golkar menjadi terjebak di dalam dilema dan tantangan yang berat terutama di dalam menghadapi pragmatisme politik di dalam kader-kadernya. Jika melihat kondisi Golkar yang tidak dapat lagi mengandalkan sumber pendanaan dari Pemerintah. Partai Golkar harus mandiri dan mencari sendiri dana dari kader-kadernya. Tentu hanya kader-kader yang memiliki kapasitas sebagai oligark dan dekat dengan kekuasaan yang dapat memenuhi kebutuhan Partai. Meskipun berdasarkan pengalaman pada Pilpres 2009, Pileg 2009, Golkar mengalami kekalahan sejak pragmatisme politik telah menjadi dasar mentalitas di dalam internal Partai Golkar. Seperti pendapat Akbar Tandjung yaitu :

“Orang-orang yang berpandangan pragmatis seperti yang mengatakan bahwa Golkar tidak bisa lepas dari kekuasaan karena pengalaman selama 30 tahun berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ternyata setelah berada di dalam kekuasaan pada zaman Pak JK, justru Golkar mengalami kemunduran dan bahkan tidak sampai 15 juta suaranya. Hal ini

²⁰² Wawancara Andi Matalata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Periode 2004-2009. Jakarta, 7 Maret 2012.

membuktikan bahwa Golkar tidak harus selamanya berada di dalam kekuasaan. Seperti pengalaman di Amerika Serikat dengan Partai Demokrat dan Republik yang bergantian, Inggris dengan partai Buruh dan Konservatif. Memang yang berpendapat seperti itu merasakan secara individu atau orang perorang bisa merasakan nikmatnya namun secara institusi berdampak buruk. Lihat saja Golkar terus mengalami penurunan suara. Oleh sebab itu menjadi tugas kita semua untuk menolak dan mengawasi semua praktek transaksional karena berdampak buruk pada perpolitikan nasional”²⁰³.

Sejak era pragmatisme politik dimulai pada Munas 2004, berdampak buruk pada hasil yang diperoleh terbukti pada Pilpres 2009 Golkar bahkan tidak sampai masuk pada putaran ke-dua. Pada Pileg 2009 pun mengalami kekalahan padahal pada Pileg 2004 berhasil menjadi Partai pemenang pemilu. Pragmatisme politik menjadi musuh besar dan tantangan yang berat bagi Partai Golkar untuk masa yang akan datang. Terlepas dari kondisi yang tidak menguntungkan karena pembiayaan Partai yang begitu besar dan bantuan pendanaan dari Pemerintah terbilang kecil memberikan opsi yang sulit bagi Golkar untuk tidak memilih sosok yang dapat membiayai dan mendanai Partai.

Terlepas dari tekanan dan kondisi internal yang mengharuskan terciptanya pragmatisme politik di dalam tubuh internal Golkar, namun telah terbukti sejak pragmatisme politik menjadi landasan pemikiran dan mentalitas kader terutama di dalam menentukan sosok Ketua Umum berdampak buruk pada kiprah Golkar di Pemilu. Golkar tidak lagi mampu menjadi kekuatan politik yang dominan. Pragmatisme politik harus dilawan dengan mengembalikan *merit-system* sebagai basis perekrutan kader untuk menduduki jabatan strategis terutama di dalam pemilihan Ketua Umum agar Golkar mampu menjadi Partai pemenang pemilu di masa mendatang.

²⁰³ Wawancara dengan Dr. Akbar Tandjung, Mantan Ketua Umum Golkar 1998-2004, pada 26 Mei 2012, pukul 11.00.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS

Berdasarkan hasil penelitian demokrasi internal Partai Golkar terkait studi proses pemilihan Ketua Umum Golkar pasca Orde Baru dengan studi kasus pada saat Munaslub 1998, Munas 2004 dan Munas 2009 dapat ditarik kesimpulan secara fakta empiris dan teoritis. Secara fakta empiris menunjukkan menunjukkan bahwa kemenangan Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 berdasarkan kekuatan ideologi yang dibangun oleh sosok Akbar dengan membawa ide paradigma baru Partai Golkar di era reformasi. Paradigma baru yaitu memandirikan Golkar untuk tidak lagi terikat dengan kekuatan militer dan birokrasi sebagai jalur pendukung utama organisasi Golkar pada masa Orde Baru.

Paradigma baru yang diusung Akbar Tandjung sejalan dengan semangat arus dan tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-Soeharto. Sehingga faksi yang terbentuk pada pertarungan Ketua Umum di Munaslub 1998 merupakan pertarungan faksi berbasis ideologi yaitu ideologi paradigma baru melawan ideologi kekuatan militer yang ingin kembali/berkuasa di dalam Golkar. Basis dukungan Akbar yang berasal dari organisasi massa seperti HMI menjadi kekuatan penekan untuk menekan agar Golkar lepas dari pengaruh militer. Sehingga apabila Golkar kembali dipimpin oleh militer akan menyebabkan Golkar tidak akan mendapat simpati masyarakat yang begitu gencar menyuarakan semangat reformasi.

Secara empiris pula menunjukkan sejak Munas 2004 menjadi awal bagi era pragmatisme politik di tubuh Golkar. Partai Golkar tidak lagi memiliki tekanan dari masyarakat seperti pada awal reformasi. Partai Golkar telah menjadi kekuatan politik yang menjanjikan bagi kepentingan politik dan kekuasaan di Pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan semua kader menginginkan kursi Ketua Umum Golkar. Hasil Munas 2004 yang menunjuk Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tandjung menunjukkan pula perubahan *merit-system oriented* menjadi *oligark system oriented*. Prestasi Akbar

di dalam mempertahankan Golkar di era tekanan pembubaran Golkar hingga membawa Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum Legislatif 2004 dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang memiliki akses terhadap jabatan Pemerintahan selaku Wapres dan uang yang banyak sebagai seorang pengusaha kaya. Jika *merit-system* berjalan dengan baik maka semestinya Akbar kembali terpilih. Kemenangan JK merupakan awal bagi pragmatisme di dalam tubuh Golkar yang selalu berorientasi kepada selalu masuk di dalam lingkaran kekuasaan.

Hasil Munas 2009 secara empiris juga menunjukkan bahwa kemenangan Aburizal Bakrie merupakan keberlanjutan dari pragmatisme politik pada Munas 2004. Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet SBY jilid I dan II memberikan posisi Ical sebagai sosok yang dekat dengan kekuasaan Pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Ical untuk menjadi posisi tawar para kader memilihnya karena akan memiliki akses terhadap jabatan strategis di Kabinet Pemerintahan. Disamping itu pula sosok Aburizal Bakrie yang dikenal sebagai orang terkaya di Asia Tenggara versi majalah *Globe* menjadikan Ical memiliki dana yang besar guna mendukung kegiatan kampanye pada masa Munas 2009. Kekuasaan dan dana yang besar menjadi faktor kemenangan Ical pada Munas 2009.

Sedangkan secara teoritis dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu dari segi teori demokrasi internal dan transformasi kepemimpinan Partai politik dari Alan Warre maka Partai Golkar telah melakukan mekanisme yang dapat menerapkan pemilihan Ketua Umum berdasarkan prosedur dan syarat-syarat keputusan yang demokratis. Hal ini disebabkan Partai Golkar menerapkan mekanisme demokrasi di dalam pemilihan pergantian pimpinan Partai yang dikenal dengan Munas Golkar. Di dalam Munas Golkar yang melibatkan para kader-kader Golkar di DPD I dan DPD II maka mencerminkan sebuah demokrasi internal di dalam Partai Golkar. Dengan melibatkan suara dan aspirasi kader-kader Golkar di tingkat maka sosok Ketua Umum yang terpilih adalah benar-benar dari suara kader Golkar di level *grass roots*. Demokrasi yang dimaksud di

dalam teori Alan Warre ini hanyalah bagaimana mengaplikasikan mekanisme yang demokratis di dalam sebuah Partai yang memiliki kader yang besar.

Syarat ideal dari teori Alan Warre yang penting untuk dimiliki seorang pimpinan Partai politik haruslah telah lama menjadi legislator Partainya di Parlemen. Dengan menjadi legislator di Parlemen tidak hanya memahami perpolitikan dan pengalaman di dalam memperjuangkan aspirasi Partai sehingga mampu untuk meneruskan visi dan misi Partai apabila menjadi pimpinan Partai. Di samping itu pula dengan menjadi legislator sebelum menjabat sebagai pimpinan Partai, maka akan terlihat jelas jenjang karir di dalam kepartaian. Berdasarkan teori Alan Warre maka Ketua Umum Golkar yang terpilih pada Munas pasca Orde Baru hanyalah Akbar Tandjung yang memiliki syarat ideal menjadi Pimpinan Partai Golkar karena memiliki *track record* sebagai legislator Partai Golkar. Sedangkan Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie memiliki *track record* sebagai pengusaha kaya dan memiliki jabatan strategis di dalam Pemerintah pada masa periode kepemimpinannya.

Dari segi faksionalisasi yang terjadi di dalam Munas Golkar dapat dipahami berdasarkan teori faksionalisasi elite Belloni. Teori faksionalisasi elite Belloni menjelaskan bahwa suatu faksi dapat terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik yang tidak dilandasi dengan ikatan yang bersifat formal. Selain itu juga termasuk kategori faksi yang terbentuk dengan pola *patron-client* yang dipengaruhi faktor kepemimpinan individu, yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu partai yang mempunyai konstituen jelas. Karena itu pula, *caretaker* faksionalisme di Golkar mengokohkan teori belloni. Kemunculan faksi-faksi di Golkar bukan berdasarkan kepada perbedaan gagasan atau aliran politik yang bersifat substansial, tetapi lebih karena perbedaan kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis-pragmatis. Oleh sebab itu pula faksi-faksi di Golkar sebenarnya tidak permanen, peta kekuatan faksi dapat saja berubah di setiap momentum dan peristiwa politik di partai. Munculnya faksi-faksi di internal partai Golkar biasanya semakin menguat terutama pada saat pemilihan Ketua Umum di Munas 1998.

Faksionalisme di internal Golkar juga bukan berdasarkan perbedaan gagasan, faksi muncul bersifat individualism. Individualisme ini terbangun tanpa sadar ketika semakin banyak pengusaha dan konglomerat masuk ke dalam Partai Golkar. Fenomena faksionalisme di Golkar terbentuk karena kepentingan individu sehingga pertarungannya bersifat individualism. Hal ini sejalan dengan dua karakter faksionalisme dalam teori Belloni, yaitu faksi yang terbentuk dapat mengancam soliditas partai sehingga selalu rentan mengalami perpecahan dalam menghadapi setiap pemilu. Karena faksionalisasi di tingkat elite juga berimbas terhadap soliditas partai seperti teori Paul Lewis yang berpadangan faks-faksi dapat mengancam soliditas partai.

Teori oligarki dari Jeffrey Winters yang menjabarkan bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan harta/kekayaan/sumber daya finansial memiliki keunggulan di dalam pertarungan politik. Kekayaan dapat menjadi kekuatan dan keunggulan seseorang apabila dimobilisir untuk kampanye atau menggalang dukungan. Orang kaya akan memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat memenangkan persaingan politik di dalam suatu jabatan dibandingkan orang yang memiliki sumber dana kampanye terbatas. Berdasarkan hasil penelitian maka memiliki kesesuaian dengan teori Jeffrey Winters. Jusuf Kalla seorang saudagar kaya mampu mengalahkan Akbar Tanjung yang membangun nama di dalam Partai melalui pengabdian dan prestasi. Begitu pula Aburizal Bakrie dapat mengalahkan Surya Paloh karena memiliki sumber dana finansial yang jauh lebih besar.

Ideologi Partai Golkar yang tidak spesifik di dalam *platform* kebijakan partai apakah liberal yang berorientasi pada kebijakan pasar atau sosialis yang pro terhadap kebijakan buruh, tani, nelayan dan sebagainya. Berdampak kepada kaderisasi Golkar yang tidak matang di dalam menanamkan kader Golkar yang militan dan mengerti benar apa yang diperjuangkan di dalam Partai. Hal ini pula yang menyebabkan pertarungan ide, visi, misi dan kebijakan tidak menjadi sandaran dan mekanisme untuk menentukan sosok Ketua Umum. Faktor “gizi” justru yang lebih diutamakan akibat tidak adanya pembangunan mentalitas kader

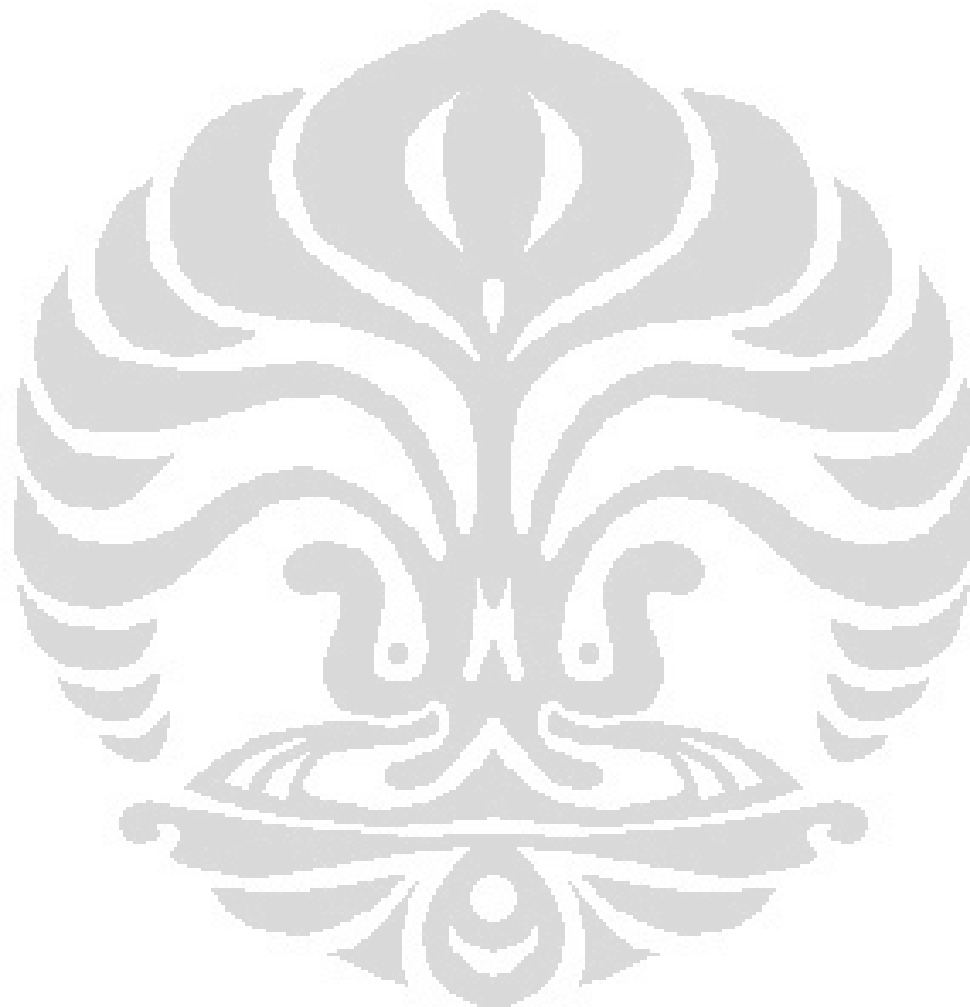
berdasarkan ideologi Partai yang spesifik. Tidak mengherankan kemudian apabila Partai Golkar hanya menjadi batu loncatan untuk mencapai kekuasaan di Pemerintahan bukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menguatnya pragmatisme politik di dalam tubuh Partai Golkar disebabkan faktor yaitu mentalitas kader yang selalu ingin masuk lingkaran kekuasaan, tergiur oleh tawaran uang serta kondisi besarnya biaya operasional Partai Golkar. Mentalitas kader yang selalu ingin masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, yaitu ingin mendapatkan jabatan strategis di dalam pemerintahan yang berkuasa berdampak pada pilihan sosok Ketua Umum yang terpilih. Sosok Ketua Umum yang memiliki akses kedekatan dengan pemerintahan yang berkuasa akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terpilih dan memperoleh dukungan. Begitu pula di dalam praktek *money politics* pada saat Munas.

Tidak dapat dipungkiri praktek transaksional untuk mendapatkan suara di dalam pemilihan Ketua Umum telah menjadi rahasia umum dan bahkan menjadi topic hangat di Media Massa. Hal ini pula tidak dipungkiri oleh kader Golkar sendiri berdasarkan hasil wawancara meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris. Alasan besarnya biaya operasional Partai dalam membiayai organisasi baik untuk konsolidasi atau kemenangan Pemilu maka sosok yang mampu untuk membiayai organisasi haruslah orang yang memiliki kekuatan finansial. Dana bantuan untuk Partai politik yang berasal dari Pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan Partai Golkar yang besar. Sehingga sosok Ketua Umum yang kaya atau memiliki sumber akses finansial yang kuat menjadi syarat tidak tertulis dalam Munas terutama pasca Akbar.

Dampak pragmatisme politik di dalam tubuh Golkar sejak era Munas 2004 terus menerus mengalami kekalahan baik pada Pilpres 2009 maupun Pileg 2009. Mentalitas kader yang beranggapan bahwa Golkar tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan justru berdampak buruk kepada Golkar secara institusi. Rapor buruk pada setiap pemilu menjadikan Golkar tidak mampu lagi menjadi Partai terkuat seperti pada Pileg 2004. Hal ini disebabkan kinerja Pemerintahan yang buruk akan berdampak buruk pula kepada Golkar. Karena Golkar masuk dalam koalisi

Pemerintahan, namun apabila Pemerintahan yang berkuasa memiliki performa yang baik maka Golkar pun tidak mendapat pujian melainkan Partai yang memerintah. Pragmatisme politik menjadikan Golkar tidak mampu menjalankan fungsinya secara baik sebagai partai politik karena hilangnya semangat idealisme Partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amal, Ichlasul. (ed.), 1988, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Alfian, 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Antlov, Hans & Sven Cedderoth (eds). 2004. *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond*, Routledge Press, Curzon.
- Budiarjo, Miriam. (ed.), 1981, *Partisipasi & Partai Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Boileau, Julian. 1983. *Golkar Functional Group in Indonesia*, Jakarta, CSIS.
- Carporaso, James A. & David P. Levine, 2008, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyono, Heru. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980 dari Pemilu Sampai Malari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Chairul Azwar, Rully. 2009. *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era, Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi "Pasar"*, Jakarta. PT Grasindo.
- Crouch, Harold. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*, Australia, Cornell University Press.
- Dalton, Rusell J. & Martin P. Wattenberg. (ed.), 2000, *Parties Without Partisan, Political Change in Advanced Industrial Democracies*, New York:Oxford University Press.
- Diamond, Larry. & Richard Gunther (ed.), 2001, *Political Party and Democracy*, London and Baltimore: John Hopkins University Press.
- Feith, Herbeit. L. Castles. 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1966*, Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Gaffar, Affan. dkk. 1993 . *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Hagopian, Mark N. 1978, *Regimes, Movements, and Ideologies*, New York: Long man.
- Kholil, Makrum. 2009. *Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*, Gaya Media Pratama, Tangerang.

- Lewis, Paul. G. 2000. *Political Parties in Post-Communist Eastern Europe*, New York, Routedge.
- Lubis, Sofyan dkk. 1994. *30 Tahun GOLKAR*, DPP GOLKAR, Jakarta.
- Liddle, William. 1980. *Partisipasi Partai Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- , 1982. *Pemilu 1977: Suatu Tinjauan*, Yogyakarta: Kelompok Studi Batas Kota.
- Jenkins, David. 1984. *Suharto and His Generals: Indonesian Military in Politics 1975-1983*, Cornell University Press, Ithaca.
- Macridis, C. Roy. 1967, *Introduction: the History, Function, and Typology of Parties Trends and Ideas*, New York: Harper and Row.
- Marco & Anders Ufen, 2009. *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London & New York, Routledge Press, 2009
- Moertopo, Ali. 1978. *Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development*, Jakarta, CSIS.
- , 1974. *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta.
- , 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi-CSIS
- , 1978, *Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development*, Jakarta, CSIS.
- Nishihara, M. 1972 *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, Ithaca, Cornell University Press, Monograph Series, No. 52.
- Notosusanto, Nugroho. ed. 1984. *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Novianto, Kholid 2004. *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*, Sejati Press, Jakarta.
- Pharr, Susan J. & Robert D. Putnam (ed.), 2000, *Dissaffected Democracies: Whats Troubling the Trilateral Countries*, Princeton: Princeton University Press.
- Pratigny, Imam. 1983. *Ungkapan Sejarah: Lahirnya Golongan Karya, Perjanjian Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*, Yayasan Bakti T.P., Jakarta.
- Reeve, David. 1985. *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party Systems*, Singapore, Oxford.
- Saidi, Ridwan. 1993. *Golkar Pasca Pemilu 1992*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Schattschneider, E. E. 1942, *Party Government*, New York: Rinehart.

- Suryadinata, Leo. 2002. *Elections and Parties in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- . 1998. *Interpreting Indonesian Politics*, Singapore, Times Academic Press.
- . 1992. *Golkar dan Militerm Studi Tentang Budaya Politik*, Jakarta, LP3ES.
- Stanley, Ed. 1999. *Golkar Retak?*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi.
- Sudiro, M. Irsyad. 1998. *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, Depok, Yappindo Press.
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Thohari, Y. 2004. *Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik Tentang Golkar*, Surakarta, The Hajriyanto Center.
- Warre, Alan. 1996. *Political Parties and Party Systems*, New York: Oxford University Press.
- Winters, Jeffrey. 2011. *Oligarki*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

- Ambong, Ibrahim. "Hubungan ABRI-GOLKAR" di dalam *Jurnal Ilmo Politik*, vol.6, Jakarta, PT. Gramedia, 1990
- Bahasoan Awad. "Golongan Karya Mencari Format Politik Baru" dalam Pilihan Artikel Prisma, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, CSIS, 1985.
- Bischoff, Ivo. "Party Competition in Heterogeneous Electorate: The Role of Dominant-Issue Voters", *Public Choice*, Vol. 122, no.1/2, Januari 2005, www.jstor.org/stable/30026680, saya akses pada 20/04/2011. pukul 18.27 WIB
- Grofman, Bernard. Samuel Merrill, Thomas L. Brunell dan, William Koetzle, "The Potential Electoral Disadvantages of a Catch-All Party: Ideological Variance among Republicans and Democrats in the 50 US States", *Party Politics*, SAGE Publications, 1999
- Innes, Abby. "Party Competition in Post-Communist Europe: The Great Electoral Lottery", *Center for European Studies Central and Eastern Europe Working Paper Series*, 54 (June 2001)

- Liddle, R. William. "Indonesia in 1987, "The New Order at the Heights of Its Power", the University of California, 1988, <http://www.jstor.org/stable/2644819> diakses pada: 20/04/2011 06:02
- Mchlale. E. Vincent and Sandra Shaber, "From Aggressive to Defensive Gaullism: The Electoral Dynamics of a 'Catch-All' Party" <http://www.jstor.org/stable/421330>, diakses pada: 20/04/2011 06:10
- Nishihara, M. *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, Ithaca, Cornell University Press, Monograph Series, No. 52, 1972
- Por Ignacio Mamone, Director de AgoraXXI. "The Catch-All Party and Class Voting Behavior: the Case of New Labour", Washington College, Maryland, Oktober 2007. Di dalam jurnal *Universo Agora*
- Suryadinata, Leo. "The Decline of the Hegemonic Party System In Indonesia: Golkar After The Fall of Soeharto", *Contemporary Southeast Asia*, Agustus 2007, 29, 2; Proquest
- Suhardiman. 1979. *Proses Pertumbuhan Golkar Dalam Rangka Pembaharuan Struktur Politik*, Unpublished paper.
- Sitter, Nick. "Opposing Europe: Euro-Sceptcims, Opposition and Party Competition," School of Management BI SEI Working Paper No 56, Opposing Europe Research Network Working Paper No. 9, oktober 2002, Sussex European Institute, University of Sussex.
- Tambunan, A.S.S.1980."Fungsi Sosial-Politik ABRI", pidato pada Dies Natalis Akademi Hukum Militer/ Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta: Bina Cipta,
- Tomsa, Dirk. "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive Regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", *Indonesia*, April 2006, Proquest Research Library.

Sumber Wawancara :

Dr. Ir.. Akbar Tandjung.

Andi Matalatta SH.

Dr. Ir. Rully Chairul Azwar.

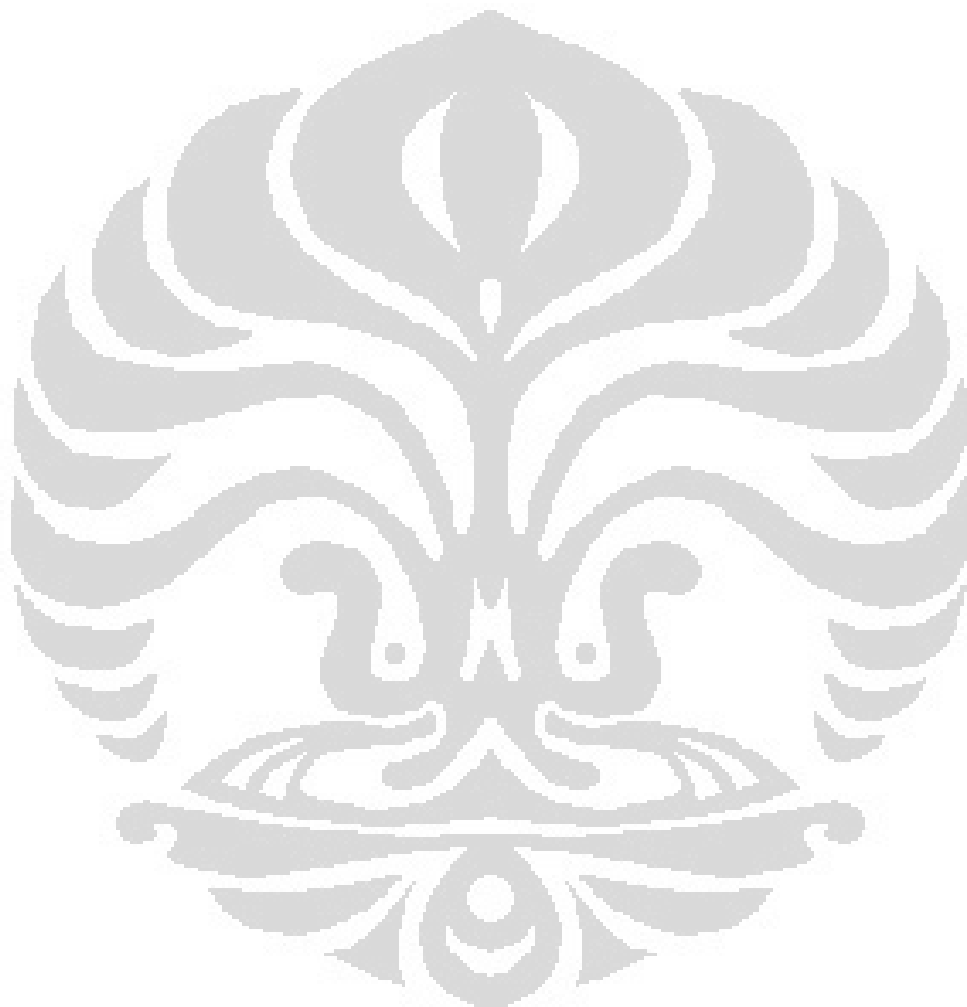
Firman Soebagy2, SE.

Sumber Internet :

www.tempointeraktif.com

www.detiknews.com

www.vivanews.com



Hasil Wawancara Dengan Tokoh Golkar :
Dr. Ir. Akbar Tandjung
Ketua Umum Partai Golkar Periode 1998-2004
Jakarta, 24 Mei 2012.

Bisa bapak ceritakan mengenai Munaslub 1998, 2004 dan 2009 bang Akbar?

Saya cerita dulu ya, jadi memang pada Golkar masuk di era reformasi, dimana Golkar dihadapkan harus mampu survive dan mampu bertahan di dalam kehidupan perpolitikan yang sedang bergejolak. Dalam semangat hal itulah Golkar mengembangkan suatu pikiran dan gagasan yang disebut dengan paradigma baru. Gagasan pikiran itu saya sampaikan pada saat pemilihan ketua umum pada tahun 1998. Saya waktu itu adalah salah satu seorang kandidat yang mengikuti calon pemilihan ketua umum. Pada saat yang lain calon kuat lainnya yaitu bapak edi sudrajat. Pak edi sudrajat pernah menduduki jabatan2 penting di ABRI. Staf angkatan darat, panglima ABRI dan Menhankam. Jadi boleh dikatakan beliau pernah menduduki posisi yang strategis dan penting dalam Pemerintahan.

Pada saat itu saya membawa gagasan baru, bahwa di dalam kondisi perpolitik yang berubah dan berkembangnya adanya tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Akan tuntutan segera ditetapkannya presiden yang legitimate melalui proses pemilihan umum merupakan hal yang harus diantisipasi. Apabila Golkar ingin tetap eksis dalam perubahan, maka Golkar harus pandai-pandai menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan perpolitikan yang berubah namun tidak mengubah hakekat daripada jatidiri partai Golkar yang memiliki platform perjuangan untuk mempertahankan Pancasila, dan negara kesatuan NKRI dan juga undang-undang dasar yang dikenal dengan empat pilar saat ini. Dan juga Golkar harus berorientasi kepada upaya pembangunan yaitu pembangunan manusia dan keseimbangan dengan pembangunan materi. itulah yang menjadi platform partai golkar. tetapi situasi yang berubah maka golkar harus mampu melakukan perubahan di dalam pendekatan politik, perubahan dalam mekanisme keputusan di dalam partai golkar yang harus mencerminkan semangat reformasi dan demokrasi, dan sejalan cita-cita reformasi dan proses rekrutmen pimpinan Golkar harus demokrasi dan terbuka dan melibatkan stakeholder partai. Dan partai Golkar harus tanggap dan komitmennya perjuangan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat.

Karena tuntutan reformasi dan demokrasi telah menjadi cita-cita di dalam perubahan. dan itulah yang saya sampaikan pada saat pencalonan ketua umum. pada saat itu juga saya bagikan buku kecil mengenai pikiran dan gagasan mengenai paradigma baru. proses pemilihan dilakukan dengan demokratis dengan melibatkan DPD I sebagai stake holder yang memiliki hak suara. dan penetapan calon2 itu juga melalui mekanisme yang demokratis. dimana DPD2 yang

memiliki calon dipersilahkan untuk mencalonkan, bilamana calon mendapatkan minimal 5 suara maka dianggap sah. Ini merupakan proses yang baru, sebelumnya hanya penetapan melalui dewan Pembina yaitu puncaknya tidak lain adalah pak harto. dan dibawahnya ada pimpinan di jalur-jalur Abri, Birokrasi dan Golkar.

Posisi Ketua Dewan Pembina sangat menentukan Ketua Umum Golkar. Itu mekanisme yang sebelumnya dengan reformasi mekanisme itu berubah. dari DPD2 tingkat I dimana tokoh2 yang melewati 5 suara boleh maju menjadi calon ketua umum. Pada waktu itu pada proses pencalonan pak Edi Sudrajat mendapat 17 suara dan saya 10 Suara, masih ada calon lain pak Sultan namun hanya satu suara. Oleh sebab itu yang maju adalah saya dan pak edi sudrajat. pada saat itu dilakukan pemilihan secara demokratis dimana masing-masing ketua DPD itu maju kedepan dan masuk ke dalam bilik suara dan memasukkan ballot ke kotak dan kemudian kembali ke tempatnya/kursinya. Begitu prosesnya yang sangat demokratis. Dan boleh dikatakan masing-masing sangat ditentukan oleh DPD2. Dan pada saat itu benar-benar tidak ada mekanisme yang menggunakan power untuk mempengaruhi pilihan para DPD. Pada saat itu saya hanya menjelaskan rekam jejak saya sejak muda di Golkar, setelah menjadi Ketua Umum HMI saya langsung masuk Golkar. Berarti saya sudah 24 tahun di Golkar, dan sudah pernah di DPR, Menteri, Ketua DPR dan saya jelaskan kepada DPD tidak lain saya maju untuk menjadi Ketua tidak lain untuk menyelamatkan Golkar, pada waktu itu sudah dirasakan tekanan-tekanan terhadap Golkar sebagai kekuatan penopang Orde Baru.

Adanya tuntutan-tuntutan yang sangat keras supaya mendapatkan hukuman karena menjadi partai Orde Baru. Konsep-konsep itulah yang saya jelaskan dan saya katakan adanya cut off dengan sistem orde baru dan kami katakan kami telah berubah. Saya berusaha meyakinkan DPD tingkat I dan kira-kira pandangan2 saya juga mendapatkan dukungan dari Kontan, sehingga saya ternyata terpilih menjadi ketua umum. Bahkan pak Tri pada saat itu lebih mendukung pak Edi. Nah inilah pertama kali Golkar melakukan pemilihan Ketua Umum melalui penghitungan suara tidak seperti orde baru yang telah saya jelaskan melalui mekanisme penetapan. dan pada zaman saya itu melalui pemilihan. dan itulah menjadi kiprah penting Golkar pertama pada awal-awal reformasi. dan pada saat itu saya juga tunjukkan pada saat memimpin saya tunjukkan dengan melakukan demokratisasi dan menjelaskan gagasan2 paradigma baru di internal dan eksternal Golkar. dan saat itu saya jelaskan dari tingkat I, II hingga ke pelosok daerah untuk menanamkan nilai bilamana kita ingin survive dan ikut terus berkiprah di dalam perpolitikan maka kita harus mampu berubah. dan alhamdulillah pada pemilu 1999 Golkar masih mendapat posisi kedua. walaupun tekanan Golkar sangat besar, saya merasakan sendiri di Jawa Tengah, timur dan Bali yang anti militer anti Soeharto dan anti Golkar.

Bahkan saya pernah dicegat,, kendaraan saya dilempar itu cobaan saya alami. khususnya di jembar untuk mendatangi rapat akbar atau umum kami dicegat., oleh sebab itu kami harus melewati jalan tikus lewat belakang untuk bisa masuk ke podium. massa kami pun diganggu, rapat pun diganggu untuk

memecahkan konsentrasi dengan klakson mobil, bakar ban dan macam-macam. dan pada saat saya pidato suasananya sangat tegang. nah situasi yang begitu kritis, kepolisian yaitu brimob saya diamankan, kebetulan saya bersama istri saya naik ke mobil, dengan senjata siaga penuh, melewati kerumunan massa, jalan2 yang dibakar ban-ban dan itulah tekanan yang kami hadapi. begitulah di Bali kendaraan kami dikejar-kejar untuk dicegah untuk sampai menghadiri rapat. tapi alhamdulillah pada saat itu kita lolos menjadi nomor dua pada pemilu 1999.

Namun setelah pemilu itu tekanan-tekanan itu tidak berkurang, bahkan presiden pada saat itu yaitu Gusdur yang menekan bahwa Golkar tidak boleh ikut dalam perpolitikan dengan memecat menteri-menteri Golkar seperti Pak Jusuf Kalla dan dari PDI-P yaitu Laksamana Sukardi. Namun kami tetap melalui cara konstitusional, pada saat itu saya ketua DPR bahkan para pendukung Gusdur yang begitu emosinya menghadapi Golkar terjadi pembakaran-pembakaran kantor2 Golkar di jawa timur, bahkan di situbondo pendukung Golkar menebang pohon untuk menghalangi jalan dan kendaraan ke arah banyuwangi terhanti. dan pendukung2 Gusdur tidak lain semangat untuk menghentikan Golkar. Namun kami tetap melalui cara-cara yang konstitusional, akhirnya Gusdur kehabisan langkah untuk menghancurkan Golkar dan mengeluarkan dekrit yang isinya membekukan Golkar dan membekukan DPR/MPR. dan justru hal ini menjadi boomerang bagi Gusdur karena dengan sikapnya itu justru memperlihatkan sebagai pemimpin yang otoriter, dimana seorang pimpinan negara demokrasi tidak boleh melakukan hal itu.

Pada saat itu saya kirim surat ke MA mengeluarkan fatwa hukum bahwa tindakan Gusdur melanggar konstitusi, kami meminta MA untuk melakukan tindakan hukum. Alhamdulillah MA pada dini hari itu juga memutuskan bahwa tindakan Gusdur bertentangan dengan konstitusi dan tidak berhak untuk membekukan DPR/MPR. Dan pada saat itu juga menjelang sidang tahunan untuk mencabut status presiden Gusdur. Nah saya perlu juga tambahkan pada saat tekanan itu Golkar tetap menjelaskan semangat paradigma baru kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada penetapan capres 2004, melalui mekanisme konvensi. pada saat konvensi juga kami lakukan dengan demokrasi dengan proses penjurangan pada DPD tingkat I. Terpilihlah 5 orang. Sebenarnya JK sudah ikut terpilih. Namun ada tawaran dari SBY untuk ikut menjadi cawapres. Konvensi itu merupakan hal yang baru bahkan partai-partai reformis pada saat itu tidak melakukan konvensi. Golkar adalah satu-satunya yang melakukan konvensi untuk penetapan capres. dan ini mendapatkan apresiasi dan simpati dari masyarakat dan puncaknya pada kemenangan Golkar pada Pileg 2004.

Golkar ingin menunjukkan konsistensinya di dalam upaya demokratisasi di dalam tubuh Golkar. Inilah cerita mengenai perjuangan Golkar pada 1998 hingga 2004. Mengenai Munas 2004 kamu bisa tanyakan kepada pak JK. namun saya mau mengatakan bahwa pada Munas 2004 proses pemilihan ketua umum di bali itu sangat diwarnai adanya pengaruh-pengaruh selaku pak JK seorang wapres dan pengaruh orang-orang yang mendukung Pak JK. Dalam memberikan dukungan juga dirasakan adanya permainan politik uang. nah ini sebenarnya tidak

sejalan dengan semangat reformasi yang perjuangankan dari sejak 1998 hingga tahun 2004. Tapi karena adanya dua pengaruh tersebut dimana pak JK sebagai Wapres tentu memiliki kekuatan, dan faktor-faktor lainnya yang saya sebut tadi disini boleh dikatakan mencederai semangat reformasi dan demokrasi yang saya perjuangankan. Dan sejak saat itu tidak lagi memperlihatkan semangat reformasi dan demokrasi. Pada tahun 2009 terjadi juga munas ke delapan terjadi juga persaingan ketat antara dua tokoh antara aburizal bakrie dan surya paloh. Saya memberikan dukungan ke ical sedangkan Surya paloh mendapat dukungan dari pak JK. Melalui proses yang demokratis dan pencoblosan yang tertutup dan akhirnya kemenangan aburizal bakri. inilah perkembangan Golkar terkait demokrasi di dalam Golkar terutama menyangkut pemilihan ketua umum Golkar 1998, 2004 dan 2009. \

pandangan bang akbar, saya melihat pada saat munas 2004 terlihat bahwa golkar tidak dapat lepas dari kekuasaan. saya juga tanyakan kepada firman subagyo bahwa golkar memang tidak bisa lepas dari kekuasaan. dan banyak juga orang-orang yang anti akbar disebabkan tidak masuk di dalam kepengurusan bang Akbar. Dan juga karena tidak demokratis karena tidak melibatkan survey dari rakyat.

Dan itulah memang pandangan dari orang-orang yang berpandangan kelompok mereka. saya tidak dalam posisi berbantah-bantahan. saya cuman ingin mengatakan bahwa dalam konvensi terbuka untuk siapa saja. Mungkin mereka itu merasakan adanya permainan uang atau ada suara-suara mengenai permainan uang. seperti nurcholish madjid yang mengikuti konvensi di daerah yang mengatakan bahwa dari visi dan misi pak Nurcholish madjid sangat baik dan relevan untuk diterapkan, bilamana terpilih menjadi Prsiden. Tapi masalahnya bukan hanya visi tapi juga masalah gizi. Nah disitulah nurcholish madjid mulai merasakan adanya permasalahan mengenai gizi.

Pada saat itu konvensi ya demokratis, kalo ada deal-deal ya itu sudah lumrah. Saat itu ditetapkan pemilihan dua kali, saya termasuk yang mendukung pemilihan dua kali agar tidak terbantahkan. Pada pemilihan pertama saya menang tapi pada pemilihan kedua saya kalah. tentu ada deal-deal politik dari pak wiranto dan itu boleh anda cari tahu dengan beliau. Pada munas 2004 juga saya merasakan bahkan pada saat pidato pertanggung jawaban saya mendapatkan standing ovation dan pada sesi tanya jawab pun saya dapat mendapat standing ovation. dua kali saya mendapat standing ovation tetapi pada saat pemilihan mereka memilih pak JK nah tentu disitu ada sesuatu saya yakin.

Kalau di dalam internal organisasi adanya dinamika politik itu biasa saja, perbedaan pandangan itu hal yang wajar. namun dasar perbedaan pandangan itu yang paling penting. nah pada Munas 2004 disitulah adanya kombinasi antara Wapres yang memiliki kekuasaan dan permainan-permainan. Adanya pertarungan kekuatan struktural yaitu saya dan kekuatan saudagar kaya yaitu pak JK nah yang menang saudagar kaya. itu yang dikatakan di dalam Koran republika.

berkaitan dengan kekuasaan jadi paradigma baru yang saya kembangkan yaitu paradigma reformasi, paradigma demokrasi, paradigma yang memperhatikan aspirasi rakyat, saya juga menyadari pada saat pemilihan presiden pada 2004 yaitu capres pertama wiranto dan kedua adalah megawati. saya secara sadar membangun koalisi kebangsaan tidak lain disebabkan dalam era reformasi kekuasaan itu harus diimbangi oleh kekuatan-kekuatan yang ada diluar kekuasaan agar jangan sampai disalah gunakan kekuasaan itu. Karena dalam hukum politik itu power tends to corrupt dan absolutely power corrupt absolutely jadi perlu adanya kekuatan yang mengawasi kekuasaan. pada saat itu kami bersama PDI-P membangun koalisi yang disebut koalisi kebangsaan. secara sadar saya juga mempersiapkan Golkar untuk tidak selalu berada di dalam kekuasaan. karena di dalam demokrasi itu tidak mungkin orang itu terus menerus berada di dalam kekuasaan, sewaktu-waktu bisa saja berada di luar kekuasaan. begitu juga di amerika tidak selamanya partai demokrat berkuasa, tidak selamanya republic berkuasa. begitu juga di Inggris, tidak selamanya Partai Buruh berkuasa bisa sewaktu-waktu digantikan partai konservatif. nah itulah yang ingin saya bangun di dalam Golkar.

Orang-orang yang berpendapat bahwa Golkar tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan mungkin itu benar, karena selama 32 tahun berada di dalam kekuasaan. tapi dengan paradigma baru saya bangun untuk siap tidak selamanya di dalam kekuasaan. ternyata paradigma selalu di dalam kekuasaan ternyata masih kuat. Dan apa yang terjadi setelah Jusuf Kalla menang dalam Ketua Umum di bali, posisi kami pada waktu itu sebagai kekuatan penyeimbang, tapi setelah JK jadi Ketua Umum maka tidak lagi menjadi kekuatan penyeimbang tapi sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Nah disini telah mulai terjadi tarik menarik antara kekuasaan dengan semangat demokrasi pembaruan.

Tahun 2004 itu memang tarikan kekuasaan itu lebih kuat. sehingga pada awalnya memberikan dukungan kepada saya, apresiasi kepada saya namun pada akhirnya mendukung pak JK. Ada dua faktor yaitu ya tarikan kekuasaan dan faktor materi. Tapi apa yang terjadi, dibawah pak JK dimana Golkar masuk dalam kekuasaan ternyata Golkar mengalami kekalahan pada saat pak JK bahkan kealahannya sangat dramatis pada saat itu kami mendapat 22% suara namun pak JK tidak sampai 15% persen suara. Itu artinya teori yang menyatakan Golkar terbiasa masuk dalam kekuasaan adalah suatu yang wajar namun terbukti justru Golkar mengalami kekalahan. Mungkin orang-perorang yang mendapat kekuasaan menikmati kekuasaan itu tapi secara institusi Golkar mengalami penurunan. Saya kira ini dapat menjadi bahan studi yang dapat dilakukan. itu tanggapan saya terhadap pendapat itu.

Saya melihat pertarungan Munaslub adalah pertarungan ideologi, yaitu semangat untuk menyelamatkan Golkar di tengah arus reformasi, dan Bang Akbar berhasil melakukannya dan membuktikannya pada kemenangan pileg 2004.

Pada Munas 2004 itu terkait pertarungan antara visi reformasi dengan motivasi yang dibawa oleh saya kedua visi yang terkait obsesi berada di dalam

kekuasaan ditambah motivasi adanya praktek-praktek money politik. orang-orang yang pragmatisme melawan visi orang2 demokrasi. nah orang2 itu tadi yang memperoleh uang adalah orang2 yang pragmatis.

tahun 2004 menang saudagar kaya, bagi saya itu berakhirnya ideologi Golkar yang dibawa bang akbar dan menjadi awal pragmatisme politik.

visi demokrasi, visi reformasi, visi pembaruan nah itulah yang dikalahkan oleh orang-orang yang pragmatis itu.

kemudian pada tahun 2004 adanya kader menjadi paham bahwa untuk menjadi ketum harus mempunyai gizi yang kuat

saya kira itulah tugas kita semua kedepan, dimana politik transaksional betul-betul harus kita hilangkan harus betul2 kita cegah, jangan sampai menggejala karena ini mencederai demokrasi dan mencederai demokrasi. Kalau tidak praktek2 transaksional dan pragmatisme politik semakin menggejala dan akhirnya akan merusak sistem politik, sistem demokrasi yang ingin kita bangun. oleh karena itu saya mempunyai pandangan dari sistem kepartaiannya saya mendorong agar sistem kepartaian kita semakin sederhana. ada dua jalan agar sistem pemerintahan kita semakin kompatibel. sistem kita kan presidensil jadi tidak memerlukan partai yang banyak. apalagi presiden dipilih langsung oleh rakyat. berbeda dengan sistem parlementer didukung oleh parlemen.

Partai-partai yang menentukan pemerintahan. sedangkan sistem presidensil yang menentukan adalah rakyat. Meskipun pengaturan di dalam sistem pencalonan Presiden kita melalui Partai politik. Tapi menentukan sesungguhnya adalah rakyat, bukan partai meskipun partai yang mencalonkan. Akhirnya rakyatlah yang berdaulat. oleh karena itu dalam sistem presidensil kita tidak memerlukan partai yang banyak. Menurut pandangan saya untuk menyeleksi partai lebih sederhana yaitu harus tetap melakukan cara-cara demokrasi, tidak boleh dengan cara kekuasaan. Berbeda dengan Orde Baru, caranya lebih menggunakan pendekatan top down dimana pak Harto pada saat itu presiden memanggil ketua-ketua Partai menyampaikan amanat dari mpr untuk penyederhanaan partai. Karena posisi beliau yang sangat menentukan maka terjadilah penyederhanaan.

Hasil Wawancara Tokoh Golkar
Andi Matalata
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Periode 2004-2009,
Ketua Fraksi Partai Golkar Periode 1998-2004, 2004-2009.
Jakarta, 7 Maret 2012.

apakah di media blg bahwa terjadi money politic pada saat pemilihan ketua umum itu bagaimana pandangan bapak?

saya tidak tahu, namanya politik uang itu kalau beli suara ada transaksi nah mestinya tanya kepada yang punya voting rights.

apakah sosok ketua umum golkar harus berduit? saya melihat track record pak JK yang kaya berganti kepada bang ical yang lebih kaya lagi. apakah itu tidak terlihat bahwa untuk menjadi ketua Golkar harus orang kaya?

saya tidak mengatakan itu harus, tetapi kalau orang miskin memang agak susah. karena tapi saya tidak ktakan kaya bukan berarti akan bermain uang yah karena saya rasakan pada saat JK jadi ketua umum pada 2004 lalu terjadi perubahan pimpinan, kan sudah ada pemilu pas pak Jusuf kalla masuk jadi pimpinan, jadi boleh dikatakan sudah ada dalam rezimnya akbar, dprnya dilantik 2004 sehingga orang2 di dpr ini dicalonkan oleh akbar. orang2 di dpr ini ingin supaya yang menjadi ketua fraksi adalah orang yang bisa diterima oleh semua pihak baik pihak pak akbar atau pak jusuf kalla. Karena saya sudah pernah menjadi ketua fraksi pada waktu pak Habibie, calonnya dlu paskah suszetta. beberapa orang bertemu pak JK kita butuh orang yang bisa mengayomi semua orang yaitu saya. Pak jk tanya mau ga dia? pak jk gak menghubungi saya, saya ditanya kalau tugas organisasi saya mau tapi saya tidak mau voting. Saya tidak mau voting karena saya tidak mau berkeringat, bisa uang macam2. Kalau saya berkeringat berarti saya bisa macam2. Jadi kalau ditugaskan saya tidak macam2 jadi melalui aklamasi. Jadi dipanggillah beberapa orang yang mau di voting, pak jk tanya calon lain tapi pak andi dicalonkan juga tapi dia gak mau voting. Semua bakal calon ini tidak usah saya sebutkan mengatakan oh kalau pak andi kami terima pak.

Jadilah saya ketua fraksi secara aklamasi. nah pada saat ketua fraksi, datanglah beberapa orang partai bapak ketua ne banyak orang yang main uang, golkar kan butuh duit bagaimana kalau kita organisisir. saya bilang saya koordinasi dlu dengan pak JK, pak ada pikiran kawan2 di panitia anggaran, bagaimana kalau kita organisir dana disana. Marah pak JK, kamu itu tak tahu uang, kamu tuh gak ngerti uang, saya tanya maksud bapak? ya kalau ditariknya 10

dikasihnya kau dua dimakannya delapan. pak jusuf kalla kan tahu. Jadi tidak boleh pak, tapi kan kita butuh uang untuk pemilu. Ah paling2 Cuma 700-900 miliar itu adalah itu urusan saya. Jadi orang dpr fraksi Golkar tidak boleh memanfaatkan karena itu tidak ada sumbangan. Kalau saya dulu Cuma tarik 2 juta per orang tapi itu untuk biaya kantor, biaya staf pegawai. Waktu saya menteri juga begitu, tidak boleh melakukan pelanggaran. Bahkan sekrang ini kan dikenal pilkada dikenal namanya mahar, kal;au dulu saya bersama Dr. Rully Chairul Azwar tidak ada uang, bahkan tiap gubernur kami kasih 50 juta perorang, walau gak ada arti uang itu. Bupati 25 juta orang, maksudnya artinya biar mereka benar2 bekerja karena partai tidak tarik uang. Saya tidak tahu apakah karena pak JK yang banyak uang atau kenapa saya gak tahu. apakah karena karakter pimpinannya atau gimana saya gak tahu.

Menurut bapak dari ketiga munas Golkar yang mana yang paling demokratis menurut bapak?

ya kalau menurut berdasarkan penghitungan suara, ya semuanya demokratis, tidak ada paksaan penguasa apalagi di Pekanbaru paling tertib.

Di Munas 2004 kan bapak jadi setim di JK, nah 2009 banyak kelompok muda yang mundur?

Orang kan butuh visi dan misi, butuh human touch belum tentu uang ya.

kalau lihat sekarang ini, katanya running cost untuk jalankan Golkar 2 milyar?

saya tidak tahu itu

kalau melihatnya seperti, tidak ada jalan lain untuk tidak dipimpin oleh orang yang berduit karena besar biaya partai?

Mungkin bergantung culture pada masing2 partai. kalau sudah terbiasa dengan iuran, idealnya kan sebuah partai politik kan iuran dari kader partai. kalau Golkar kan hanya dari kader yang ada di parlemen.

ada yang mengatakan bahwa di dalam Golkar ada faksi Akbar, Habibie, Iramasuka dan lain-lainnya?

saya sebenarnya di dalam setiap organisasi pasti ada faksi, tapi hanya orang saja yang mengelompokkan. Kalau saya dekat sama semua orang, karena saya sesuai dengan keputusan organisasi. Kecuali kalau tidak ada keputusan partai itu baru dianggap antek. Kalau faksi dengan antek itu berbeda. kalau faksi itu memperjuangkan sesuai dengan keputusan partai. Kalau memperjuangkan satu

orang itu baru namanya kubu. Ical sebagai seorang calon presiden, yang mendukungnya bukan berarti pendukung ical karena itu keputusan partai.

Bagaimana kemudian Golkar jika melihat bahwa masyarakat wah yang terpilih orang kaya lagi, ya kalau orang kaya yang terpilih pasti dia mau lebih kaya lagi bagaimana pandangan bapak tentang itu?

membangun demokrasi itu membangun rakyat. saya bilang kalo ada anggota DPR yang diam tidak bicara selama 5 tahun, karena dia wakili orang bisu. Karena kecenderungan rakyat memilih kawannya, preman pilih preman. Itulah yang terjadi, belum ada proses pencerahan. Jadi jangan salahkan juga rakyat yang maunya kok. mencela-cela dpr kenapa pilih. Kalau bisa ketua partai yang udah selesai dengan urusan dunia. Dia tidak terpikir mau jadi Gubernur, jadi dpr, jadi presiden, dia mengatur menteri2nya yang ada di kabinet hei kau jangan korupsi. Kalau tidak lagi punya hasrat urusan dunia dia punya wibawa hanya mengurus supaya kinerja kadernya benar. Sekarang mungkin belum, nanti marah ketua-ketua partai, mungkin 10 tahun lagi. orang2 berwibawa, negarawan yang tidak mikir dunia. Dia punya kewibawaan untuk menegur, harus lebih pintar jadi kalo orang dpr datang dia yang kasih arahan bukan dpr yang kasih arahan buat dpp.

Semua pemimpin negeri ini kan pengusaha kaya, ada yang melihat bahwa orang2 ini masuk kekuasaan karena dia tahu akan memperbesar keuntungan ekonominya?

“Tidak masalah orang-orang kaya masuk di dalam jajaran fungsionaris pimpinan Partai Golkar, itu sah-sah saja. Dia menggunakan kekayaannya untuk kepentingan politiknya, mau memperlebar kekayaannya tapi asalkan dengan jalan dan cara-cara yang benar.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Golkar
Firman Seobagyo, S.E.
Ketua Bidang KESRA Partai Golkar Periode 2004-2009, di Jakarta,
2009.
26 Desember 2011.

Jadi waktu Munas 2004, apa peran posisi bapak pada saat itu?

Jadi begini, saya masuk Golkar Sejak tahun 85, pada saat itu saya diajak oleh keluarga pak Sudharmono. Background saya orang biasa, saya betul2 dari desa, saya dari kabupaten kecil di Pati. Saya punya tekad harus keluar dari desa, bapak saya pada saat itu seorang kepala desa. Akhirnya saya kuliah ke Yogyakarta. Melalanguana kuliah sampai kerja sambil kuliah hingga akhirnya sampai di Jakarta. Nah disitulah saya kenal dengan keluarga pak Sudharmono, karier politik saya dibangun dari bawah, dari keapinitan, organisasi kepemudaan, aktivislah hingga akhirnya naik terus nyampe ke pokja, dan kepanitiaan2, dan saya ikut berkeliling ke daerah-daerah bersama pak sudharmono. Konteksnya adalah dalam aktivitas itu, ketika itu saya belum tertarik masuk legislatif. Karena pertarungan politik pada masa itu kan luar biasa, tidak mudah, orang bisa masuk ke dalam lingkaran kepengurusan Golkar. dan begitu juga kalau kita orang biasa mau masuk dalam lingkaran itu sulit karena kekuasaan pak Harto itu sangat2 luar biasa. kalau tidak jelas historikalnya, tidak jelas ujung pangkalnya, sulit untuk bisa masuk dalam lingkaran. Karena memang pak Harto kekuasaannya sungguh besar. sangat luar biasa mengendalikan kekuatan politik, bahkan tidak hanya Golkar, partai politik lain pun juga. Aktivitas politik di sosial kemasyarakatan pun luar biasa diperhatikan karena itu menjadi salah satu kekuatan Golkar. Nah akhirnya saya dicalonkan jadi anggota legislatif tapi tahun 1997, saya duduk di MPR pada saat itu tapi akhirnya pada reformasi saya keluar dlu. Karena saya berkeyakinan bahwa orang berpolitik itu tidak bisa kaya, yang bisa kaya itu kalau dia jadi pengusaha. Oleh sebab itu saya menyelesaikan usaha saya dulu. Sampai hari ini saya ini di dalam DPR yaitu memanfaatkan sisa waktu luang saya untuk memperjuangkan rakyat dimana saya betul2 memahami kondisi real masyarakat Karena saya berasal dari desa.

Sehingga proses dari tahap2an itu memang dari awal2 saya agak kecewa pada waktu pak Harto lengser dimana tidak ada suatu kompromi politik, pergeseran2 yang sangat luar biasa sehingga ketika Munaslub di HI, tahun 1998 terjadi pertarungan TNI dengan sipil. Memang pak Akbar dan teman2 melihat kalau pada saat itu Golkar dipimpin militer, mungkin pandangannya ya mungkin Golkar akan semakin terpuruk. Karena masyarakat/publik pada waktu itu begitu antinya dengan tentara nasional atau militer atau ABRI. Oleh karena itu proses sudah jalan dengan sedemikian rupa berlangsung proses berjalan tapi dalam perjalanannya saya terus terang agak kurang sejalan dengan bang Akbar karena di dalam proses demokratisasi itu perlu dibangun, demokratisasi yang terbangun itu karena kami mengharapkan agar partai itu sehat, sehat itu hanya bisa dicapai apabila kita membangun demokratisasi. Ciri khas demokrasi itu adalah ketika

berani menyampaikan perbedaan pendapat. nah disitulah saya mulai agak kurang sepaham dan sepandangan dengan pak Akbar. ketika bang akbar menyampaikan pidatonya pada 2004 itu, bahwa bang akbar itu akan mencalonkan tokoh2 Golkar yang akan mencalonkan tokoh2 partai yang telah memperjuangkan Golkar. Tapi ketika itu muncullah namanya rasa ketidakadilan. Ketidakadilannya yaitu tiba-tiba banyaknya orang2 yang diluar struktur, seperti orang-orang yang berasal dari PMII, Nusrone Wahid, tiba2 masuk menjadi calon legislatif nomor 1. Nah itu yang menyebabkan di dalam mulai muncul perasaan “koq begini”, termasuk saya padahal kita itu tahun 1997/1998 itu kami kampanye tanpa pamrih kita itu menghadapi golok2 perlawanan masyarakat itu luar biasa menghadapi tekanan masyarakat. Tapi kita tidak dapat mengesampingkan prestasi bang akbar, kalau belajar politik kita memang banyak harus belajar dengan bang akbar. Tapi apakah untuk tidak mendapat tekanan dari kelompok yang bertentangan dengan Golkar harus dibawa masuk kedalam partai.

Saya setuju sebenarnya tapi tidak boleh mengorbankan kader-kader yang sudah berjuang di dalam. Akhirnya setelah itu menginjak pada Munas Bali ya, Munas Bali tuh begini ketika proses konvensi partai memang telah menjadi ikon partai untuk menarik simpati bahwa saat itu ada kesan agar satu-satunya partai politik yang demokratis adalah Golkar. Tetapi kita lupa konvensi yang dijalankan itu mekanisme yang dijalankan tidak maksimal. Saya sampai sekarang mengatakan konvensi adalah mekanisme yang setengah hati karena konvensi itu idealnya dilakukan seperti pemilu, melibatkan rakyat siapa sebetulnya presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Sehingga outputnya itu benar2 akurat. tapi konvensi yang dilakukan itu per DPD, sehingga bersifat transaksional siapa yang bisa bayar nah itulah orang yang akan dicalonkan. Kita sadar sampai saat ini banyak para calon DPR, Gubernur dan Calon Presiden itu banyak gak terpilih oleh karena itu apabila partai Golkar yang dicalonkan bukan dari aspirasi pasti kalah. Oleh karena itu kami melakukan survey pada pemilu 2004, kekuatan ada di calon SBY-JK, oleh sebab itu saya dukung. Karena figure pak Wiranto pada saat itu banyak cacat persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah kinerja TNI pada masa itu dimana namanya ada DOM, macem2lah jadi saya menilai ini berat sehingga di dalam proses politik kita juga mengacu pada survei2 ternyata kekuatan ada di pak SBY-JK, sehingga saya keluar dan mendukung pak JK.

Dari situlah, setelah itu proses berjalan sedemikian rupa, pak Akbar kemudian menetapkan pak Wiranto jadi Capres, namun kesan saya pada saat itu DPP dibawah komando bang akbar menetapkan pak Wiranto, saya sudah tahu pak Wiranto akan kalah, dan ternyata betul kalah. Nah pada saat itu banyak temen2 yang kecewa, lebih kecewa lagi bang akbar lebih memilih mendukung bu Mega, karena posisi bang akbar dan bu Mega pada waktu itu berseberangan, sangat berseberangan, kenapa ketika logika berfikir, kenapa Golkar pada putaran kedua tidak milih mendukung kadernya ketimbang calon dari partai lain. Nah titik poinnya ada disitu kenapa koq mendukung bu Mega bukan pak JK. nah disini ada penolakan keras dari tingkat bawah, terutama di Jawa Tengah karena Golkar mengalami pengalaman tidak baiklah pada awal2 reformasi, bang akbar sendiri merasakannya, bang akbar dihujat, bang akbar di pokoknya mau dibunuh aja,

Golkar ditelanjangi dan itu tidak bisa dilupakan. Nah koq Partai politik yang telah memporak-porandakan Golkar koq sekarang mau kita dukung. Nah disitulah menjadi perdebatan awal mulanya.

Dan setelah diputuskan melalui rapim memutuskan mendukung bu Mega, muncullah kekuatan baru. Saya kebetulan sudah duluan keluar, sendirian ketika itu, gak sendirian tapi saya yang paling aktif pada saat itu. Muncullah gelombang ke-dua kelompok Fahmi Idris, marzuki daruzman, david napitupulu, hasan nasution, yuni mantan istri gubernur jambi, anton lesiangi ada 7 orang saat itu membentuk kelompok baru. Akhirnya saya bergabung di dalam kelompok itu membentuk perlawanan terhadap kepemimpinan bang Akbar. terus bergulir, dalam prosesnya kami hanya ingin gimana caranya pak JK bisa menang. Pada saat itu saya menjadi ketua pemenangan pemilu di Madura, ada 4 mayor jenderal hari sabano, saya, ada ustad, satu lagi dari partai PKPI. 4 orang itu penanggung jawab jawa dan Madura akhirnya kita menang. Muncullah pemikiran, pemikiran itu saya sendiri belum banyak bicara dengan kelompok 7 itu, tapi saya berdua bersama pak akhsan Mahmud mantan wakil ketua MPR/DPR RI, besannya pak JK, itu selalu berdiskusi dengan dia bagaimana Golkar dibawah era pak JK.

Kenapa saya berkeinginan untuk mendukung JK, karena Golkar itu tidak bisa dipisahkan dari zaman ke zaman tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Karena keinginan dari para kader Golkar itu kan dengan berbagai pengalamannya kemampuannya untuk membangun Indonesia lebih baik. Sebetulnya pemikiran orde baru sudah baik tetapi persoalannya adalah ketika pak Harto pada pelita keempat kan intervensi keluarga nah itu menjadi rusak. Sebetulnya apabila saat itu pak Harto diganti dengan kadernya itu kekuatan yang sangat dahsyat itu sudah tepat pada 2004, siapa yang mau diorbitkan itu pas kayak Mahathir. Dan muncullah pikiran itu, tapi pak JK pada saat itu belum ada keinginan untuk mau karena pak JK, semangatnya untuk memperbaiki negara ini, saya ingin memperbaiki negara ini lebih baik. Saat itu saya masih bergerilya mencari dukungan pikiran saya ini dan ketemulah dengan kelompok Fahmi Idris dan Pak Surya Paloh yang pada saat itu berkeinginan untuk menjadi Ketua Umum, tapi saya bilang itu gak mungkin.

Pak JK yang awalnya tidak mau itu akhirnya mau itu begini Suatu saat itu ada pertemuan yang diprakarsai oleh Bang Ical (Aburizal Bakrie) di kediaman Bang Ical. Pak Jk diundang dan difasilitasi untuk ketemu Ketua Umum pada saat itu Bang Akbar (Akbar Tandjung). Nah ketika pertemuan disitu, saya kira jam tujuh (malam), harinya saya lupa, ada pertemuan segitia antara Bang Ical, Pak JK dan Bang Akbar. Nah disitulah Pak JK langsung pulang, dan langsung sesampai dirumah saya ditelpon pak Akhsan (Akhsan Mahmud), “Man (Firman) kamu dimana?”, “Saya dirumah”, “Kamu langsung ke Ponegoro, Penting”. Kita bertiga bertemu, saya, Pak JK, dan Pak Akhsan. Ketika sedang proses (pertemuan), Pak JK bercerita “Saya baru pulang”, saya bertanya “Dari mana Pak”, “Saya dari rumahnya Ical, ketemu Bang Akbar difasilitasi Ical”, “Apa materi Pak”, Pak JK menuturkan “Begini sampai disana saya dipanggil untuk ketemu Bang Akbar difasilitasi oleh Ical, saya pikir sampai disana itu yang namanya Akbar Tandjung

itu mau menyerahkan estafet Ketua Umum, saya diberikan kewenangan untuk memilih siapa yang menjadi Ketua Umum, rupa-rupanya tidak, malah Akbar menantang.” “Suf, Kamu mau jadi Ketua Golkar”, saya menjawab “Kalo iya emangnya kenapa?”. Itu ceritanya dari pak JK. “Kalau kamu mau, kamu tidak bisa melawan saya”. Pak JK menjawab “Saya sendiri yang akan mencalonkan sebagai Ketua. Coba man hitung kekuatan kita seperti apa, di kantong saya selalu ada kertas data, saya katakan kalau per DPD kita kuat, kalau per DPD II kita semakin kuat. Oke kita maju, begitu awal mulanya. sampai keluarga pak JK pun tidak tahu dia akan maju.

Setelah keputusan itu telah dikeluarkan, kira2 jam 11 saya pulang dari rumah pak JK, saya semobil dengan akhsan Mahmud, beliau ngmg ‘gimana ini man kita udah ga punya duit habis untuk pilpres’, saya jawab ‘sudahlah pak lillahitaallah saja, ini kan untuk perjuangan untuk kita kalau memang dikehendaki oleh allah insya allah pasti ada jalan. Pagi2 saya ditelpon, besok pagi kita ketemu di hotel Mulia, kita diskusi disitu nah disitulah kita membangun biaya untuk Munas. nah disitulah kita mulai gerak, menarik karena pada saat itu Munas kekuatan itu ada diluar, saya, fahmi, bang ical semua diluar sistem karena kita telah dipecatin oleh bang Akbar, bagaimana kelompok ada diluar bisa memperoleh dukungan di dalam dan menang, disitulah saya mulai merasa matang di dalam berpolitik Saya merasa bangga karena dalam posisi secara dimana pemilu dilakukan secara demokratis saya ikut, saya orang dari desa, bayangkan saya sampai jadi pemenang pemilu.

Saya bisa membuktikan dalam thesis saya bahwa memang betul Golkar itu tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan dan uang, karena Golkar itu besar dan hidup dari situ. Nah disitulah harus dibaca dengan cermat dimana ada kekuasaan disitu harus ada orang Golkar. nah ternyata hal ini menjadi pembenaran bahwa partai apapun partai-partai kecil kalah, logikanya kan partai kecil2 itu harusnya jadi penyeimbang atau tidak masuk di pemerintahan supaya ada check n balancing di DPR. Tapi kan PKB, PPP, PAN, malah masuk dalam kekuasaan, PAN itu kan harusnya oposisi karena Partai Reformasi, nah bagaimana tanggung jawab moralnya amien rais tentang itu. Nah inikan menunjukkan ketidakkonsistenan seorang tokoh, karena reformasi yang diperjuangkan itu berorientasi hanya bagi-bagi kue kekuasaan saja, nah sekarang hatta rajasa besanan dengan SBY sekarang semakin diem. Nah itu prosesnya dan alhamdulillah kita tunjukkan akhirnya kita menang.

itu kenapa bapak dipecat alasannya?

itu karena kami tidak mendukung keputusan DPP, tapi kalau sebelum fahmi keluar saya sudah keluar duluan.

Ternyata memang ada kader2 yang tidak setuju karena pola pikirnya JK yang jelas2 kader koq tidak didukung, jadi menurut bang firman apakah karena faktor kepemimpinannya yang tidak demokratis?

demokratis yang dibangun itu tidak melibatkan rakyat, apakah betul calon yang dimajukan Golkar itu sesuai keinginan rakyat, karena konvensi hanya di DPD. Itulah dalam obsesi politik saya bahwa apa yang diinginkan rakyat dipilih rakyat. Karena kita belum menemukan figure, mega seperti itu, pak Habibie bukan orang Jawa, kalau Wiranto cacat sejarah, kalau Gusdur kan begitu. Nah politik kan harus mampu mempetakan figure, dan matematikan politik ini bisa menang tidak. Nah pak SBY kan besar ganteng dan pak JK cerdas, jujur, nah jadi menang.

Jadi memang sejak pemilu Presiden itu sudah ada perpecahan?

ya sudah ada, gejalanya justru telah ada pada pemilihan legislatif itu sudah ada, tapi pada pilpres lebih besar. Saya berani ambil resiko seperti itu, karena politik itu kan hidup dan mati. dan siapapun yang menjadi ketua umum saya tidak pernah menggunakan kedekatan saya untuk hal-hal yang negative, karena dalam sistem politik itu tidak bisa dibangun sendirian harus kolektif.

Jadi Golkar memang tidak bisa lepas dari kekuasaan?

perhitungan politik saya pada saat itu, karena pengalamannya kenapa Golkar ingin berkuasa karena rakyat Indonesia tidak bisa dibangun dengan ideologi unsich, tapi dengan mensejahterakan rakyat baru demokrasi itu bisa dibangun. Saya kasih contoh mahasiswa demon itu banyak karena bayaran, aktivis juga dulu beda dengan sekarang. Aktivis sekarang kan ketika sudah masuk di pemerintahan, di tataran elite politik berubah. djatmiko berubah, deni berubah. Nah itulah bedanya dan bahkan banyak aktivis menjadi kepanjangan tangan asing.

Jadi Golkar sekarang mantap lebih baik atau bagaimana bang?

kalau saya melihat sekarang Golkar kekuatan uang sangat besar sekali, spend untuk partai besar.

Hasil Wawancara Bersama Dr. Rully Chairul Azwar
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 1998-2004 dan
Periode 2004-2009., Jakarta, 4 Mei 2012.

Langsung saja bang Rully saya bertanya singkat2. Pada Munaslub 1998 menghasilkan ketua Umum Akbar Tandjung. Menurut Abang mengapa Bang Akbar pada saat Munaslub 1998 dapat mengalahkan bapak Edi Sudrajat ?

Jadi begini pada awal reformasi, sebagian dari para kader pendukung dan simpatisan Golkar itu pindah yak arena takut melihat masa depan Golkar ini kelihatan suram, kelihatannya akan habislah Golkar karena pada saat itu pak Harto tidak bisa lagi ikut di dalamnya. Pada saat itu kelompok-kelompok garis keras yaitu HMI kelompok pak Fahmi cs melihat kita tidak bisa bertahan dengan begini jadi mesti cut off dengan orde baru. Sementara kelompok unsur ABRI masih besar pada saat itu. pada saat itu hampir mungkin 70 persen pengurus DPD2

tingkat I dan II adalah purnawirawan ABRI. Para Purnawirawan menjadi pimpinan DPD di daerah pada saat orde baru karena memang mereka berpengaruh pada saat itu. Biasanya para purnawirawan itu kalau tidak bekas panglima, bekas Gubernur sehingga punya power yang besar sekali. Jadi dengan adanya reformasi ini kelihatannya, saya ambil faksi terbesar Golkar pada saat itu dimana dibawah kepemimpinan Pak Tri Sutrisno itu masih berada dibawah kelompok purnawirawan. Pada saat Pak Harto memberikan kekuasaan pada Habibie, maka presiden Habibie dan panglimanya adalah Pak Wiranto.

Pada saat itu Pak Wiranto juga mendapat tugas sebagai mitranya Golkar di KBA, keluarga Besar ABRI. Bersama Pak Harmoko dan Yogi S. Memed mewakili tiga jalur itu ABG. Sementara para purnawirawan ini berada dibawah Pak Tri Sutrisno meskipun Pak Tri sudah tidak menjabat Ketua Umum PEPabri kalau tidak salah. Memang terjadi dua kubu karena Pak Habibie terus terang menghendaki secepatnya dalam rangka menyelamatkan Golkar, karena tidak ada lagi Pak Harto maka Dewan Pembina tidak diperlukan lagi. Golkar harus mandiri, sehingga tidak diperlukan lagi adanya tiga jalur ABG. Jalur Beringin, Jalur Birokrat dan Jalur ABRI kan. Mendagri sebagai jalur birokrasi, Panglima ABRI sebagai jalur ABRI, dan Golkar sendiri ada tekanan dari masyarakat reformis, jadi putus hubunganlah dengan jalur ABRI dan Birokrat. dan juga ada tuntutan Golkar harus mandiri melakukan demokrasi, caranya dengan tidak lagi harus melalui persetujuan dari dewan Pembina dan dari utusan tiga jalur itu. Golkar harus berdaulat dalam memutuskan untuk dirinya sendiri, itu desakan pada saat Munaslub Golkar. Muncul memang dua kekuatan antara bang Akbar dan Pak Edi. Masih besar kekuatan dari ABRI, pada waktu itu datang semua keluarga besar ABRI yang dari DPD I dan II yang pada umumnya purnawirawan. Sturkutral kan masih asospol masih ada di daerah dan masih di pegang oleh Pak Wiranto.

Meskipun Edi Sudrajat didukung oleh keluarga besar purnawirawan TNI yaitu Pak Try Sutrisno sebagai Ketua Umum PEPABRI pada saat itu, akan tetapi Wiranto yang menjabat sebagai Panglima TNI dan telah terbiasa menjadi mitra keluarga besar Golkar yaitu sebagai wakil dari Jalur ABRI. Pada saat itu Jalur B yaitu Birokrasi dipegang oleh Mendagri Yogi S. Memed, sedangkan Jalur Golkar meskipun pada saat itu dipegang oleh Harmoko tidak bisa seenak jidat. Harus mendapat dukungan dari Pak Wiranto, karena secara struktural yaitu Kasospol dan Asospol masih dipegang oleh Pak Wiranto sebagai Panglima TNI. Disitulah terjadi tarik menarik kepentingan antara Habibie dan Wiranto, dimana Habibie meminta Wiranto untuk melakukan lobi dengan koneksi dan seluruh Purnawirawan TNI yang berada dibawah Kasospol dan Pangab dan tampaknya itu berhasil sehingga dalam voting yang namanya pemilihan munaslub ketua umum, akbar justru mendapat dukungan dari kelompok reformis dan banyak yg simpatis

dan banyak yg ingin selamat. Suara-suara yang reformis lebih mendapat simpati dari publik dibandingkan kelompok TNI. Dan menanglah bang akbar dalam pemilihan. itulah background yang mungkin kamu ga tau ya.

Kalau pada saat Munas 2004 bang akbar kalah dengan bang jusuf kalla, menurut bang rully kenapa bang akbar bisa kalah dengan pak JK pada saat Munas 2004?

pada saat bang akbar kan dua kali kepengurusan yaitu pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 dan itulah era yang paling sulit, Golkar harus benar-benar memposisikan dirinya sebagai partai yang independen jadi kita betul2 harus menyuarakan aspirasi rakyat kalau tidak kita akan dibuang oleh rakyat. Karena tuntutan bubar Golkar oleh kelompok2 baik itu kelompok formal melalui menuntut melalui mahkamah agung, termasuk pada saat Gusdur melakukan dekrit membubarkan Golkar. Kelompok informal melakukan penekanan melalui media, pembangunan opini menyudutkan Golkar bahwa Golkar bertanggung jawab atas krisis ekonomilah, dan lain. ini membuat kita dalam kepengurusan kita solid. Kalau ada tekanan dari luar, yang di dalam pasti kompak. nah periode Akbar itu saya lihat sangat solid dalam era kepemimpinannya, saya sebagai bagian dalam pemenangan pemilunya.

Saya melihat bahwa tekanan politik ini membuat kita lebih terbuka terhadap aspirasi, kita lebih kompak di dalam rangka menyelamatkan eksistensi partai, meskipun banyak kader yang keluar membuat partai baru dan nyebrang kiri kanan, dan ini membuat akbar yang pada saat itu kebetulan sebagai figur yang tipikal moderat sekali. Bisa meredam suasana, dan berbekal pengalaman kita sebagai partai yang pengalaman berbeda dengan partai baru yang katakanlah euforia semua, sehingga kami mampu berfikir lebih jernih dan lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Saya harus melakukan komunikasi dengan partai-partai kecil bahwa Golkar jangan didiskualifikasi, alhamdulillah banyak partai-partai baru yang bisa saya ajak berfikir rasional dan akhirnya golkar dapat suara 24%. kalau tidak hanya 10%. Partai reformis masih dibawah 20% semua kecuali PDI-P yang mendapat 34%.

Pada saat itu rakyat menginginkan PDI-P menjadi Presiden, yang merupakan oposisi Golkar nah pada saat itu mulai terjadi polarisasi antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Terbangun setelah sekian puluh tahun primordialisme ini hilang. Pada masa reformasi primordialisme ini bergabung dalam poros tengah bergabung dalam pak Dur. Semua kelompok Islam masuk dalam poros tengah. Bu Megawati sebagai simbol reformasi, Pak Amien rais juga sebagai simbol reformasi menghadapi poros tengah, nah disinilah peran Golkar. Sebagai Partai yang berpengalaman dia bisa menjadi deteren faktor,

kedua kekuatan besar ini. Sehingga dalam pembagian kekuatan Golkar masih bisa berpengaruh, karena apabila dia berpihak kepada poros tengah maka menang poros tengah ini, kalo ke PDI-P menang PDI-P. Golkar menjadi kekuatan deteren tetapi sayangnya Golkar terpecah dua, satu kelompok dikenal dengan Iramasuka yang dekat dengan pak Habibie, dipimpin oleh pak baramuli ini memang lebih berpihak kepada Islam. Sedangkan Bapak Akbar, Ginandjar dan Marzuki Darusman sebagai ketua fraksi partai Golkar di MPR itu lebih cenderung kepada nasionalis.

Ini tergambar pada saat pemilihan Presiden, sayangnya PDI-P pada saat itu masih arogan karena PDI-P sebagai pemenang pemilu ya, poros tengah pada saat itu mulai melepaskan diri ya karena itu, suara Golkar dilepas sebagian berpihak kepada mega sebagian berpihak pada Gusdur. Walaupun akhirnya Gusdur juga melakukan dekrit membubarkan Golkar saya tidak tahu itu kenapa. 1999 kita pilih Gusdur, 2000 Gusdur mengeluarkan dekrit bubarkan Golkar. Akbar saya katakan dapat dapat mempertahankan Golkar namun setelah bullogate, memorandum I dan memorandum II, Mahfud MD ini mengumumkan bullogate II untuk akbar. Nah disinilah Golkar mendapat tekanan lagi, sampai hampir mau pecah. Kelompok Fahmi yang bersikap anti-akbar meminta akbar untuk mundur sedangkan kelompok mahadi sinambela meminta Akbar untuk tetap bertahan sekalipun di penjara.

Saya kebetulan mengambil sikap tengah saja bahwa sepanjang Akbar belum ada keputusan tetap tentang akbar, jangan kita minta akbar untuk mundur. Pada saat itu ketetapan ada di Mahkamah Agung. Saya perkenalkan konvensi kepada Akbar, untuk mengalihkan isu dan mengadakan demokrasi pemilihan presiden untuk Golkar karena momentumnya ada pada saat itu, momentumnya yaitu amandemen UUD mengenai pemilihan Presiden secara langsung Tahun 2001. Tahun 2002 kami melakukan konvensi dan 2003 konvensi berlangsung. Konvensi bisa menyelamatkan image Golkar, sehingga Golkar menjadi pemenang pada Pileg 2004. Golkar berhasil melakukan rebound dan bahkan bisa menyelamatkan Akbar, dan setelah pemilu akbar dinyatakan bebas.

Saya menyatakan bahwa apa yg terjadi di dalam Golkar saat itu saya ikut terlibat menjadi pelaku. Tapi sayangnya pada pemilu berikutnya saya tidak dapat nomor urut dapil Bengkulu 2004, hanya dapat nomor dua. Suara saya paling banyak di Bengkulu tapi tidak dapat tempat. Walaupun Akbar tahu saya yang kerja, tapi calon legislatif dari pak Wiranto karena ada deal lah. Saya ingin cerita pada Munas 2004 di Bali pada saat akbar sudah mendapat tekanan darimana-mana pada saat konvensi, nah kelompok yang anti-Akbar ini semakin banyak bergabung dalamnya apakah itu pak Agung, Surya Paloh, mereka meminta Pak Jusuf Kalla untuk menjadi Presiden.

Saya waktu itu lurus saja ga maen kiri kanan. Tapi memang musuh akbar pada saat itu banyak sekali. Karena apa pada saat Akbar memimpin Golkar sudah besar dan kuat, mungkin karena sakit hati ga kebagian dan merasa aspirasinya tidak tertampung atau penuh, faksi-faksi ini bergabung dan faksi-faksi non-Akbar itu besar sekali pada saat itu. Sementara saya sendiri tidak ikut faksi mana, saya cuman mensukseskan Munas. orang banyak menduga saya pada saat itu masuk dalam faksi Akbar. Memang pada pertanggung jawaban akbar itu standing applause, dan beberapa hari kemudian standing committee harus memverifikasi para kandidat ketua umum, saya masuk dalam tim itu.

Bersama pak hatta yang benar orang Akbar betul, ada keinginan untuk mencoret pak Jusuf Kalla karena dia bukan pengurus. Ternyata ada bukti bahwa Pak Jusuf Kalla pernah menjadi pengurus Golkar di Sulawesi Selatan, ketua bidang departemen di Sulawesi selatan sehingga tidak boleh dicoret. tetapi ini asli gak, yah tentulah asli dan dicek ya bener dan tidak dicoret. Tapi kan pas saat memverifikasi ini lama sekali, ketua timnya rudi entah kemana, kami ditaruh dekat hotel di bandara Bali, saya lupa namanya disuruh tim kerja tapi sampai malam kami belum bisa kembali. Jam 8 kami baru diajak, karena akbar diduga akan menikung atau main kasar, padahal akbar tadi mendapat standing ovation. Jadi kelompok yang anti-Akbar, bayangkan bergabung prabowo, ical, suryapaloh, pak jusuf kalla ada 8 kekuatan besar. Dan dalam voting kalah akbar. Jadi terlepas dibalik itu ada permainan ya, saya bisa mengatakan bahwa

Partai Golkar saat ini telah menjadi partai besar yang keputusannya telah go public , partai modern yang tidak bisa lagi dikuasai oleh satu dinasti saja seperti partai-partai lainnya. Sehingga siapapun yang bisa menguasai saham terbesar di dalam Partai, ya dia menjadi Ketua Umum. Biaya untuk bisa mengelola untuk Partai Golkar sangat besar, sehingga keunggulan materi luar biasa besar (untuk menjadi Ketua Umum). Jadi salah satu kendala untuk bisa mengelola Partai (menjadi Ketua Umum), dia harus memiliki kemampuan finansial, kalau tidak dia tidak mungkin bisa mengurus kepentingan dana Partai sebesar ini, walaupun tidak harus punya uang sendiri namun kalau dia bisa menghimpun akses untuk memperoleh dana untuk partai juga tetap bisa. Syaratnya adalah makin besar partai itu maka makin besar pula biaya partainya.

Partai modern yang seperti Golkar yang telah go public, artinya siapapun dapat bisa masuk dengan intervensi dana dan materinya untuk menjadi Ketua Umum walaupun dalam sejarah (Partai Golkar) dia tidak pernah berbuat apa-apa, kunci utamanya bukan dari kinerja sejarahnya terhadap Partai Golkar, tetapi dinilainya dari bagaimana ia bisa mengelola kebutuhan dana untuk partai. Kebutuhan dana menjadi kebutuhan bagi darahnya Partai. Darahnya ini ternyata lebih penting di dalam kehidupan Partai ketimbang organ-organ lainnya. Dan

tidak semua orang memiliki darah segar ini. Kenapa orang semua berminat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, karena menentukan kekuasaan buat pribadi, kelompok, dan lain sebagainya. jeleknya kita tidak bisa jangka panjang, ganti juragan ganti kebijakan. tidak seperti jaman pak harto, kita bisa naik menjadi ketua umum berdasarkan perjuangan panjang dan pengabdian lama di dalam Partai Karena kekuasaan itu memperbaiki ekonomi juga buat individu, kelompok lainnya.

Kalahnya akbar di bali semata-mata hanya karena dia banyak musuhnya, perbedaan2 prinsip itu berawal dari presiden, dimana akbar membawa Golkar ke arah kelompok tertentu yaitu ada yang menyebutnya kelompok ijo, ijo royo-royolah. dan akbar pada saat itu kelompok Islam yang ada di Habibie, kelompok Iramasuka yang anti-akbar artinya Indonesia bagian timur, lawannya akbar, menjadi kelompok penekan akbar. Jadi keberhasilan akbar dalam mengawal dan mempertahankan Golkar pada awal reformasi, dan diakui oleh forum pada saat Munas yang mendapatkan apresiasi standing ovation, itu dapat dilupakan dalam sekejap. Munas 2004 itu sudah terlihat gejala pragmatisme politik dan itu akan terus menggejala, dan juga saya yakin akan menggejala di partai politik lainnya. Mungkin pada saat ini masih dinasti penguasa tunggal seperti megawati, muhamadiyah, godfather demokrat masih ada, yang agak go public yaitu ustad hilmy PKS itu, ihwanul musliminnya. Golkar gak punya siapapun yang punya saham terbesar bisa menjadi pemimpin, ada baiknya ada buruknya juga. Buruknya ganti juragan ganti kebijakan juga, sekarang hanya lima tahunan saja. gak seperti zaman pak harto.

Jadi kemenangan ical sudah kelanjutan dari pragmatisme politik

Kubu ical merupakan kubu pecahan Jusuf Kalla yang tidak mendukung pencalonan JK maju menjadi Presiden karena tahu bahwa gak akan menang pada Pilpres 2009. Pada saat Rapim dimana Pak JK mengumumkan “saya akan maju sebagai Capres”, Kelompok ini sudah mengkristal dan disitulah Pak Ical berada. Dan Surya Paloh memberikan dukungan kepada pak JK maju terus menjadi Capres. Dan itu berlanjut kepada Munas (ke-delapan di Pekanbaru, 2009). Nah disitulah para pendukung Ical sejak awal mengklaim bahwa apabila nanti Ical terpilih menjadi Ketua Umum, kelompok pendukung JK harus menyingkir dari kepengurusan. Saya setelah pak JK kalah saya bergabung dengan Ical.

Saya dibilang telat mendukung, karena selesai rapim saya tetap menjalankan tugasnya untuk mendukung pilpres JK. Saya tugas selesai baru masuk ke dalam Ical. Di kelompok Ical hampir saya pun dibuang, padahal bukan saya telat mendukung tapi memang saya tidak main kanan kiri. Sehingga saya

dikasih bidang ketua bidang infrastruktur yang ga jelas sekarang ini. Mungkin saya dihormati karena sebagai orang tua saja sekarang.

